

PERAN KESULTANAN SERDANG DALAM PENGEMBANGAN ISLAM DI SERDANG BEDAGAI



HASIL PENELITIAN

Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Pangkat Edukatif
Dosen FITK UIN Sumatera Utara

PENELITI:

Drs. Khairuddin, M.Ag

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN 2016**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan mengiringi selesainya penulisan hasil penelitian ini yang berjudul: “Peran Kesultanan Serdang dalam Pengembangan Islam di Serdang Bedagai”. Ditulisnya hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya menggali khazanah pengetahuan tentang sejarah penyebaran Islam di Sumatera Utara dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kesultanan Serdang.

Hasil kajian ini penting dilakukan, sedikitnya untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, serta merangsang para peneliti dan sejarawan lain untuk melakukan penelitian lebih jauh, lebih lengkap, dan dengan data yang lebih kaya. Hanya dengan cara ini kekayaan khazanah kita dapat diungkap, dan dengan cara ini pula generasi muda masa kini mengenali khazanah budaya keagamaan pada masa lalunya yang kaya dan penuh makna.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Batasan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kerangka Teori.....	17
F. Kajian-kajian terdahulu	19
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Setting Sosial Kerajaan Serdang.....	21
B. Peran Kesultanan Serdang dalam Kesejahteraan Rakyat	36
C. Kesultanan Serdang Pasca Kemerdekaan	46
BAB III GAMBARAN UMUM KERAJAAN SERDANG	51
A. Sejarah Berdirinya Kerajaan Serdang	51
B. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Serdang.....	52
C. Periode Pemerintahan	52
D. Wilayah Kekuasaan.....	54
E. Kehidupan Sosial-Budaya.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	56
A. Proses Islamisasi di Kerajaan Melayu Sumatera Timur	56
B. Peran Kerajaan dalam Pengembangan Agama Islam	64
C. Kerukunan Antar-Etnis dan Demokratisasi	66
BAB VIII PENUTUP	69
DAFTAR BACAAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal berdirinya Kesultanan Serdang terkait erat dengan masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Panglima Besar Tentara dan Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam yang bernama Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, menjadi tokoh sentral atas terbentuknya embrio Kesultanan Serdang. Di bawah komando Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Aceh Darussalam yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. (1607-1636 M), berhasil menundukkan negeri-negeri di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatra, termasuk Johor dan Pahang pada tahun 1617 M, Kedah (1620 M), Nias (1624 M), dan lain-lainnya.

Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, yang bergelar Laksamana Kuda Bintan, diduga kuat adalah orang yang sama dengan Laksamana Malem Dagang, pemimpin militer Aceh Darussalam dalam upaya melawan bangsa Portugis pada tahun 1629. Berkat pengabdianya terhadap Kesultanan Aceh Darussalam, pada tahun 1632 Sultan Iskandar Muda berkenan memberikan penghargaan dengan melantik Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai wakil Sultan Aceh atau /Wali Negeri/ untuk memimpin wilayah Haru (Sumatra Timur). Haru adalah salah satu kerajaan yang berhasil ditaklukkan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pemerintahan di wilayah Haru yang dipimpin oleh Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan ini kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Deli. Pengelolaan wilayah Haru (Kesultanan Deli) oleh Kesultanan Aceh Darussalam mengusung beberapa misi, antara lain: Menghancurkan sisa-sisa perlawanan Kerajaan Haru (yang dibantu oleh Portugis); Mengembangkan misi Islam ke

wilayah pedalaman; Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Aceh Darussalam.

Kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan di Kesultanan Deli mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di kawasan tersebut. Misalnya adalah Datuk Imam Surbakti, pemimpin Kerajaan Sunggal (kerajaan lokal di pedalaman Haru), yang berkenan menikahkan adik perempuannya, bernama Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, dengan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1632 M. Pengakuan dari kerajaan-kerajaan lokal itu membuat roda pemerintahan Kesultanan Deli yang masih berada di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam berjalan dengan cukup lancar. Setelah Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan meninggal dunia pada 1641 M, kekuasaan atas wilayah Deli diberikan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700 M) yang kemudian bergelar sebagai Panglima Deli. Pada kurun waktu yang sama, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam mulai melemah seiring wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 M.

Selanjutnya, pada tahun 1669 M, Tuanku Panglima Perunggit berupaya memerdekakan Kesultanan Deli dari penguasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Upaya ini didukung oleh Belanda yang sudah membangun benteng di kawasan Malaka. Tuanku Panglima Perunggit meninggal dunia pada tahun 1700 M, dan digantikan oleh Tuanku Panglima Paderap. Pemerintahan raja kedua Kesultanan Deli ini berlangsung hingga tahun 1720 M. Namun, setelah Tuanku Panglima Paderap wafat, wilayah Kesultanan Deli mulai dilanda perpecahan. Selain karena mulai berpengaruhnya Kerajaan Siak di wilayah Sumatra Timur, ancaman juga disebabkan oleh adanya upaya perebutan kekuasaan di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap. Tuanku Panglima Paderap memiliki empat orang anak, yaitu: Tuanku Jalaludin Gelar Kejuruan Metar, berasal dari keturunan bangsawan Mabar, Percut, dan Tg. Mulia. Tuanku Panglima Pasutan, berasal dari keturunan bangsawan Deli dan Bedagai. Kejuruan Santun, berasal dari keturunan bangsawan Denao dan Serbajadi. Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejuruan Junjongan, berasal dari keturunan bangsawan Serdang dan Sei Tuan.

Pada tahun 1723 M, terjadi perang saudara di lingkungan keluarga Kesultanan Deli. Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, yang paling berhak atas tahta Deli karena merupakan anak dari permaisuri, tidak berhasil memperoleh haknya. Dalam pertempuran melawan saudaranya, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan menelan kekalahan, dan bersama ibundanya, Tuanku Puan Sampali (permaisuri Tuanku Panglima Paderap), terpaksa mengungsi hingga kemudian mendirikan pemukiman baru yang bernama Kampung Besar. Dengan menyingkirnya Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan, maka tahta Kesultanan Deli dikuasai oleh Tuanku Panglima Pasutan. Tidak semua pihak setuju dengan naiknya Tuanku Panglima Pasutan sebagai penguasa Deli. Beberapa raja-raja lokal yang menolak mengakui Tuanku Panglima Pasutan dan memilih berada di pihak Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan antara lain: Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Kejeruan Lumu (Aceh). Mereka kemudian menobatkan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan sebagai pemimpin sebuah pemerintahan baru yang berkedudukan di Kampung Besar. Pemerintahan baru inilah yang berdiri pada tahun 1723 M inilah yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Serdang.

Pemerintahan Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan berlangsung selama 44 tahun sampai dengan tahun 1767 M. Tuanku Umar Johan memiliki tiga orang putra, yakni Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamshah, dan Tuanku Sabjana (Pangeran Kampung Kelambir). Oleh karena Tuanku Malim menolak dilantik menjadi raja sebagai pengganti ayahnya, maka yang kemudian didaulat untuk menduduki tahta Kesultanan Serdang setelah Tuanku Umar Johan mangkat adalah Tuanku Ainan Johan Alamshah (1767-1817). Sultan Ainan Johan Alamshah beristrikan Tuanku Puan Sri Alam, putri dari Kerajaan Perbaungan. Wilayah Kerajaan Perbaungan sendiri kemudian bergabung dengan Kesultanan Serdang. Perkawinan Sultan Ainan Johan Alamshah dikaruniai beberapa orang anak, namun anak pertama

yang seharusnya menjadi putra mahkota, yakni Tuanku Zainal Abidin, gugur dalam suatu peperangan yang terjadi di Langkat. Sebagai pengganti, ditunjuklah putra kedua Sultan Ainan Johan Alamshah yang bernama Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (1817-1850), sebagai penerus tahta Kesultanan Serdang.

Pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah, yang juga dikenal dengan gelar Sultan Besar Serdang, Kesultanan Serdang mengalami masa-masa kejayaan. Serdang menjadi kesultanan yang makmur karena kemajuan sektor perdagangannya. Nama Kesultanan Serdang dikenal negeri-negeri lain sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan pertahanan dan keamanan dari Kesultanan Serdang. Pengganti Sultan Thaf Sinar Baharshah adalah putranya yang tertua, yaitu Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah (1819-1880). Kepemimpinan Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah mendapat legitimasi dari Sultan Aceh Darussalam, yakni Sultan Ibrahim Mansyur Syah, berupa pengakuan /Mahor Cap Sembilan. Ketika pada tahun 1854 Kesultanan Aceh Darussalam mengirim ekspedisi perang sebanyak 200 perahu perang untuk menghukum Deli dan Langkat, Serdang berdiri di pihak Aceh. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah didampingi oleh Orang-orang Besar, wazir, dan raja-raja taklukkan. Namun, era pemerintahan Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah diwarnai banyak pertikaian, baik internal maupun eksternal. Selain berkonflik dengan Kesultanan Deli dalam persoalan perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi hegemoni dari Belanda yang datang ke Serdang pada tahun 1862.

Melalui Acte yang Erkenning tertanggal 16 Agustus 1862, Kesultanan Serdang akhirnya terpaksa takluk kepada Belanda yang semakin menekan. Ketika Sultan Basyaruddin Shariful Alamshah wafat pada tanggal 7 Muharram 1279 Hijriah (Desember 1880), sang putra mahkota, Sulaiman Shariful Alamshah, masih sangat muda sehingga pemerintahan Kesultanan Serdang untuk sementara diserahkan kepada Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Shariful Alamshah). Setelah dinilai sudah cukup umur, Sulaiman Shariful Alamshah diangkat sebagai pemimpin Kesultanan Serdang dan mendapat pengakuan dari

pemerintah kolonial Hindia Belanda tertanggal 29 Januari 1887. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah, Kesultanan Serdang melakukan beberapa tindakan strategis untuk menangkal semakin kuatnya pengaruh penjajah Belanda. Salah satu gerakan penting Sultan Sulaiman Shariful Alamshah adalah ketika pada tahun 1891 terjadi perlawanan terhadap Belanda ketika Kontrolir Serdang (wakil dari pemerintah kolonial Hindia Belanda) memindahkan ibukota Serdang dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam.

Sebagai bentuk perlawanan, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menolak ikut pindah ke ibukota baru pilihan penjajah, dan sebaliknya justru membangun istana baru, yakni Istana Perbaungan (Keraton Kota Galuh), pada tahun 1886. Selain itu, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah juga membangun Masjid Raya Sulaimaniyah, kedai, pasar ikan, dan kompleks pertokoan sehingga berdirilah sebuah kota kecil yang diberi nama Simpang Tiga Perbaungan. Kota inilah yang dijadikan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah sebagai tandingan ibukota Serdang versi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1898 Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menolak menghadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia, beliau tidak bersedia juga menghadap Ratu Kerajaan Belanda. Alih-alih menuruti permintaan itu, pada waktu yang sama, Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah malah mengunjungi Jepang dan Tiongkok. Aksi pembangkangan ini menjadi bukti nyata bahwa Kesultanan Serdang berani melawan arogansi Belanda. Dalam kunjungannya ke Jepang, Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dijamu secara pribadi oleh Tenno Heika Kaisar Meijimutshuhito. Namun, di pihak lain, Belanda memanfaatkan kepergian Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dengan mempersempit batas wilayah Kesultanan Serdang.

Kesewenang-wenangan Belanda ini menyebabkan perubahan dalam susunan /Orang-orang Besar/ dimana Belanda menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk /Raja Muda/ dan /Wazir Paduka Setia Maharaja.

Periode pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah berlangsung cukup lama yakni dari era masa ketika kolonialisme Belanda berkuasa (1866)

hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia (1946). Tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, pada bulan Desember 1945 Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah menyatakan dukungan terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Memasuki tahun 1946, wilayah Sumatra Timur, termasuk Serdang, dilanda situasi yang mencekam. Pada tanggal 3 Maret 1946, terjadi peristiwa menggegerkan yang dikenal sebagai Revolusi Sosial di mana terjadi penangkapan terhadap raja-raja yang ada di Tanah Karo oleh orang-orang berideologi kiri. Raja-raja dan kaum bangsawan itu oleh kaum kiri dianggap sebagai pengkhianat karena dulu mengabdikan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di Serdang, keadaan sedikit berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Kesultanan Serdang luput dari pembantaian karena adanya dukungan yang positif dari Sultan Sulaiman Shariful Alamshah terhadap kaum pergerakan. Selain itu, perasaan anti Belanda Sulaiman Shariful Alamshah telah dikenal sejak zaman kolonial. Sokongan penuh Kesultanan Serdang terhadap berdirinya NKRI semakin memperkuat bahwa Sulaiman Shariful Alamshah berada di pihak Republik Indonesia. Sultan Sulaiman Shariful Alamshah juga menganjurkan kepada para kerabat dan kaum bangsawan Kesultanan Serdang untuk menempati posisi dalam struktur angkatan bersenjata Republik Indonesia serta organisasi-organisasi politik yang berhaluan Islam maupun nasionalis. Oleh karena itu, ketika terjadi "Revolusi Sosial" tanggal 3 Maret 1946, diadakan perundingan antara Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalion III Tentara Republik Indonesia di Medan) dengan Tengku Mahkota Serdang dan para tokoh adat Kesultanan Serdang. Dari perundingan itu kemudian diambil keputusan bahwa Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada TNI yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah Republik Indonesia, Keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1946, diutuslah Jaksa Tengku Mahmuddin dan Panitera Tengku Dhaifah atas nama Kesultanan Serdang untuk secara resmi menyerahkan administrasi pemerintahan kepada pihak TNI yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan ini dipersatukan oleh Komite Nasional Indonesia wilayah Serdang dan sejumlah

wakil organisasi masyarakat serta organisasi politik lainnya di kantor Kerapatan di Perbaungan. Peristiwa pada 4 Maret 1946 ke segenap pelosok wilayah Serdang itu menjadi sebuah momen unik yang berlaku untuk pertamakalinya di Indonesia.

Sejak saat itulah, Kesultanan Serdang meleburkan diri sebagai bagian dari NKRI sebagai wujud komitmennya terhadap berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada 13 Oktober 1946, Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dikebumikan dengan upacara militer di makam raja-raja di sebelah Masjid Raya Perbaungan. Sebagai pewaris tahta Kesultanan Serdang selanjutnya adalah Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar. Namun, dikarenakan oleh situasi politik dan keamanan yang belum stabil, maka Tuanku Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar hanya dinobatkan sebagai kepala adat, bukan sebagai Sultan Serdang. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar sendiri tidak bersedia dinobatkan sebagai Sultan karena masih trauma dengan serentetan kejadian tragis dalam “Revolusi Sosial” Pada awal tahun 1946 itu. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar wafat di Medan pada 28 Desember 1960 dan dimakamkan di Perbaungan. Setelah mangkatnya Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar, masyarakat adat Serdang tidak lagi mempunyai kepala adat dan posisi ini mengalami kekosongan selama lebih kurang 35 tahun. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 November 1996, Kerapatan Adat Negeri Serdang mengadakan sidang dan memutuskan bahwa Pemangku Adat Serdang dipilih serta ditetapkan dari putra-putra almarhum Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah yang masih hidup. Dari sidang-sidang tersebut kemudian diputuskan Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj, putra ketiga Sultan Sulaiman Shariful Alamshah dan pemegang mahkota Kesultanan Negeri Serdang yang ke VII sebagai Pemangku Adat Negeri Serdang dan Ketua Kerapatan Adat Negeri Serdang. Penabalannya dilakukan dalam upacara adat di Gedong Juang 45 di Perbaungan pada 5 Januari 1997. Kebangkitan Kesultanan Serdang ternyata tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Institusi kesultanan semata-mata hanya dilihat dari perspektif politik. Keberadaan Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Dampaknya, aktivitas

kesultanan pun dibatasi hanya sebagai institusi istiadat semata. Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj mangkat pada tanggal 28 Januari 2001 karena sakit dan dikebumikan di Makam Raja Diraja di samping Masjid Raya Perbaungan. Sebelum jenazah Tuanku Abunawar Sinar Shariful Alam Al-Haj diberangkatkan pada tengah malam tanggal 28 Januari 2001, terlebih dulu diadakan musyawarah sesuai dengan adat Raja Mangkat Raja Menanam, untuk menentukan siapa pewaris adat Kesultanan Serdang.

Dalam musyawarah itu, anggota sidang menyepakati bahwa Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (waktu itu bergelar Temenggong Mangkunegara Serdang) ditetapkan sebagai Pemangku Adat Serdang yang selanjutnya. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke-VIII digelar pada tanggal 12 Juni 2002 di Perbaungan. Upacara ini dihadiri oleh 6.000 orang utusan dari seluruh wilayah Serdang dan 2.000 orang undangan dari pemerintah RI serta dari 4 negara. Sejarawan sekaligus Budayawan Melayu adalah dua identitas yang melekat pada Tengku Luckman Sinar, S.H.¹ Sultan Pemangku Adat Kesultanan Melayu Negeri Serdang yang bergelar Tuanku Luckman Sinar Basarshah II. Dua identitas itu sangat jelas terlihat dalam berbagai karya tulis, pemikiran, dan aktivitas beliau. Maka layaklah jika sederet prestasi dan beragam penghargaan, mengisi lembaran kisah kehidupannya. Beliau lahir di Istana Keraton Kota Galuh Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juli 1933. Kehidupan masa kecil sampai masuk ke dunia pendidikan formal ditempuh di Medan. Beliau berturut-turut menempuh pendidikan formal di Hestel Lagere School di Medan (tamat 1950), R.K. Middlebare Uitgebroid Lager Onderwijs (MULO) di Medan (tamat 1953), SMA di Medan (tamat 1955), kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan (Sarjana Muda 1962), dan Pendidikan Kemiliteran LPKW (1963). Setelah menempuh pendidikan di Medan, pengetahuan Tengku Luckman Sinar semakin lengkap ketika hijrah ke Jakarta untuk menempuh kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan

¹ <<http://melayuonline.com/history> 05 Oktober 2016

Kemasyarakatan Universitas Jayabaya (Sarjana Hukum 1969). Tidak berhenti sampai di situ saja, beliau juga menjalankan Kursus Manajemen Perkebunan di Bandung (1964). Pada 1976, beliau melakukan penelitian ke Belanda berkat kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda (1976-1980). Suami dari Tengku Hj. Daratul Qamar yang bergelar Tengku Suri Serdang ini memang layak ditahbiskan sebagai Sejarawan yang Konsisten Mengkaji Sejarah Kebudayaan Melayu. Sebutan ini diterima beliau ketika mendapat Anugerah Melayu Online 2009 dalam kategori Sejarawan yang Konsisten Mengkaji Sejarah Kebudayaan Melayu, pada 20 Januari 2009 di Gedung Concert Hall, Taman Budaya Yogyakarta Pentahbisan ini sepertinya tidak berlebihan mengingat kiprah beliau sangat luar biasa dalam menjaga, membina, sampai mengembangkan Kebudayaan Melayu. Tidak kurang dari 35 penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku atau majalah, 108 pengalaman di bidang seni dan Kebudayaan Melayu, 215 seminar telah beliau ikuti baik sebagai peserta maupun pemakalah, serta 294 artikel dan karya ilmiah telah beliau dedikasikan selama ini. Sebagai putera dari Tuanku Sulaiman Syariful Alamsyah (Sultan Serdang), maka sejak 12 Juni 2002, beliau diangkat menjadi Kepala Adat Kesultanan Serdang bergelar Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, S.H. Meskipun berperan penting sebagai penjaga adat Serdang, beliau juga masih menampilkan sisi kerakyatan yang merupakan sifat bawaan dari ajaran sang ayah. Naiknya Tengku Luckman Sinar menggantikan posisi sang ayah, tidak serta merta menggantikan karakter pribadinya yang tetap dekat dengan rakyat, pengamat budaya Melayu sejati, dan yang paling penting adalah kebiasaan beliau untuk tetap menulis, baik budaya maupun sejarah Melayu. Kekafahan beliau untuk menjaga adat Melayu tetap terpelihara, meskipun sejumlah pekerjaan lain juga membutuhkan perhatiannya. Beberapa pekerjaan tersebut antara lain Presiden Komisaris P.T. Banteuka (Eksporir dan Ekspedisi Pertamina Sumatera Utara); Dosen Luar Biasa Etnomusikologi Melayu, Sejarah Sumatera Utara dan Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Sumatera Timur pada Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara di Medan; serta kolumnis Harian /Waspada / (sejak 1987). Mantan Ketua Umum Majelis

Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) periode 2001-2004 ini sadar betul bahwa adat Melayu harus tetap ditegakkan, dipelihara, dan dikembangkan. Pengenalan tentang adat Melayu, tidak hanya dilakukan melalui berbagai seminar semata, tetapi lebih jauh dari itu, beliau juga melakukan penulisan tentang kebudayaan (adat) sampai Sejarah Melayu. Mulai sejarah kerajaan di Sumatera Timur, sejarah Kota Medan etnomusikologi dan Tarian Melayu adat perkawinan dan tatarias pengantin Melayu, sampai buku /Mengenang Kewiraan Pemuka Adat dan Masyarakat Adatnya di Sumatera Utara Menentang Kolonialisme Belanda. Bagi Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, proses penggalan sejarah dan budaya Melayu tidak kan pernah selesai. Alasannya bukan hanya sekadar kapasitas beliau sebagai Kepala Adat Kesultanan Serdang semata, tetapi lebih jauh dari itu, kecintaan beliau akan identitas budaya Melayu. Kebudayaan Melayu tidak boleh luntur dan sudah merupakan bagian dari tugas beliau untuk tetap memelihara kebudayaan dan memberikan informasi kepada anak muda tentang identitas kemelayuan mereka. Maka tidak mengherankan, ketika ada orang bertanya tentang sejarah Sumatera Utara (khususnya Medan) maupun kebudayaan Melayu, rujukan pertama pastilah saksi hidup yang bernama Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, S.H.

Islam sebagai agama yang mencakup aqidah dan syari'ah, telah meletakkan dasar-dasar aturan dan pedoman kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan (*al-basanah*) di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sasaran (*al-ghayah*) akhir dari syari'ah adalah kemaslahatn umat (*al-maslahah*). Upaya apa saja yang dilakukan untuk kemaslahatan iyu pada hakikatnya adalah sejalan dengan syari'ah Allah (*inna ghayah al-syari'ah al-mashlahah, wa ainama tujad al-maslahah fa tsamma syar' Allah*).

Di antara syari'at yang telah digariskan dalam Al-Qur'an adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan masjid terulang sebanyak 28 kali yang menurut bahasa berakar dari kata *sajada*, sujud, dan berhati patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim.

Masjid adalah bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dalam arti tempat sujud Bentuk lahiriah dalam shalat, yang antara lain ditandai meletakkan dahi, kedua belah telapak tangan, lutut dan kaki ke bumi adalah manifestasi dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sujud dalam arti syari'ah ini pada hakikatnya adalah fungsi minimal dari masjid.²

Kalau masjid dihubungkan dengan makna yang terkandung pada akar katanya, maka fungsi masjid adalah tempat melaksanakan segala aktivitas yang mengandung dan menggambarkan kepatuhan kepada Allah semata-mata.

Badan Kemakmuran masjid pusat Depag menyatakan : sekarang masjid tidak hanya jadi pusat peribadatan dalam arti sempit, melainkan juga telah menjadi pusat-pusat perekonomian, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan saat ini. Tentu saja langkah ini menggembirakan, karena di samping lebih memakmurkan masjid, juga dapat mengembangkan potensi peningkatan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan umat.³

Masjid sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas dalam penyampaian ajaran Islam, sehingga di sebut *Madrasah Nubnah*. Dari sanalah memancar cahaya petunjuk Rasulullah masa sahabat, dan tabi'in dan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman pun masjid adalah penghubung antara dunia dan akhirat dan sebagai pengikat antara aqidah yang bersih dengan kehidupan sosial manusia di dunia secara harmonis.

Kosim Norseha memberi motivasi agar umat Islam memperluas ruang lingkup masjid yakni menjadikan masjid sebagai sumber inspirasi menimba ilmu yang dapat memakmurkan umat yang kokoh iman dan taqwanya serta berbudi pekerti luhur di samping melaksanakan ibadah-ibadah *khashshah*.

Agar ruang lingkup masjid senantiasa berkembang maka perlu diperhatikan beberapa prinsip yakni:

² Amiur Nuruddin, *Fungsi dan Peranan Masjid dalam Tinjauan Syari'ah*, (Medan: MUI SUMUT, 1998), h. 1.

³ Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Fiqih Masjid*, (Jakarta: t.p, 2000), h. 40.

- a. Meninggikan derajat masjid, yakni dengan cara membesarkannya, menyempurnakannya, menghormatinya dan mensucikannya sebagai masjid yang sempurna memiliki perlengkapan yang dibutuhkan sesuai perkembangan zaman. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam QS Jin: 18. *Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun dim dalamnya selain menyembah Allah.*
- b. Menghidupkan syiar Islam, sesungguhnya masjid adalah tempat menyebut nama Allah, membaca Al-Qur'an, dan azan padanya, menyeru pada mengingat Allah. Jangan sampai lalai habis waktu seluruhnya hanya demi mencari kehidupan dunia.
- c. Jadikan masjid-masjid, tempat memperbanyak ucapan tasbih kepada Allah Swt. pagi dan petang, ataupun I'tikaf sebagai syarat mencari ketenangan, karena masjid adalah tempat yang aman dan tenang sesuai dengan tempat menunaikan shalat dengan khusus.⁴

Pada masa Rasulullah, sebagai pemimpin masjid berperan tidak hanya difungsikan dalam aspek ibadah murni (shalat), tetapi juga untuk kepentingan mu'amalah. Diantara aktivitas yang diperankan masjid di masa Rasulullah adalah sebagai tempat:

1. Ibadah.
2. Komunikasi.
3. Pendidikan
4. Santunan sosial.
5. Latihan dan persiapan militer
6. Pengobatan dan perawatan kesehatan.
7. Perdamaian dan pengadilan.
8. Rumah penampungan musafir.
9. Tawanan perang.
10. Pusat penerangan dan pembelaan Negara.⁵

Karena itu, masjid dapat difungsikan sebagai pada bidang ibadah maupun bidang muamalah. Jika mencermati sejarah, ternyata kegiatan pertama yang dilakukan Nabi sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa masjid merupakan tonggak pertama dan utama pembangunan masyarakat madani (*civil*

⁴Anwar Saleh Daulay, *Masjid Paripurna dan Urgensnya dan Urgensi Pembangunannya*, (Medan: Dewan Masjid Indonesia SUMUT, Pusat Kajian taswuf, Istiqamah Mulya Foundation, 2005), h. 3-4. Disampaikan dalam seminar Nasional: Masjid dan Pembangunan di Bina Graha Pemprop SU tanggal 09 Pebruari 2005.

⁵ Amiur Nuruddin, *Fungsi dan Peranan Masjid*.h. 2.

society) yang ingin dikembangkan oleh Nabi. Masjid, selain sebagai tempat ibadah, ternyata oleh Nabi juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Selain untuk shalat, masjid juga digunakan sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin, kaum muhajirin dan anshar, dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat. Masjid pada masa Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan.⁶

Di era modern peranan masjid semakin signifikan, terlebih dalam pembinaan mental umat. Umar Chapra menyatakan bahwa fakta kemerosotan iman ditandai dengan meluasnya sekularisme, paham sekularisme. Paham sekularisme adalah suatu paham yang mencoba menggeser kedudukan agama sebagai kekuatan kolektif dalam masyarakat, mereka menempatkan kemampuan akal untuk menemukan kebenaran. Sekularisme tidak selalu mengingkari eksistensi Tuhan, tetapi ia menganggap eksistensi-Nya tidak lagi membawa bobot apapun bagi kehidupan manusia. Jadinya pandangan dunia lah yang dominan, kebahagiaan dipercayai tidak lagi perlu melalui agama tapi melalui materi. Paham ini jelas mempertipis iman umat di manapun ia berada.⁷

Karena itu perlu adanya kajian yang intensif tentang bagaimana eksistensi kerajaan serdang bedagai dan masjid dari masa ke masa untuk memberikan kontribusi yang jelas bagi perkembangan agama Islam. Karena itu pula maka, penulis ingin melakukan penelitian tentang Pranan Kerajaan Serdang Bedagai dalam mengembangkan Agama Islam, Kerajaan Sulaimaniyah Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tidak bisa dipisahkan dengan Mesjid karena Mesjid itu adalah pusat pengembangan Islam. satu kajian historis yang signifikan, mengingat Masjid Raya Sulaimaniah merupakan salah

⁶ Mohd Adnan Harahap, *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Jamaah*, (Medan: Dewan Masjid Indonesia Sumut, Pusat Kajian Taswuf, Istiqamah Mulya Foundation, 2005), h. 3. Disampaikan dalam seminar Nasional: Masjid dan Pembangunan di Bina Graha Pemprop SU tanggal 09 Pebruari 2005.

⁷ M.Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, Terj. M. Suryono, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 13.

satu warisan peradaban Islam klasik yang pernah ada pada masa Kerajaan Serdang, tepatnya pada masa Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1879-1946).

Secara sosial keagamaan Masjid ini menjadi simbol akan eksistensi kesultanan serdang, mengingat istana kesultanan yang telah tidak ada dikarenakan pertimbangan perjuangan melawan penjajah pada saat revolusi kemerdekaan melawan penjajah saat itu. Sehingga keberadaan masjid menjadi sebuah kekuatan historis yang telah menarik banyak jama'ah untuk berkunjung dan beribadah di dalamnya.

Disamping sebagai rumah ibadah, masjid ini telah berperan sebagai sarana komunikasi dan penyiaran dakwah islamiah, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat pencerahan pemikiran umat lewat berbagai kajian yang dihadirkan didalamnya. Pemikiran keislaman serta tradisi keagamaan yang berkembang di masjid ini adalah pemahaman yang juga populer di masyarakat sekitar secara umum yakni bermazhab Syafi'i. Nuansa kerajaan yang tradisional dan semangat modernitas yang terjadi di masyarakat bersatu dalam pengelolaan pengembangan masjid ini.

Disatu sisi masjid ini merupakan warisan dari kesultanan Serdang tetapi di sisi lain masyarakat juga menjadikan masjid ini sebagai tempat dan wadah bersama dalam mendiskusikan berbagai proyek peradaban kemanusiaan dan keislaman. Karena itu masjid ini secara struktural bersifat eksklusif, namun secara kultural bersifat terbuka. Ini membuktikan bahwa keberadaan masjid Raya Sulaimanilah ini menjadi sarana yang urgen untuk mempertemukan kelompok modernitas Islam dan Tradisionalitas Islam khususnya di sekitar masyarakat tempat masjid ini berada. Namun pada dekade belakang ini eksistensi masjid Raya Sulaymaniyah terjadi pergeseran peran sosial, dari "rumah moral" umat yang mengairi dan menginspirasi umat dalam memanusiaikan masyarakat kepada peran yang berada pada wilayah kultural bahkan sebagai salah satu warisan klasik yang lebih menarik daya pariwisata daerah semata. Hingga keberadaannya terkadang banyak menjadi momentum adat tatkala ada kegiatan yang membutuhkan simbol adat dan budaya lokal atau terkadang menjadi "rumah singgah" bagi para

penziarah daerah wisata sembari melaksanakan ibadah shalat. Padahal dengan simbol budaya yang kental pada mesjid ini diharapkan menjadi perekat tersendiri kepada masyarakat tatkala tarikan budaya modernitas menghipnotis umat untuk mengurangi spirit religiusitas masyarakat. Kondisi ini semakin dikukuhkan secara sosial, karena Kota Perbaungan sebagai tempat keberadaan mesjid, bergerak menjadi masyarkat urban/perkotaan yang lebih banyak tertarik kepada aktivitas bisnis dan ekonomi. Hingga pada dekade belakangan ini, mesjid hanya menjalankan tugas miinimalnya yaitu sebagai rumah ibadah semata.

Bila dilihat dari aspek historis bahwa pendirian mesjid Raya Sulaimaniyah merupakan salah satu pusat pengembangan agama Islam yang dibangun oleh Raja Sulaiman selaku Raja kerajaan serdang saat itu.

B. Perumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok kajian ini yaitu: Bagaimanakah peran Kerajaan Serdang Bedagai dalam Pengembangan Agama Islam di wilayah Serdang Bedagai dan Sejarah berdirinya Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Dari masalah pokok di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kerajaan Serdang Bedagai dalam Mengembangkan agama Islam di Perbaungan. Dalam pendekatan segi seni budaya. Hukum dan politik dan pendidikan
2. bagaimana fungsi Masjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan dalam pengembangan peradaban Islam.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji apakah peranan kerajaan serdang bedagai dalam mengembangkan agama Islam di daerah tersebut, dan apakah fungsi mesjid dalam mengembangkan agama islam. Penelitian ini dilaksanakan di Serdang Bedagai perbaungan sumatera utara. Dipilihnya lokasi ini karena memang disini tempat berdirinya kerajaan serdang bedagai.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Peranan Kerajaan Serdang Bedagai dan Fungsi Masjid Raya Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan Agama Islam. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses masuk dan perkembangan dan Islam di kerajaan Serdang Bedagai dan khususnya daerah Perbaungan Sumatera Utara
2. Bukti-Bukti peninggalan Kerajaan Serdang Bedagai dalam mengembangkan Islam di daerah Perbaungan dan sekitarnya

E. Kerangka Teori

Kerajaan Serdang Bedagai adalah salah satu kerajaan melayu yang bernuansa keislaman hal ini bisa dilihat dengan keberadaan istana dan mesjid yang dibangun oleh sultan serdang bedagai dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang mencakup aqidah dan syari'ah, telah meletakkan dasar-dasar aturan dan pedoman kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan (*al-hasanah*) di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sasaran (*al-ghayah*) akhir dari syari'ah adalah kemaslahatan umat (*al-maslahah*). Upaya apa saja yang dilakukan untuk kemaslahatan itu pada hakikatnya adalah sejalan dengan syari'ah Allah (*inna ghayah al-syari'ah al-maslahah, wa ainama tujad al-maslahah fa tsamma syar' Allah*).

Di antara syari'at yang telah digariskan dalam Al-Qur'an adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan masjid terulang sebanyak 28 kali yang menurut bahasa berakar dari kata *sajada*, sujud, dan berhati patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Masjid adalah bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dalam arti tempat sujud Bentuk lahiriah dalam shalat, yang antara lain ditandai meletakkan dahi, kedua belah telapak tangan, lutut dan

kaki ke bumi adalah manifestasi dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sujud dalam arti syari'ah ini pada hakikatnya adalah fungsi minimal dari masjid.⁸

Kalau masjid dihubungkan dengan makna yang terkandung pada akar katanya, maka fungsi masjid adalah tempat melaksanakan segala aktivitas yang mengandung dan menggambarkan kepatuhan kepada Allah semata-mata.

Badan Kemakmuran masjid pusat Depok menyatakan : sekarang masjid tidak hanya jadi pusat peribadatan dalam arti sempit, melainkan juga telah menjadi pusat-pusat perekonomian, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan saat ini. Tentu saja langkah ini menggembirakan, karena di samping lebih memakmurkan masjid, juga dapat mengembangkan potensi peningkatan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan umat.⁹

Masjid sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas dalam penyampaian ajaran Islam, sehingga di sebut *Madrasah Nubuah*. Dari sanalah memancar cahaya petunjuk Rasulullah masa sahabat, dan tabi'in dan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman pun masjid adalah penghubung antara dunia dan akhirat dan sebagai pengikat antara aqidah yang bersih dengan kehidupan sosial manusia di dunia secara harmonis. Dari uraian tersebut maka terlihat betapa besarnya peranan kerjaan dalam mengembangkan agama Islam dan masjid salah satunya tempat pengembangan agama Islam dengan lewat dakwah.

F. Kajian-kajian terdahulu

Beberapa kajian tentang kerajaan melayu pernah ditulis akan tetapi kerajaan Maimun atau lebih dikenal dengan Istana Maimun. Dari sekian pembahasan tersebut, belum ditemukan akan adanya sebuah penelitian khusus yang membahas tentang bagaimana Peranan Kerajaan Serdang Bedagai dalam mengembangkan Agama islam serta apa fungsi Masjid dalam pengembangan Agama Islam.

⁸ Amiur Nuruddin, *Fungsi dan Peranan Masjid dalam Tinjauan Syari'ah*, (Medan: MUI Sumut, 1998), h. 1.

⁹ Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Fiqih Masjid*, (Jakarta: t.p, 2000), h. 40.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menghasilkan data-data dalam hal melihat keberadaan kerajaan Serdang Bedagai dalam mengembangkan agama Islam.

1. Tehnik pengumpulan data.

Jenis data yang diperoleh melalui dokumen dokumen atau literatur tentang kerajaan yang ada dan mewawancarai pihak kerajaan atau keturunan kerajaan dan wawancara dengan para pemuka masyarakat khususnya yang mengetahui sejarah Kerajaan Serdang Bedagai.

2. Analisis Data.

Untuk menganalisis data tentang peranan Kerajaan Serdang Bedagai dalam mengembangkan agama Islam, maka peneliti ingin menggunakan kajian literatur dan diuraikan dalam format deskripsi verbal dan penjelasan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Setting Sosial Kerajaan Serdang

Riwayat Kesultanan Serdang memiliki perjalanan yang rumit dan penuh gejolak. Latar belakang berdirinya kesultanan yang terletak di Sumatera Timur ini tidak terlepas dari kejayaan Kesultanan Aceh. Sejarah Kesultanan Serdang sebenarnya diawali dengan munculnya Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Dia merupakan sosok pemberani yang terkenal sebagai Panglima Besar Tentara dan Panglima Armada Aceh. Mengusung panji-panji kebesaran Kesultanan Aceh di bawah naungan Sultan Iskandar Muda, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan memimpin operasi penaklukan dan berhasil menundukkan negeri-negeri di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatra, hingga Johor serta Pahang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang itu tidak lain adalah Laksamana Malem Dagang yang memimpin armada Aceh melawan Portugis (1629) dan yang menaklukkan Pahang (1617), Kedah (1620), Nias (1624), dan lain-lainnya.¹⁰

Berkat jasa dan pengabdian terhadap Kesultanan Aceh, pada 1632 Sultan Iskandar Muda berkenan memberikan penghargaan dengan melantik Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai wakil Sultan Aceh atau Wali Negeri untuk memimpin wilayah Haru atau yang kemudian dikenal sebagai wilayah Sumatera Timur.¹¹ Haru sebenarnya merupakan sebuah kerajaan mandiri yang berhasil ditaklukkan Kesultanan Aceh di bawah komando Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Sosok inilah yang menjadi kakek moyang raja-raja di Haru atau yang kelak bersulih nama menjadi wilayah Deli dan Serdang. Nama Haru sendiri muncul pertama kali dalam catatan pengelana dari Tiongkok yang singgah di Sumatra pada sekitar abad ke-13. Dalam catatan itu disebutkan, Haru mengirimkan misi ke Tiongkok dalam tahun 1282 Masehi ketika tanah Tiongkok

¹⁰ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang), h. 4.

¹¹ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2003, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang* (Medan: Yandira Agung), h. 2.

dikuasai imperium Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Selain itu, nama Haru juga tercantum dalam kronik Pararaton ketika membahas fragmen tentang Ekspedisi Pamalayu, yakni upaya Majapahit untuk menaklukkan negeri Melayu yang dimulai pada abad ke-13. Haru tercatat sebagai salah satu dari negeri-negeri utama di Sumatra di samping Lamuri, Samudera, Barlak (Perlak), dan Dalmyan (Temiang). Negarakertagama karangan Mpu Prapanca yang legendaris itu juga menyinggung soal keberadaan Haru dengan menyebutkan, di samping Pane, Majapahit berhasil pula menguasai Kompai dan Haru.

Data tentang keberadaan Kerajaan Haru masih berlanjut ketika seorang pejalan yang juga berasal dari Tiongkok, Fei Sin, menulis bahwa dalam tahun 1436 M, Haru terletak di depan Pulau Sembilan. Manakala angin baik, tulis Fei Sin, kapal layar bisa sampai ke Haru dari Malaka dalam waktu 3 hari 3 malam. Keterangan Fei Sin ini didukung oleh catatan dari Dinasti Ming yang mengisahkan bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Yung Lo, penguasa ke-3 Dinasti Ming yang memerintah sejak 1402, Sultan Husin dari Haru mengirimkan misinya ke Tiongkok. Sebaliknya, dalam tahun 1412, Kaisar Yung Lo mengutus Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi negeri-negeri di Nusantara, termasuk Haru. Hubungan kekerabatan antara Kerajaan Haru dan Kekaisaran Tiongkok semakin harmonis karena Tuanku Alamsyah, pengganti Sultan Husin, juga mengirimkan misinya ke Tiongkok, berturut-turut dalam tahun-tahun 1419, 1421, dan 1423 Masehi.¹²

Pada masa-masa berikutnya, Kerajaan Haru bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Aceh yang muncul sebagai kekuatan baru di sekitar Selat Malaka. Berkali-kali Haru melancarkan gerakan penentangan terhadap dominasi Aceh hingga kerajaan ini berhasil ditaklukkan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memunculkan nama Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai panglima perang yang paling berhasil pada masa itu. Oleh penguasa Kesultanan Aceh, pada 1632 wilayah Haru diberikan kepada Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan selaku wakil Sultan Aceh.

¹² Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, h. 5.

Dari sinilah riwayat Kerajaan Deli dan Kerajaan Serdang dimulai. Pendudukan atas bekas wilayah Kerajaan Haru ini diberikan oleh Kesultanan Aceh dengan misi:

1. Menghancurkan sisa-sisa perlawanan Kerajaan Haru (yang dibantu oleh Portugis).
2. Mengembangkan misi Islam ke wilayah pedalaman.
3. Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari Imperium Aceh.¹³

Pada 1632 M, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan menikah dengan Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, adik dari penguasa Kerajaan Sunggal, Datuk Imam Surbakti. Kerajaan Sunggal merupakan salah satu pemerintahan kecil yang terdapat di wilayah Urung asal Karo di Deli. Pengakuan dari kerajaan-kerajaan kecil di regional itu yang diberikan kepada Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan membuat pemerintahan Deli di bawah naungan Aceh semakin mantap. Setelah Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan meninggal dunia pada 1641 M, kekuasaan atas wilayah Deli diberikan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700 M) yang kemudian bergelar sebagai Panglima Deli.

Ketika kebesaran Kesultanan Aceh mulai melemah, di mana Sultan Iskandar Muda mangkat dan pemerintahan Aceh dipegang oleh raja-raja perempuan, pada 1669 M Panglima Perunggit memproklamkan kemerdekaan Deli atas penguasaan Aceh. Sebagai legitimasi, Deli di bawah komando Panglima Perunggit menjalin hubungan dengan Belanda di Malaka. Tuanku Panglima Perunggit atau Panglima Deli meninggal dunia pada 1700 M. Pengganti Tuanku Panglima Perunggit sebagai penguasa Deli adalah sang putra mahkota, Tuanku Panglima Paderap yang memerintah hingga tahun 1720 M. Sepeninggal Tuanku Panglima Paderap, Deli mulai dilanda perpecahan. Selain karena mulai berpengaruhnya Kerajaan Siak di wilayah Sumatra Timur, ancaman yang mengguncang Deli juga disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap. Meski terdapat beberapa versi, ada

¹³ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan: tanpa penerbit), h. 49.

sejumlah kalangan yang meyakini bahwa anak Tuanku Panglima Paderap berjumlah empat orang, yaitu:

1. Tuanku Jalaludin Gelar Kejeruan Metar, berasal dari turunan bangsawan Mabar, Percut, dan Tg. Mulia.
2. Tuanku Panglima Pasutan, berasal dari turunan bangsawan Deli dan Bedagai.
3. Kejeruan Santun, berasal dari turunan bangsawan Denao dan Serbajadi.
4. Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan, berasal dari turunan bangsawan Serdang dan Sei Tuan (Basarshah II, tanpa tahun: 52).

Perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan Deli itu terjadi pada sekitar tahun 1723. Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan yang merasa paling berhak atas tahta Deli, karena merupakan anak yang berasal dari permaisuri, tidak berhasil memperoleh haknya. Dalam pertempuran melawan kakak keduanya, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan menelan kekalahan dan bersama ibundanya, Tuanku Puan Sampali yang tidak lain adalah permaisuri Tuanku Panglima Paderap, terpaksa menyingkir dan mengungsi hingga kemudian mendirikan Kampung Besar (Serdang). Atas kemenangan yang diperoleh dari adiknya itu maka Kesultanan Deli dikuasai oleh Tuanku Panglima Pasutan.

Dalam catatan Tengku Luckman Sinar Basarshah II, yang mengemban mandat sebagai Sultan Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang atau Sultan Serdang ke VIII, disebutkan bahwa menurut adat Melayu yang benar, yang berhak menggantikan Tuanku Panglima Paderap sebagai pemimpin Kerajaan Deli adalah Tuanku Umar Johan selaku putra dari permaisuri. Namun, Tuanku Umar Johan disingkirkan oleh kakaknya karena masih di bawah umur. Atas perlakuan terhadap Tuanku Umar Johan tersebut maka dua orang besar di Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah serta bersama dengan seorang Raja Urung Batak Timur yang menghuni wilayah Serdang bagian Hulu di Tanjong Merawa dan juga seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), merajakan

Tuanku Umar Johan selaku Raja Serdang yang pertama diangkat yaitu pada 1723 M (Basarshah II, tanpa tahun: 55).

Sultan Serdang pertama, Tuanku Umar Johan, memiliki tiga orang putra, yakni Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamsyah, dan Tuanku Sabjana atau yang sering dikenal sebagai Pangeran Kampung Kelambir. Oleh karena Tuanku Malim menolak dilantik menjadi raja sebagai pengganti ayahnya, maka yang kemudian didaulat untuk menduduki tahta Kesultanan Serdang setelah Tuanku Umar Johan mangkat adalah Tuanku Ainan Johan Alamsyah (1767-1817). Sultan Ainan Johan Alamsyah beristrikan Tuanku Puan Sri Alam dari Kerajaan Perbaungan yang kemudian bergabung dengan Kesultanan Serdang. Sebelumnya, salah seorang keturunan Panglima Paderap (Raja Deli terakhir) yang lain, yaitu Tuanku Tawar (Arifin) Gelar Kejuruan Santun, yang membuka negeri di Denai dan meluas sampai ke Serbajadi, sudah menggabungkan diri dengan Kesultanan Serdang di masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama.

Putra pertama Sultan Ainan Johan Alamsyah, Tuanku Zainal Abidin, terbunuh ketika berperang di Langkat. Maka dari itu, ditunjuklah Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah, putra kedua dari Sultan Ainan Johan Alamsyah, sebagai penerus tahta Kesultanan Serdang. Sultan Thaf Sinar Baharshah yang kemudian dianugerahi nama kebesaran sebagai Sultan Besar Serdang memerintah selama periode 1817-1850 M. Pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah ini Kesultanan Serdang mengalami era jaya dengan menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa karena perdagangannya. Nama Kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal negeri-negeri lain sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan-kerajaan lain, seperti Padang, Bedagai, dan Senembah, yang meminta bantuan militer dari Kesultanan Serdang.

Sebagai pengganti dari Sultan Thaf Sinar Baharshah adalah putranya yang tertua, yaitu Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819-1880). Kepemimpinan Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah mendapat legitimasi dari Sultan Aceh, Ibrahim Mansyur Syah, berupa pengakuan Mahor Cap Sembilan. Ketika pada 1854 Aceh mengirim ekspedisi perang sebanyak 200 perahu perang untuk

menghukum Deli dan Langkat, Serdang berdiri di pihak Aceh. Dalam menjalankan pemerintahannya Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah didampingi oleh orang-orang besar, wazir, serta raja-raja taklukkan. Zaman pemerintahan Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah memang diwarnai banyak peperangan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Selain berkonflik dengan Deli dalam persoalan perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi gangguan dari penjajah Belanda yang datang ke Serdang pada 1862. Namun, hegemoni Belanda yang terlalu kuat menyebabkan Serdang kemudian harus takluk dan mendapat pengakuan dari Belanda seperti yang tercantum dalam *Acte van Erkenning* tertanggal 16 Agustus 1862 (Basarshah II, tanpa tahun:64).

Ketika Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah wafat pada 7 Muharram 1279 Hijriah atau pada bulan Desember 1880, sang putra mahkota, Sulaiman Syariful Alamsyah, masih sangat muda sehingga roda pemerintahan Kesultanan Serdang untuk sementara diserahkan kepada Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Syariful Alamsyah) sebagai wali sampai Sulaiman Syariful Alamsyah siap untuk memimpin pemerintahan. Pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda atas penobatan raja baru di Serdang ini baru diberikan melalui *Acte van Verband* tanggal 29 Januari 1887. Pada era kepemimpinan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah ini, pertikaian Serdang dengan Deli semakin memanas kendati beberapa solusi telah dilakukan untuk meminimalisir konflik, termasuk melalui hubungan perkawinan dan kekerabatan. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah berlangsung cukup lama yakni dari era masa ketika kolonialisme Belanda berkuasa (1866) hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia (1946). Tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, pada Desember 1945 Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menyatakan dukungan terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

Selanjutnya, tahun 1946 wilayah Sumatra Timur, termasuk Serdang, dilanda situasi yang mencekam. Pada 3 Maret 1946, terjadi peristiwa menggegerkan yang dikenal sebagai “Revolusi Sosial” di mana terjadi

penangkapan terhadap raja-raja yang ada di Tanah Karo oleh orang-orang komunis. Raja-raja dan kaum bangsawan itu oleh kaum kiri dianggap sebagai pengkhianat karena dulu mengabdikan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menurut buku *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang* (2003) yang ditulis oleh Pemangku Adat Kesultanan Serdang Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, penangkapan terhadap raja-raja di Sumatra Timur itu, seperti yang terjadi di Simalungun di mana raja-raja ditangkap, beberapa orang di antaranya dibunuh, dan istana mereka dijarah. Di Langkat, Sultan ditahan dan beberapa bangsawan tewas, termasuk sastrawan Tengku Amir Hamzah. Sementara di Asahan, Sultan Saibun berhasil meloloskan diri dan berlindung di markas tentara Jepang yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Tentara Republik Indonesia (TRI) di Siantar. Demikian juga di wilayah Batubara dan Labuhan Batu, raja-raja dibunuh, termasuk para bangsawan utama, dan harta benda mereka dirampok (Basarshah II, 2003:63).

Masih menurut catatan Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, di Serdang keadaan sedikit berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Berkat adanya dukungan yang positif dari Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah terhadap kaum pergerakan dan perasaan anti Belanda yang telah dikenal umum sejak zaman kolonial Belanda serta sokongan penuh Kesultanan Serdang atas berdirinya negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, maka tidak terjadi aksi penangkapan, pembunuhan, atau penjarahan di Serdang. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah tidak menyandarkan diri kepada pasukan Sekutu karena banyak kerabat dan para bangsawan Serdang yang dianjurkan menempati posisi di dalam struktur angkatan bersenjata Republik, partai-partai politik yang berhaluan Islam dan nasionalis. Oleh karena itu, ketika terjadi “Revolusi Sosial” 3 Maret 1946, diadakanlah suatu perundingan antara Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalion III TNI di Medan) dengan Tengku Mahkota Serdang dan para tokoh adat Kesultanan Serdang. Dari perundingan itu kemudian diambil keputusan bahwa Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada TNI yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah Republik Indonesia (Basarshah II, 2003:64).

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, maka keesokan harinya, yakni tanggal 4 Maret 1946, diutuslah Jaksa Tengku Mahmuddin dan Panitera Tengku Dhaifah atas nama Kesultanan Serdang untuk secara resmi menyerahkan administrasi pemerintahan kepada pihak TNI atas nama pemerintah Republik Indonesia yang dipersatukan oleh Komite Nasional Indonesia wilayah Serdang dan sejumlah wakil organisasi masyarakat serta organisasi politik lainnya di kantor Kerapatan di Perbaungan. Timbang terima yang mulai berjalan pada 4 Maret 1946 ke segenap pelosok wilayah Serdang itu agaknya merupakan sebuah peristiwa unik yang berlaku untuk pertamakalinya di Indonesia. Sejak saat inilah Kesultanan Serdang meleburkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud komitmennya terhadap kemerdekaan dan berdirinya negara Indonesia yang berdaulat.

Pada 13 Oktober 1946, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dikebumikan dengan upacara militer di makam raja-raja di sebelah masjid raya di Perbaungan yang masih termasuk di dalam wilayah administratif Serdang. Sebagai pemegang tahta Serdang ke VI sepeninggal Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah adalah Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar. Namun, dikarenakan oleh situasi politik dan keamanan di Serdang dan umumnya di Sumatra Timur yang belum stabil, maka penabalan mahkota kesultanan kepada Tuanku Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar hanya sebagai kepala adat. Di samping itu, Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar sendiri tidak bersedia dinobatkan sebagai Sultan Serdang karena merasa masih trauma dengan serentetan kejadian tragis atau “Revolusi Sosial” yang terjadi di tahun 1946 itu. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar wafat di Medan pada 28 Desember 1960 dan dimakamkan di Perbaungan.

Setelah mangkatnya Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar, masyarakat adat Serdang tidak lagi mempunyai kepala adat selama masa-masa selanjutnya dan posisi ini mengalami kevakuman selama lebih kurang 35 tahun. Hingga akhirnya, pada 30 November 1996, Kerapatan Adat Negeri Serdang mengadakan sidang serta memutuskan bahwa Pemangku Adat Serdang dipilih dan ditetapkan dari

putra-putra almarhum Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah yang masih hidup. Dari sidang-sidang tersebut kemudian diputuskan Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj, putra ketiga Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dan pemegang mahkota Kesultanan Negeri Serdang yang ke VII sebagai Pemangku Adat Negeri Serdang dan Ketua Kerapatan Adat Negeri Serdang. Penabalannya dilakukan dalam upacara adat di Gedong Juang 45 di Perbaungan pada 5 Januari 1997.

Namun, kebangkitan Kesultanan Serdang ini tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Institusi kesultanan semata-mata dilihat dari perspektif politik. Keberadaan Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Oleh karena itu, aktivitas kesultanan dibatasi hanya sebagai institusi istiadat saja. Dalam penyelenggaraan istiadat pun “diarahkan” tidak menjadi perenggang masyarakat dengan akar budayanya, apalagi unsur budaya yang berhubungan dengan tradisi kesultanan, khususnya tradisi kesultanan yang terdapat di Sumatra Timur (Basarshah II, 2003:71). Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj mangkat pada 28 Januari 2001 karena sakit dan dikebumikan di Makam Raja Diraja di samping Masjid Raya Perbaungan.

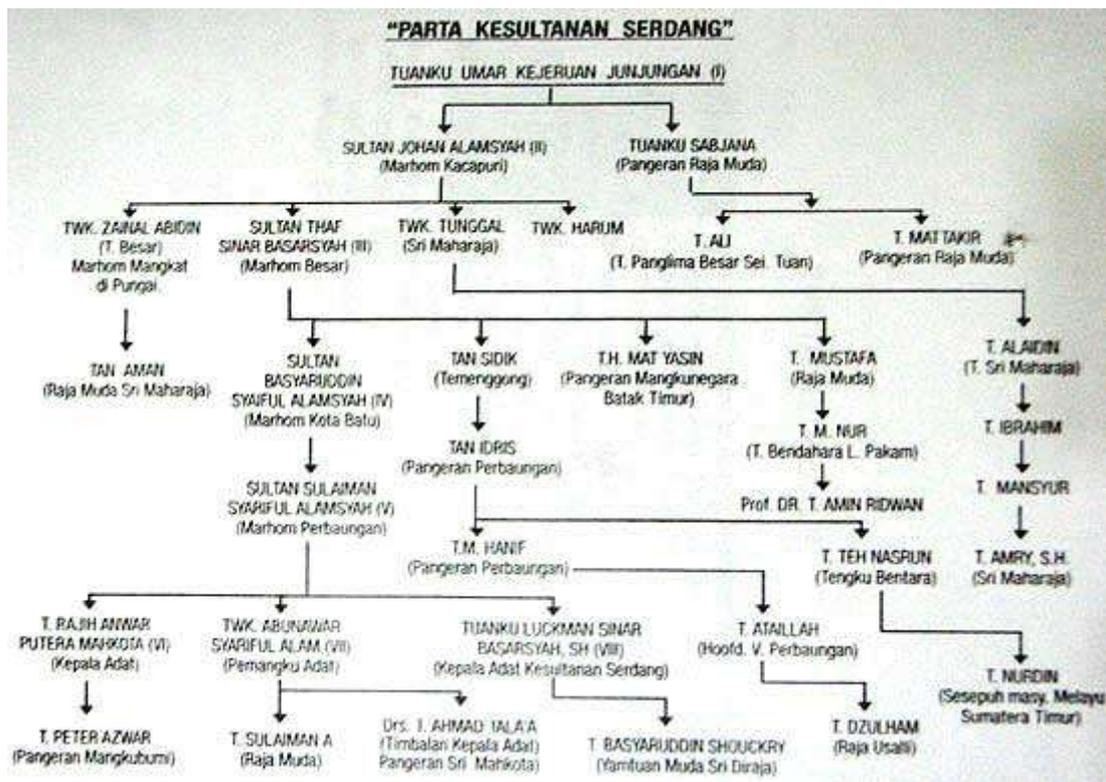
Sebagai penerus keberadaan Kesultanan Serdang setelah Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj wafat adalah Tuanku Luckman Sinar Baharshah II. Sebelum jenazah Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj diberangkatkan pada tengah malam tanggal 28 Januari 2001, sesuai dengan Adat Melayu “Raja Mangkat Raja Menanam”, dimusyawarahkanlah mengenai pengganti Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj dan anggota sidang dengan suara bulat menyepakati bahwa Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (waktu itu bergelar Temenggong Mangkunegara Serdang) sebagai Pemangku Adat Serdang berikutnya. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke VIII digelar pada 12 Juni 2002 di Perbaungan dan dihadiri 6.000 orang utusan dari seluruh Serdang dan 2.000 orang undangan dari kalangan pemerintah serta empat negara. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II yang memegang tahta adat Kesultanan Negeri

Serdang hingga sekarang menjadi penegas bahwa Kesultanan Serdang masih eksis sampai hari ini.

Silsilah Raja Kesultanan Serdang

Berikut nama-nama sultan yang pernah memimpin pemerintahan Kesultanan Serdang:

1. Sultan Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan (1723–1767).
2. Sultan Ainan Johan Alamsyah (1767–1817).
3. Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817–1850).
4. Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819–1880).
5. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1866–1946) . - Selama tahun 1880 – 1866, pemerintahan Kesultanan Serdang dipegang oleh Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Syariful Alamsyah) sebagai wali karena Sulaiman Syariful Alamsyah masih sangat belia.
6. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar (1946–1960).
7. Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj (1997–2001).
8. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (2001–2012) dinobatkan pada 2002.



*Silsilah Kesultanan Serdang.
(Sumber: Koleksi Tuanku Luckman Sinar Baharshah II)*

Wilayah Kekuasaan

Sejak awal berdirinya hingga sekarang, wilayah Kesultanan Serdang beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-politik yang terjadi. Kesultanan Serdang sendiri, pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dimasukkan ke dalam Residensi Sumatra Timur, bersama sejumlah kerajaan lainnya antara lain Kerajaan Asahan, Kerajaan Deli, Kerajaan Kualuh dan Leidong, Kerajaan Langkat, Kerajaan Pelalawan, serta Kerajaan Siak Sri Inderapura (Basarshah II, 2006:1). Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan tahun 1949, secara administratif, Kesultanan Serdang yang semula termasuk ke dalam wilayah Sumatra Timur, sejak tahun 1950 dilebur menjadi Provinsi Sumatra Utara hingga kini.

Ditinjau dari perjalanan sejarahnya, perubahan luas wilayah Kesultanan Serdang dari zaman ke zaman diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya

dengan jalan penaklukan, kekerabatan (ikatan perkawinan), atau penggabungan wilayah oleh kerajaan-kerajaan kecil ke wilayah Kesultanan Serdang. Berdasarkan data yang ditemukan dari beberapa catatan karya Tuanku Luckman Sinar Baharshah II, daerah-daerah yang pernah dan masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Serdang (dikumpulkan dari beberapa sumber), antara lain: Percut, Perbaungan, Sungai Ular, Sungai Serdang, Padang, Bedagai, Sinembah, Batak Timur, Negeri Dolok, Batubara (Lima Laras), Serbajadi, Denai, Patumbak, Rantau Panjang, Bandar Labuhan, Lengo Seperang/Kwala Namu, Pantai Cermin, Pertumbuhan/Galang, Medan Senembah, Tambak Cikur, Rantau Panjang, hingga Lubuk Pakam (Basarshah II, 2003; Basarshah II, tanpa tahun).

Sistem Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama, yaitu Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan, pemerintahan Kesultanan Serdang masih dalam kondisi yang tidak menentu karena banyaknya konflik yang harus dihadapi. Baru pada era Sultan Serdang kedua, Sultan Ainan Johan Alamsyah (1767-1817), Kesultanan Serdang mulai menyusun konsep untuk mengatur tata pemerintahannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan dibentuknya Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu:

1. Pangeran Muda, berwilayah di Sungai Tuan.
2. Datok Maha Menteri, berwilayah di Araskabu.
3. Datok Paduka Raja, berwilayah di Batangkuis.
4. Sri Maharaja, berwilayah di Ramunia.

Sultan Ainan Johan Alamsyah memperkokoh legitimasi Lembaga Orang Besar Berempat itu berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan empat penjuru alam (barat, timur, utara, selatan) dan kokohnya kaki binatang serta asas Tungku Sejarangan (empat batu penyangga untuk memasak) yang merupakan asas sendi kekeluargaan tradisi masyarakat Melayu di Sumatra Timur. Terdapat empat sosok penentu di dalam upacara perkawinan maupun perhelatan-perhelatan besar lainnya. Selain itu, dalam menjalankan roda

pemerintahannya, Sultan Serdang dibantu oleh Syahbandar dan Temenggong sebagai kepala keamanan dan panglima besar. Pemerintahan Sultan Ainan Johan Alamsyah mencoba mengharmonisasikan antara Hukum Syariat Islam dengan Hukum Adat. Hal ini mengacu pada filosofi pepatah “Adat Melayu bersendikan Hukum Syara’ dan Hukum Syara’ bersendikan Kitabullah” (Basarshah II, tanpa tahun: 56). Pada masa ini juga diperketat aturan tentang adat-istiadat kerajaan, yaitu antara lain:

1. Adat Sebenar Adat

Adat ini menganut pemahaman sesuai berlakunya Hukum Alam, misalnya: api itu panas, air itu dingin, hidup-mati, siang-malam, lelaki-perempuan, dan lainnya.

2. Adat yang Diadakan

Adat ini muncul sebagai hasil dari konsensus permufakatan Orang Raja dan Para Orang Besar Kerajaan.

3. Adat yang Teradat

Adat ini lahir dari suatu kebiasaan yang kemudian diikuti secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat, sehingga menjadi resam hingga dijadikan sebagai Hukum Adat dan terdapat sanksi-sanksi adat jika hukum itu dilanggar.

4. Adat-Istiadat

Adat ini berupa seremonial yang dirujuk dari ketentuan yang belaku di istana raja. Adat ini bersifat dinamis, bisa berubah ketika terjadi pergantian raja.

Sementara pada era pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817–1850), Kesultanan Serdang mencapai masa keemasan dengan memperoleh kemajuan pesat, terutama di bidang perdagangan. Pada masa ini, penerapan Adat Melayu yang bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi. Yang menjadi hal utama adalah Budi yang Mulia (budi daya, budi bahasa, budi pekerti, dan lain-lain), sebab dengan ketinggian budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu bangsa. Dampak positif dari penerapan konsepsi budi ini salah satunya adalah rakyat Batak Hulu banyak yang masuk Islam. Dalam memegang pemerintahan umum,

Sultan Thaf Sinar Baharshah dibantu beberapa Orang Besar, seperti Pangeran Muda Sri Diraja Mattakir sebagai Raja Muda, Tuanku Ali Usman (gelar Panglima Besar Negeri Serdang) di Sungai Tuan (Kampung Klambir), Tuanku Tunggal (gelar Sri Maharaja) di Kampung Durian, dan Datuk Akhirullah gelar Pekerma Raja Tg. Morawa.

Pemimpin Serdang yang selanjutnya, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819–1880), mengalami masa-masa di mana eksistensi Kesultanan Serdang mulai terusik dengan kedatangan penjajah Belanda. Di dalam menghadapi pengaruh Belanda yang semakin kuat di Pantai Timur Sumatra, Serdang di bawah komando Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah tanpa tedeng aling-aling berdiri di belakang Aceh yang memang gencar melakukan perlawanan terhadap hegemoni penjajah. Atas dukungan tersebut, pada 1854 Sultan Aceh berkenan menganugerahi gelar kepada Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah sebagai “Wazir Sultan Aceh” dengan simbol kekuasaan yang disebut Mahor Cap Sembilan (Basarshah II, tanpa tahun:61). Seperti sultan-sultan sebelumnya, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah juga selalu didampingi Orang-orang Besar dan Wazir serta raja-raja dari wilayah yang berhasil ditaklukkan Serdang. Akan tetapi, karena konflik yang berkepanjangan berakibat dengan sering terjadinya pergantian Orang-orang Besar dan para Wazir serta raja-raja dari wilayah jajahan Serdang tersebut. Selain itu, di luar Dewan Kerajaan yang terdiri dari orang-orang Besar pilihan Sultan, terdapat lagi lembaga pemerintahan yang mengurus daerah-daerah yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang. Institusi ini dikenal dengan nama “Lembaga Orang Besar Berlapan” yang terdiri dari delapan orang pejabat yang ditunjuk Sultan Serdang untuk memimpin daerah-daerah di luar pusat kerajaan

Berikutnya adalah pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1866–1946) di mana Kesultanan Serdang melakukan beberapa tindakan strategis karena semakin kuatnya tekanan dari penjajah Belanda. Kebijakan penting yang dilakukan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah salah satunya adalah melakukan perlawanan menentang Belanda ketika pada 1891 Kontrolir Serdang sebagai wakil

dari pemerintah kolonial Hindia Belanda memindahkan ibukota Serdang dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam. Sebagai bentuk perlawanan, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menolak ikut pindah ke ibukota baru pilihan penjajah, dan sebaliknya justru membangun istana baru, yakni Istana Perbaungan (Kraton Kota Galuh), pada 1886 serta mendidikan Masjid Raya Sulaimaniah. Selain itu, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah juga membangun kedai, pasar ikan, dan kompleks pertokoan sehingga berdirilah sebuah kota kecil yang diberi nama Simpang Tiga Perbaungan. Kota inilah yang dijadikan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah sebagai tandingan ibukota Serdang versi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Perlawanan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah terhadap penetrasi Belanda masih berlanjut ketika pada 1898 menolak dengan dingin permintaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia agar menghadap Ratu Kerajaan Belanda. Tidak hanya itu, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah beserta rombongan bahkan memilih melawat ke Jepang dan Tiongkok pada tahun itu juga sebagai tindakan nyata bahwa Kesultanan Serdang memberikan perlawanan terhadap Belanda karena pada masa itu Jepang dan Tiongkok merupakan negeri di Asia yang maju dan berani menentang kekuatan militer dan penguasaan ekonomi oleh Barat. Dalam kunjungannya di Jepang, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dijamu secara pribadi oleh Tenno Heika Kaisar Meijimutshuhito (Basarshah II, 2003:35). Namun, lawatan ke Jepang itu dimanfaatkan Belanda untuk berbuat licik sebagai balasan atas “pembangkangan” yang dilakukan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dengan mempersempit batas wilayah Serdang. Kebijakan mempersempit wilayah Kesultanan Serdang oleh Belanda ini tak pelak menyebabkan perubahan dalam susunan para Orang Besar. Belanda menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk Raja Muda dan Wazir Paduka Setia Maharaja.

Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah berkuasa di Serdang hingga akhir hayatnya, yaitu di penghujung tahun 1946, di mana sebelumnya di tahun itu telah terjadi “Revolusi Sosial” sehingga Kesultanan Serdang memilih menggabungkan diri dengan Tentara Rakyat Indonesia sebagai wakil dari pemerintahan Republik

Indonesia yang telah diproklamirkan sebelumnya. Keputusan itu diambil atas dasar kemantapan hati untuk bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada era pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Kesultanan Serdang pada bulan Desember 1945 telah menyatakan dukungannya terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh.

Di masa-masa selanjutnya, pemerintahan adat Kesultanan Serdang nyaris tidak terlihat karena situasi politik yang sedang carut-marut, bahkan geliat Serdang sempat mati suri selama sekitar 35 tahun karena calon pengganti Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menolak ditabalkan sebagai Sultan Serdang dengan alasan masih trauma atas berbagai kejadian berdarah di tahun-tahun revolusi fisik itu. Setelah dihidupkan lagi pada 1997, Kesultanan Serdang tidak bisa mencapai kejayaan seperti dulu dikarenakan keterikatan dan situasi politik Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Aktivitas kesultanan tidak lagi berpengaruh banyak terhadap keberlangsungan dan kehidupan rakyat di Serdang, melainkan hanya sebatas institusi istiadat semata.

B. Peran Kesultanan Serdang dalam Kesejahteraan Rakyat

1. Kesejahteraan Dibidang Pendidikan Rakyat

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah didirikan Sekolah Melayu (3 tahun) sejak 1919 di setiap *Lubak* (Distrik) dimana rakyat Serdang dapat bersekolah secara cuma-cuma. Di wilayah Serdang Hulu (wilayah yang dihuni etnik Batak Timur dan Karo) dibuka juga Sekolah Pertanian dan *Ambachtschool* (Sekolah Pertukangan) dan untuk itu disediakan baginda tanah 1000 bahu dengan biaya Fl. 10.000.- Kemudian di Perbaungan didirikan pula sekolah lanjutan berbahasa Belanda "*Hollands-Inlandsche School*" (6 tahun) ditahun 1923 yang kepala sekolahnya orang Belanda dimana dipelajari juga Bahasa Belanda dan Inggeris dengan mata pelajaran setara Sekolah Menengah. Sejak 1920 Baginda mendorong putera dan puteri Bangsawan Serdang bersekolah. Pada masa itu dimana-mana puteri bangsawan masih "dipingit", tetapi di Serdang sudah ada

kebebasan wanita. Beberapa orang puteri T. Bendahara Serdang bahkan sekolah ke Betawi, salah seorang puterinya (Tengku Durat) tamat Sekolah Pendidikan Guru.

Putera dan puteri baginda juga diharuskan mengambil les (kursus) bahasa asing dan bermain alat musik barat. Putera-putera Orang Besar disekolahkan ke Batavia dan Bandung untuk mendapat pendidikan sekolah pemerintahan (MOSVIA) sehingga bisa kelak menggantikan kedudukan orang tua mereka dengan lebih baik lagi. Salah seorang Orang Besar Serdang, Tengku Pangeran Mohd. Hanif (Luhak Perbaungan) pernah mengecap pendidikan di “Penang Free School”. Tidak lupa akan tugas dari Kerajaan Melayu Serdang yang berlandaskan Hukum Syari’ah, bersendikan Al-Qur’an, maka baginda selaku khalifatullah fil’ardh juga mendirikan Lembaga Dakwah “Syairus Sulaiman” dipimpin oleh Ulama T. Fachruddin dan Syekh Zainuddin (bekas Mufti Serdang).

Pada tahun 1927 untuk membendung pengaruh ajaran non-Muslim dikeluarkan baginda peraturan agar di sekolah-sekolah yang ada di dalam Kerajaan Serdang diberikan pelajaran agama Islam dengan biaya Kerajaan.

2. Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi

Sultan Sulaiman Shariful Alamasyah membuka proyek persawahan untuk rakyat di wilayah Luhak Rantau Panjang dengan mengeluarkan biaya \$10.000.- pada tahun 1892, tetapi gagal karena wilayah itu selalu terendam air bah dari sungai Serdang bila musim hujan. Ketika mengadakan tour ke Bali baginda tertarik dengan sistem irigasi persawahan “*Subak*”. Pada tahun 1909 Baginda mendatangkan pekerja sawah yang berpengalaman dari Kalimantan (orang Banjar dibawah pimpinan Pengulu Adat Haji Mas Demang). Lalu dibukalah Proyek irigasi “Bendang di Perbaungan” seluas 2000 bahu dengan biaya \$1.200.000.- sebagai Konsultannya orang Jepang, Immada. Baginda hanya mengutip sewa yang cukup rendah untuk biaya administrasi irigasi dan pegawainya dari hasil prosentase padi yang dihasilkan. Proyek ini sangat berhasil dan terkenallah Serdang Lumbung Padi di Residensi Sumatera Timur disamping Siantar. Pada

tahun 1918 baginda membuka perkebunan karet “*N.V. Midden Serdang Landbouw Mij*” di Tg. Purba dimana administraturnya ialah Konsul Swiss di Medan dan asistennya orang Belanda dan Melayu.

Pada tahun 1933 Sultan Sulaiman juga tidak mau kalah menandingi investor Belanda dan asing, dan membuka perkebunan tembakau di “*Cinta Kasih*” (Kuala Bali) seluas 700 HA. Perusahaan itu pernah memproduksi cerutu dalam kotak yang diberi nama “Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah”. Untuk menunjang kegiatan perekonomian rakyat, baginda mendirikan di Bangun Purba “*Bank Batak*” (1916). Guna menunjang modal swasembada peternakan rakyat, Baginda melepaskan 400 ekor kerbau di hutan *Rencab* (Pantai Cermin) dan 80 ekor kerbau di hutan Pantai Labu. Baginda juga menciptakan Peraturan Jaluran Hak Rakyat Tanah Penunggu pada tahun 1922 sehingga dipakai oleh Belanda untuk Kerajaan Langkat, Deli dan lain-lain.

Agar 2000 HA tanah persawahan rakyat dapat terbebas dari banjir maka pada tanggal 8-6-1936 dengan uang sendiri baginda membuat Serdang Kanal sepanjang 7 km dimana Sei.Serdang diluruskan.

3. Kegiatan di Bidang Kesehatan Rakyat

Untuk menjaga kesehatan rakyat maka dipanggil baginda Dr. R.M. Sutomo (Pendiri “Budi Utomo”) untuk menjadi kepala dokter di Kerajaan Serdang (1911-1915). Di setiap Luhak (Distrik) didirikan Klinik Pengobatan rakyat secara cuma-cuma. Untuk penderita sakit kusta kerajaan membiayai rehabilitasinya di rumah sakit Lau Simomo dan Pulau Sicanang. Sejak 1923 telah berdiri hospital di Perbaungan, hospital besar di Tg. Morawa, hospital Sei. Buluh, hospital Pertumbuhan, hospital Tanah Abang dan hospital Bandar Negeri, serta Hospital di Tanah Raja dan Pelintahan. Di sekolah Melayu diajarkan penyuluhan mengenai penyakit endemik seperti malaria, puru, diarhee, influenza dan lain-lain.

4. Kegiatan dibidang Seni-Budaya

Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah sendiri adalah pemain biola yang cekatan dan memiliki sebuah biola merk “Stradivarius” (\$.1000) yang ditempah di

Italia. Dibentuk baginda Band Musik/Orkestra “SULTAN SERDANG” yang dipimpin oleh Tengku Muzier dan pemain-pemain musiknya semua putera Serdang. Baginda sangat mencintai seni budaya Melayu. Pada 2 hari raya Idul Fitri setiap tahun diadakan sayembara orkes/penari Zapin/Gambus dari setiap Luhak. Begitu juga untuk pemusik dan tarian joget Melayu. Pemenang tari akan merupakan Penari Istana pada setiap keramaian. Ketika pada akhir abad ke-19 baginda berkunjung ke Kedah dan Perlis, dan oleh Regent Kedah (Tengku Mahmud) dihadiahkan seperangkat teater tradisional Melayu MAKYONG lengkap dengan pemainnya. Begitu juga ketika ke Bali singgah di Kraton Yogyakarta, oleh Sultan Yogya diberi hadiah seperangkat Gamelan lengkap dengan pemainnya. Semuanya ini diberikan untuk menghibur rakyat pada hari-hari besar tertentu di daerah (Luhak-Luhak) secara cuma-cuma.

Juga baginda mendirikan Opera tradisional Melayu Bangsawan “Indian Ratu” dengan para pemain orang Melayu, Sri Langka, Portugis Goa, peranakan Eropa dan lain-lain bermain berkeliling di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Malaya. Setahun sekali group ini kembali ke Serdang dan diperintahkan bermain di Luhak (distrik-distrik) untuk rakyat agar menjadi media mensosialisasikan tata cara adat antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Berhubung peranannya begitu besar sebagai pengayom seni-budaya maka banyaklah orang asal Serdang yang menjadi seniman. Baginda menghiasi Istana Serdang di kraton Kota Galuh dengan ukiran seni pada istana yang 5 tingkat itu dikepalai oleh pegawai seorang Jepang bernama OHORI yang juga membuat Istana Permaisuri di sebelah belakang dengan ruang ala Jepang dan taman ala Jepang. Tuan Ohori juga memimpin kursus kerajinan tangan rumahtangga buat kaum puteri.

5. Pengembangan bidang Kegiatan Agama Islam

Setelah Tuan Shekh Haji Zainuddin berhenti sebagai Mufti Kerajaan Serdang (1928), maka Sultan Sulaiman membentuk suatu Dewan bernama “*Majelis Syar’i Kerajaan Serdang*”, dimana Sultan memindahkan kekuasaannya selaku Khalifatullah Fi’l Ardh (Kepala Agama Islam) kepada Majelis ini yang bersifat

kolegial (Dewan) dipimpin oleh Tengku Fachruddin dan setelah dia meninggal dunia 1937 baginda mau menggantikannya dengan seorang ulama dari Minangkabau, Haji Abd. Majid Abdullah (bekas ketua PERMI) tetapi dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda karena Tuan Haji itu terkenal anti-Belanda. Terpaksalah diambil Tengku H. Yafizham yang diperintah kembali dari studinya di Universitas Al-Azhar (Kairo) ditahun 1939. Karena baginda sangat concern melihat situasi perpecahan dikalangan umat Islam di Sumatera Timur antara Kaum Muda (Muhammadiyah) dengan Kaum Tua (Ahli sunnah wal jama'ah), maka baginda membuat muzakarah pertemuan dimana diundang tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Sumatera Timur untuk seminar di Istana Sultan Serdang pada tanggal 5-2-1928 dan hasilnya dituangkan didalam sebuah buku. Baginda juga giat membantu perkembangan Al Jamiatul Washliyah sebagai perguruan modern Islam dimana salah seorang pendirinya, Tuan H. Abd. Rahman Syihab (Melayu Galang) lulusan dari "Syairus Sulaiman".

Oleh karena Pemerintah Hindia Belanda mendukung permintaan dari *Nederlands Zending Genootschap* (NZG) agar dapat membuka kegiatan pendidikan Gereja Protestan di Serdang Hulu, baginda berpegang kepada Pasal 19 Politik Kontrak antara Serdang-Hindia Belanda yang mana di Serdang berlaku Hukum adat yang bersendikan Syariah dan Kitabullah. Baginda juga mengutus ulama-ulama dari Serdang untuk memberantas kegiatan *Abmadiyah Qadian*. Atas penghormatan dan kesayangan rakyat kepadanya didalam setiap khotbah jum'at di semua Mesjid dan Langgar di seluruh Serdang dido'akan kesejahteraan baginda.

6. Kerukunan Antar-Etnis dan Demokratisasi

Baginda Sultan Sulaiman tidak ada membeda-bedakan berbagai etnis yang ada di wilayah Kerajaan Serdang. Sebagaimana telah kita lihat, etnis **Banjar** yang skill dibidang persawahan diminta datang satu kapal dikepalai pemimpin sukunya Haji Mas Demang, untuk diberikan penghidupan mengerjakan sawah BENDANG di Perbaungan sehingga mereka menjadi makmur.

Kepada etnis Jawa disediakan tanah untuk pelarian/bekas kuli kontrak perkebunan Belanda di Kotosan dan mereka dijadikan warga kesultanan Serdang dan banyak orang Jawa yang dijadikan Wakil Penghulu di desa yang didiami mereka. Kepada orang Mandailing/Tapanuli Selatan banyak dipekerjakan selalu pegawai kerajaan dan sebagai guru agama Islam. Salah seorang dari Orang Besar Kerajaan Serdang, diangkat Tuan Jaksa Kupang Lubis, menjadi Wakil Sultan di Luhak Batak Timur (Bangun Purba), dimana tidak pernah kejadian di kerajaan-kerajaan lainnya di Sumatera. Putera Batak Kristen juga berperan sebagai Guru Sekolah HIS dan jururawat di hospital. Etnis Melayu/Karo/Batak Timur dengan sendirinya sebagai suku asli kerajaan Serdang yang memerintah diberi segala prioritasnya.

Melihat politik pemerintah Hindia Belanda menghapuskan peranan Orang Besar di kerajaan yang selama ini menjadi wakil rakyat dari daerah diganti sebagai pegawai kepala distrik, dengan demikian Raja akan tinggal sendirian dan akan senang dipalu oleh Belanda, maka Sultan Sulaiman melalui anggota *Volksraad*, Parada Harahap, minta diperjuangkan agar di Serdang dapat didirikan “Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga kebijaksanaan kerajaan Serdang dapat didukung rakyatnya (lihat harian *Locomotief* Jakarta 26-11-1925). Tetapi usul Kerajaan Serdang ini tidak digubris Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk langsung bertatap muka dengan rakyat jelata guna mendengarkan keluh kesah mereka maka Sultan Sulaiman menyediakan sarana : Setiap pukul 2 – 6 siang, baginda duduk di tangga Istana untuk menerima penduduk dari desa-desa yang datang menghadap.

Setiap musim durian baginda berada di kebon durian di Tanjung Morawa untuk makan bersama dan tatap muka dengan masyarakat Luhak-Luhak sekitarnya. Dua kali sebulan baginda berlayar dengan kapal pesiar “Senembah” diiringi Lancang Kuning “Tunggal Serdang” dan perahu-perahu rakyat dan bermalam di pasengerahan baginda di Pulau Berhala. Sambil diiringi rombongan musik dan tarian, baginda bertatap muka dengan masyarakat nelayan yang sudah semua tahu untuk berkumpul di sana. Setiap tahun pada musim panas, baginda

hijrah beberapa hari menetap di pesanggerahan di “gunung Paribuan” yang sejuk. Siang dan malam bertemu dengan kepala/penghulu Urung di Serdang Hulu dan rakyat Karo dan Batak Timur. Pada musim menanam padi di sawah, diadakanlah upacara “Jamu Tanah” untuk memberkati bibit benih padi yang harus ditanam secara serentak di Bendang, sambil bertatap muka dengan para petani.

Pada 10 bulan Syafar, baginda membuka upacara “Jamu Laut” untuk memberi berkah kepada para nelayan dan sekaligus membuka upacara adat “Mandi Syafar” yang kemudian diiringi dengan pesta, sambil bertemu muka dan makan bersama dengan penduduk dan menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Cermin.

7. Gerakan Anti-Kolonial Belanda dan Civil Disobedience

Pemerintah Hindia Belanda dengan berat hati terpaksa mengakui Tuanku Sulaiman Syariful Alamshah ditahun 1887 sebagai Sultan Serdang secara fait accompli sebab rakyat dan Orang Besar Serdang sudah menabalkan baginda sebagai raja Serdang ketika Sultan Basharuddin mangkat akhir 1880. Karena Serdang tetap saja menuntut beberapa wilayahnya agar jangan dirampas Belanda lagi, maka pihak investor perkebunan tembakau mendesak pemerintah Hindia Belanda agar dengan kekerasan menetapkan saja wilayah Serdang dan sebahagian besar dimasukkan saja ke Deli, karena Deli lebih mesra bekerjasama dengan mereka.

Karena selalu terendam di musim hujan maka ibukota administratif Kerajaan Serdang dipindahkan Belanda dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam pada tahun 1891, tetapi Sultan Sulaiman tidak mau berdampingan dengan Kontelir Belanda di Serdang dan memindahkan istana/kraton dari Rantau Panjang ke Perbaungan Bandar Setia, sejak 1886 dan mendirikan Istana baru di situ 1892.

Baginda menolak undangan untuk berkunjung menghadap Ratu Belanda, tetapi sebaliknya bersama Permaisuri dan rombongan kecil berangkat ke Jepang untuk menemui Kaisar Jepang Meijo Tenno ditahun 1894. Disambut secara incognito baginda memohon agar Jepang dapat membebaskan Serdang dari

penjajahan Belanda, karena terbukti Jepang sudah menjadi negara industri besar yang ditakuti Barat. Kegiatan baginda dengan Jepang ini terus dilaporkan intelejen Kedutaan Belanda di Tokyo, tetapi tidak berhasil ditemui bukti, maka oleh sebab itu gerak gerik baginda di Serdang diikuti terus oleh P.I.D. (Intelejen Politik Belanda) dan laporan dari Kontelir Belanda di Serdang yang tetap saja menjelekkan baginda. Kerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda tidak lancar.

Hal ini dapat terlihat di dalam Memori Timbang Terima Kontelir Serdang Hulu, De Kock: *“Sultan Serdang adalah seorang yang aneh, ia hanya memikirkan pibaknya saja dan melihat setiap pegawai pemerintahan Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Terutama mengenai Politik yang baru (Perubahan Politik Kontrak Serdang-Hindia Belanda 1907) sangat menyakitkan hatinya terhadap kita. Selalu curiga, maka setiap tindakan kita tetap diperhitungkannya keburukan-keburukan kita yang terselubung dibelakang layar. Jika kita menemuinya untuk penyelesaian sesuatu hal tidak mau ia memberikan keputusan, selalu mengulur-ulur waktu dan jikapun setelah berbincang lama akhirnya kita mendapat jawaban juga, tetapi dengan ini janganlah kita merasa pasti, bahwa sudah ada persetujuan karena kemudian ternyata bahwa Baginda Sultan berbuat seolah-olah tidak pernah ada terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah ada persesuaian paham. Saya harus mengingatkan pengganti saya agar sangat berhati-hati di Serdang, jika kita dengan gembira dapat bekerja sukses di Deli, sebaliknya di Serdang kita musti setiap saat berada dalam ketakutan, karena setiap saat bisa terjadi sesuatu hal yang aneh. Kejadian ini pernah menimpa diri Kontelir Serdang (Kemudiannya menjadi Residen Sumatera Timur), J. Ballot (1893 – 1894)”*.

Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah bekerjasama dengan sahabatnya Dr. R.M. Sutomo antara lain, apabila setiap kuli kontrak orang Jawa yang lari dari perkebunan Belanda karena tidak tahan diperlakukan sebagai setengah budak, maka mereka ditampung dan segera dijadikan “Rakyat Sultan Serdang” sehingga tidak tunduk lagi kepada hukum Hindia Belanda. Kepada mereka diberikan tanah untuk penghidupan mereka di daerah “Kotosan” (Galang). Dengan demikian

meringankan hidup mereka, bebas dari sistem perbudakan di perkebunan dan menjadikan mereka mandiri.

Pada tanggal 19-2-1917 terjadilah gerakan anti-kolonial Belanda di Serdang Hulu dengan memakai nama ajaran baru "Parhudamdandam". Hal ini merisaukan Pemerintah Hindia Belanda sehingga dikirim patroli pasukan KNIL ke sana, tetapi tidak terdapat gerakan aksi bersenjata. Akhirnya, karena kurang puas, Gubernur Sumatera Timur sendiri, GRYZEN, berkunjung ke Serdang Hulu untuk tatap muka dengan tokoh/Pengulu kampung/Kepala Urung di sana tetapi ia menghadapi perlawanan berdiam diri. Ternyata bahwa pembesar kerajaan Serdang sendiri tidak berbuat apa-apa dan non-aktif membiarkan mereka.

Hal ini menambah kecurigaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Sultan Sulaiman yang dianggap bersimpati dan melindungi gerakan "*civil disobedience*" terhadap politik kolonial Belanda. Nanti kita lihat bahwa ketika Jepang mulai berkuasa (1942) terbit pemberontakan "*Guro-guro aroan*" disponsori GERINDO. Dikalangan penduduk Karo di Deli-Hulu dan Langkat-Hulu dengan thema anti-Jepang dan anti-kerajaan, tetapi di Serdang Hulu keadaan aman dan tenang saja.

Pada tahun 1939 Anggota *Volksraad* dari Parindra, M. Husni Thamrin, berkunjung ke istana Serdang dan mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan raja di Indonesia yang begitu anti-kolonial Belanda, seperti Sultan Serdang. Sejak itu P.I.D. memperketat pengintaiannya terhadap baginda, kini dengan mempergunakan salah seorang Tengku, kerabat Sultan Serdang sebagai perwira polisi P.I.D. untuk menangkap golongan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Timur. Setiap hubungan baginda dengan orang-orang Jepang selalu diperiksa. Ketika pecah Perang Dunia ke-2 dan *Nederland* diduduki Jerman maka Ratu dan kabinet Belanda mengungsi ke London. Di Hindia Belanda diadakan kampanye besar-besaran mengumpulkan dana untuk membeli pesawat tempur "*Spitfire*" agar Angkatan Udara Belanda bisa turut berperang di pihak Sekutu menyerang Jerman. Di Istana raja-raja di Indonesia diadakanlah malam amal dana "*Spitfire Funds*". Tetapi Sultan Serdang tidak mau berpartisipasi. Ketika Jepang turut menyerang Hindia Belanda awal

1942, maka pasukan tentara KNIL mengancam dengan latihan militer di sekeliling kraton Kota Galuh (Perbaungan). Ini merupakan ancaman peringatan terakhir terhadap seorang Raja yang membangkang. Ketika tentara Jepang mendarat di Perupuk (Batubara) menuju Medan 11-3-1942, Sultan Sulaiman mengibarkan bendera Merah Putih. Gembira penjajahan Belanda terusir dan Jepang mengetahui bahwa Sultan Sulaiman pernah bertemu Kaisar Tenno Heika Meiji, maka Pemerintah Militer Jepang menghormati Serdang.

Dibuat persetujuan dengan Jepang bahwa Kerajaan Serdang melever beras dari Bendang untuk batalion tentara Jepang di Melati, sebaliknya Jepang tidak akan menangkapi pemuda/i Serdang untuk dijadikan Heiho atau Romusha (pekerja paksa). Spion Jepang yang diselundupkan ke kraton Kota Galuh tidak dapat membuktikan kerjasama Serdang dengan gerakan "*Treffers Organisation*" yang dipimpin T. Rahmatsyah dari Serdang yang memimpin gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dikendalikan Sekutu dari Colombo. Sebaliknya baginda menyuruh keluarga Sultan untuk memasuki ketentaraan Gyugun (T. Nurdin) dan T. Ziwar dan T. Syahrial dan lain-lain memasuki sekolah Pemerintahan militer Jepang di Batu Sangkar.

Ketika Balatentera ke-25 Jepang membentuk *Tyo Sangi In* (DPR Sumatera) di Bukittinggi, utusan Sumatera Timur diwakili oleh T. Putera Mahkota Serdang, Dr. Pirngadi, Adinegoro dan Raja Kaliamsyah Sinaga. Ketika resmi kemerdekaan Indonesia diproklamkan dalam rapat raksasa di Medan 6-10-1945, Sultan Serdang segera mengirim telegram kepada Presiden Soekarno berbunyi : "*Kebudayaan YM. Presiden R.I. bahwa Kerajaan Serdang dengan seluruh daerah taklukannya banyalah mengakui kekuasaan Pemerintah N.R.I. dan dengan segala kekuatan akan mendukung Republik*" (lihat dalam laporan dalam buku putih Belanda edisi S.L. Van De Wal).

Segera Sultan Serdang memerintahkan menaikkan bendera Sang Saka di kantor-kantor resmi dan rumah penduduk. Baginda juga menyuruh para bangsawan memasuki partai politik dan kesatuan besenjata R.I. dan Palang Merah. Ketika terbit "Revolusi Sosial" (3 Maret 1946) yang disponsori Komunis

di Sumatera Timur maka di Serdang tidak terjadi pembunuhan. Kraton Istana Kota Galuh Perbaungan dijaga oleh pasukan Tentera Republik Indonesia dan baginda tetap di istana sampai mangkat sakit tua, 13 Oktober 1946 usia 84 tahun. Bupati Deli-Serdang mau mengadakan upacara adat kebesaran raja-raja Melayu ketika akan diadakan pemakaman, tetapi pihak keluarga tidak menginginkan melihat situasi sedang bergolak. Didalam pidatonya Bupati S. Munar Hamijoyo memuji sikap perjuangan baginda dan jika sekiranya sekarang Sultan Sulaiman masih muda maka baginda pasti berperan seperti Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono-IX.

Ketika pecah Agresi-I Belanda menyerang Republik Indonesia, maka ketika tentara Belanda mendarat di Kuala Sungai Bongan, 28 Juli 1947 (pagi) untuk merebut titi Sei. Ular yang strategis, maka sesuai Perintah Umum Jendral Sudirman, Kota Perbaungan dan Istana Sultan Serdang serta Kraton Kota Galuh dibakar rata dengan bumi agar jangan dipergunakan Belanda. Istana Sultan Serdang itu sejak akhir 1946 dipergunakan sebagai Kantor Bupati Deli – Serdang dan sebagai markas Tentera Republik Indonesia.

C. Kesultanan Serdang Pasca Kemerdekaan

Periode 1946-2000 adalah masa yang sangat menyedihkan pada masyarakat Melayu di Propinsi Sumatera Utara :

1. Kerajaan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan dan lain-lain telah hapus.
2. Semua istana raja, sebagai pusat adat-budaya Melayu hancur (kecuali istana Maimun di Medan yang pada waktu Revolusi Sosial dijaga oleh tentara British-Indian Divisi ke-27).
3. Hak istimewa masyarakat Melayu, seperti hak atas tanah adat (*Ulayat/Jaluran*) telah pupus dan diduduki masyarakat suku/etnis lain, yang di tahun 1946-1954 disponsori oleh kaum komunis (BTI/Sarbupri).
4. Masyarakat Melayu sudah menjadi minoritas di negeri sendiri (11%).
5. Masyarakat Melayu susah duduk di dalam pemerintahan dan instansi sipil/militer
6. Mereka terdesak di dalam lapangan pendidikan dan mata pencaharian sehingga tergolong masyarakat miskin.

Karena trauma tragedi Revolusi Sosial 1946 banyak yang takut mengaku Melayu. Oleh sebab itulah masa periode 1975-2000 mulai timbul kesadaran kepada orang-orang tua untuk menyelamatkan Adat-Budaya Melayu karena takut kehilangan Jatidiri Melayu untuk generasi muda yang akan datang. Berdirilah organisasi bercorak seni-budaya seperti: Lembaga Kebudayaan Melayu (LKM) dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI), tahun 1972. Bermula untuk kegiatan kesenian (*music & dance group*) yang nampaknya digemari secara nasional. Berbagai seminar budaya diadakan tetapi sebaliknya banyak terjadi pengkhianatan dan perpecahan dengan berdirinya *splinter groups* yang memakai nama seni budaya Melayu juga. Mendekati awal abad ke-21, orang tua-tua masa kegemilangan Kerajaan Melayu sudah meninggal dunia dan kini keturunan raja/bangsawan terdiri atas anak-anak muda yang sama sekali tidak pernah lagi mengenal adat-istiadat *berraja*.

Karena Serdang sebenarnya adalah pecahan dari Kesultanan Deli (itulah mengapa gelaran sultannya memakai istilah Yang Dipertuan Besar Serdang) maka sesudah Indonesia merdeka ia digabung kembali dengan induknya dan dibentuk Kabupaten Deli-Serdang. Ibukotanya mula-mula di Medan lalu dipindah ke Lubuk Pakam.

Setelah reformasi, Serdang berusaha mengajukan usulan agar dapat berdiri sendiri sebagai sebuah Kabupaten yang terpisah dari Deli. Tahun 2004, terbentuk Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kira-kira sebagaimana wilayah Kesultanan Serdang dahulu, tetapi ibukotanya bukan lagi di Perbaungan melainkan dipindah ke Bandar Sungai Rempah.

Yang menarik, meski Kepala Daerah (Bupati) kini dipilih secara demokrasi (bukun karena turun-temurun) tetapi Bupati pertama Serdang Bedagai bernama Tengku Ery Tengku Nurdin seorang anak turun Sultan Serdang. Kebangkitan Kesultanan Serdang saat ini, juga tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Sehingga, aktivitas kesultanan dibatasi hanya sebagai institusi istiadat saja. Dalam penyelenggaraan istiadatpun diarahkan

agar tidak menjadi perenggang masyarakat dengan akar budayanya, apalagi unsur budaya yang berhubungan dengan kesultanan.

Akan tetapi, pada tanggal 12 Juni 2002, diadakan pergantian kesultanan, dari kesultanan Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj, menjadi Tuanku Luckman Sinar Barshah. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke VIII digelar pada 12 Juni 2002 di Perbaungan dan dihadiri 6.000 orang utusan dari seluruh Serdang dan 2.000 orang undangan dari kalangan pemerintah serta empat negara. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II yang memegang tahta adat Kesultanan Negeri Serdang hingga sekarang menjadi penegas bahwa Kesultanan Serdang masih eksis sampai hari ini.

Ketika Tuanku Lukman Sinar Basharshah menjadi Presiden “Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia” (MABMI, 2000-2004), beliau gerakkan usaha sosialisasi di kalangan generasi muda untuk bangga dengan tingginya seni-budaya dan peradaban Melayu di dunia dengan berbagai seminar dan tatap muka. Menggerakkan popularitas menggunakan pakaian Melayu pada upacara (perkawinan/rapat). Disponsori menggunakan upacara adat Melayu dalam acara perkawinan (upacara Meminang Pengantin, Upacara Bersanding, Tepung Tawar dan Balai Upacara Berinai, lomba berpantun dan lain-lain).

Periode 1990-2000 adalah era membangkitkan kesadaran sebagai putera Melayu, meninggalkan sikap fatal berserah diri saja; rasa rendah diri mengatasi cemoohan orang luar bahwa “Melayu Malas” atau ”Melayu Bodoh” dan sikap pesimis untuk berjuang di bidang pendidikan dan usaha kreatif. Lalu timbullah kesan dari kalangan muda, harus ada pedoman yang satu tentang adat-istiadat Melayu yang kini sudah luntur dan dipengaruhi oleh adat etnis lain dan pengaruh asing karena faktor globalisasi melalui film dan televisi.

Digerakkanlah, khususnya di daerah bekas wilayah Kerajaan Serdang (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai), bahwa di zaman Kerajaan, *Adat-Istiadat-Adat yang Diadatkan* jika ada pelanggaran oleh Sultan dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana seperti hukuman penjara atau

hukuman buang ke luar negeri atau hukuman mati dan Sangsi Sosial (Social sanction) seperti menyatakan bersalah akan sikapnya diiringi kenduri kepada masyarakat kampungnya. Jika itu tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka ia akan dikucilkan dari kehidupan bersama.

Karena pemerintahan Kerajaan di Indonesia sudah tidak ada lagi dalam Republik Indonesia ini, maka harus dilanjutkan kembali fungsi pribadi Raja dan Orang Besarnya sebagai Penguasa Adat–Istiadat (pengawal, pengatur dan salah satu unsur adat itu). Pepatah Melayu mengatakan “Biar mati anak daripada mati adat, mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”. Maka oleh masyarakat Melayu Serdang didukung oleh berbagai organisasi Melayu (MABMI, GAMI, LKM dan lain-lain), maka pada tahun 1997 ditegakkanlah kembali institusi Orang Besar (4 Wazir) diambil dari turunan mereka yang dahulu. Maka para Wazir dan Kepala adat negeri-Luhak itu bermusyawarah dan mengangkat kembali Tuanku Kepala Adat Kesultanan Serdang.

Fungsi Sultan sebagai Kepala Adat tidak dihapuskan Pemerintah Republik Indonesia selagi masih ada masyarakat adat Serdang sebagai pendukungnya. Karena istana Serdang sudah habis terbakar, maka upacara penabalan putera Sultan Sulaiman alm. diadakan di lapangan Perbaungan yang dihadiri oleh lebih 1000 orang utusan dari daerah dan kampung-kampung dan tokoh masyarakat. Pertama diangkat Tuanku Abunawar Sinar bin Sultan Sulaiman Syariful Alamshah, setelah mangkat

Di tahun 2002 Tuanku Lukman Sinar Basharshah dipilih oleh Orang Besar untuk pengganti sampai sekarang.

Untuk melestarikan adat-istiadat Melayu Serdang, maka Tuanku Lukman Sinar Basharshah mengadakan gerakan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan kembali seluruh arsip Kerajaan Serdang yang dapat diselamatkan.
2. Wawancara dengan orang tua-tua mengenai adat-istiadat masa Kerajaan Serdang masih ada.

3. Mengadakan Konvensi Adat-Budaya Melayu Kesultanan Serdang dan dihadiri oleh utusan dari distrik di Serdang/para budayawan/sejarahwan dari perguruan tinggi dan menyusun adat-istiadat yang lama dan yang kini berkembang baru (sesuai pepatah adat “Sekali air bah, sekali tepian berubah”), sama disahkan dalam Konvensi di Perbaungan tanggal 27-28 Juli 2007.
4. Menabalkan tokoh-tokoh di setiap kecamatan yang dipilih masyarakat yang dianggap sadar adat-budaya, berkelakuan baik, berpengaruh dan berprestasi, diangkat menjadi Datuk Penghulu Adat.
5. Menyerahkan kepada Datuk Penghulu Adat dan Orang Besar buku hasil Konvensi tanggal 28-29 Juli 2007 sebagai pegangan dan untuk sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda.
6. Menyerahkan buku hasil Konvensi Adat-Budaya Melayu Kesultanan Serdang kepada Menteri Kehakiman-HAM untuk diberi Hak Paten.
7. Menyerukan kepada pemerintah di kecamatan agar Datuk Penghulu Adat dijadikan mitra (*partner*) dalam masalah adat-budaya Melayu.
8. Menginstruksikan kepada Datuk Penghulu Adat agar melaksanakan upacara-upacara adat Melayu seperti “Jamu Laut”, “Jamu Sawah”, Perayaan Islam di Mesjid, dan lokakarya di daerahnya, dihadiri dan diberkati oleh Tuanku Kepala Adat Kesultanan Serdang.
9. Mengadakan tuntutan Tanah Konsesi (Ulayat/adat).
10. Membantu agar keluarga Kesultanan Asahan, Langkat, dan Deli bangkit kembali dan harus dekat dengan rakyatnya, terutama angkatan muda.

Demikianlah perjuangan kami untuk menegakkan petuah kuno adat nenek moyang kita “Ada Raja Adat berdiri, Tiada Raja Adat Mati” dan “Biar mati anak daripada mati Adat. Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa”! Indonesia adalah sebuah Republik Demokratis dan perlakuan terhadap semua etnis groups adalah sama berdasarkan azas Pancasila. Oleh sebab itu, membangkitkan kembali kesadaran adat beraja di kalangan masyarakat Melayu yang minoritas miskin terbelakang terpengaruh oleh *pornographication* dan *narcotics* di Sumatera Timur adalah perjuangan cukup berat, hanya didukung biaya pribadi sendiri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Setting Sosial Kerajaan Serdang

Riwayat Kesultanan Serdang memiliki perjalanan yang rumit dan penuh gejolak. Latar belakang berdirinya kesultanan yang terletak di Sumatera Timur ini tidak terlepas dari kejayaan Kesultanan Aceh. Sejarah Kesultanan Serdang sebenarnya diawali dengan munculnya Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Dia merupakan sosok pemberani yang terkenal sebagai Panglima Besar Tentara dan Panglima Armada Aceh. Mengusung panji-panji kebesaran Kesultanan Aceh di bawah naungan Sultan Iskandar Muda, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan memimpin operasi penaklukan dan berhasil menundukkan negeri-negeri di sepanjang Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatra, hingga Johor serta Pahang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintang itu tidak lain adalah Laksamana Malem Dagang yang memimpin armada Aceh melawan Portugis (1629) dan yang menaklukkan Pahang (1617), Kedah (1620), Nias (1624), dan lain-lainnya.¹⁴

Berkat jasa dan pengabdian terhadap Kesultanan Aceh, pada 1632 Sultan Iskandar Muda berkenan memberikan penghargaan dengan melantik Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai wakil Sultan Aceh atau Wali Negeri untuk memimpin wilayah Haru atau yang kemudian dikenal sebagai wilayah Sumatera Timur.¹⁵ Haru sebenarnya merupakan sebuah kerajaan mandiri yang berhasil ditaklukkan Kesultanan Aceh di bawah komando Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Sosok inilah yang menjadi kakek moyang raja-raja di Haru atau yang kelak bersulih nama menjadi wilayah Deli dan Serdang. Nama Haru sendiri muncul pertama kali dalam catatan pengelana dari Tiongkok yang singgah di Sumatra pada sekitar abad ke-13. Dalam catatan itu disebutkan, Haru mengirimkan misi ke Tiongkok dalam tahun 1282 Masehi ketika tanah Tiongkok

¹⁴ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang), h. 4.

¹⁵ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2003, *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang* (Medan: Yandira Agung), h. 2.

dikuasai imperium Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Selain itu, nama Haru juga tercantum dalam kronik Pararaton ketika membahas fragmen tentang Ekspedisi Pamalayu, yakni upaya Majapahit untuk menaklukkan negeri Melayu yang dimulai pada abad ke-13. Haru tercatat sebagai salah satu dari negeri-negeri utama di Sumatra di samping Lamuri, Samudera, Barlak (Perlak), dan Dalmyan (Temiang). Negarakertagama karangan Mpu Prapanca yang legendaris itu juga menyinggung soal keberadaan Haru dengan menyebutkan, di samping Pane, Majapahit berhasil pula menguasai Kompai dan Haru.

Data tentang keberadaan Kerajaan Haru masih berlanjut ketika seorang pejalan yang juga berasal dari Tiongkok, Fei Sin, menulis bahwa dalam tahun 1436 M, Haru terletak di depan Pulau Sembilan. Manakala angin baik, tulis Fei Sin, kapal layar bisa sampai ke Haru dari Malaka dalam waktu 3 hari 3 malam. Keterangan Fei Sin ini didukung oleh catatan dari Dinasti Ming yang mengisahkan bahwa pada masa pemerintahan Kaisar Yung Lo, penguasa ke-3 Dinasti Ming yang memerintah sejak 1402, Sultan Husin dari Haru mengirimkan misinya ke Tiongkok. Sebaliknya, dalam tahun 1412, Kaisar Yung Lo mengutus Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi negeri-negeri di Nusantara, termasuk Haru. Hubungan kekerabatan antara Kerajaan Haru dan Kekaisaran Tiongkok semakin harmonis karena Tuanku Alamsyah, pengganti Sultan Husin, juga mengirimkan misinya ke Tiongkok, berturut-turut dalam tahun-tahun 1419, 1421, dan 1423 Masehi.¹⁶

Pada masa-masa berikutnya, Kerajaan Haru bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Aceh yang muncul sebagai kekuatan baru di sekitar Selat Malaka. Berkali-kali Haru melancarkan gerakan penentangan terhadap dominasi Aceh hingga kerajaan ini berhasil ditaklukkan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memunculkan nama Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan sebagai panglima perang yang paling berhasil pada masa itu. Oleh penguasa Kesultanan Aceh, pada 1632 wilayah Haru diberikan kepada Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan selaku wakil Sultan Aceh.

¹⁶ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, h. 5.

Dari sinilah riwayat Kerajaan Deli dan Kerajaan Serdang dimulai. Pendudukan atas bekas wilayah Kerajaan Haru ini diberikan oleh Kesultanan Aceh dengan misi:

4. Menghancurkan sisa-sisa perlawanan Kerajaan Haru (yang dibantu oleh Portugis).
5. Mengembangkan misi Islam ke wilayah pedalaman.
6. Mengatur pemerintahan yang menjadi bagian dari Imperium Aceh.¹⁷

Pada 1632 M, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan menikah dengan Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, adik dari penguasa Kerajaan Sunggal, Datuk Imam Surbakti. Kerajaan Sunggal merupakan salah satu pemerintahan kecil yang terdapat di wilayah Urung asal Karo di Deli. Pengakuan dari kerajaan-kerajaan kecil di regional itu yang diberikan kepada Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan membuat pemerintahan Deli di bawah naungan Aceh semakin mantap. Setelah Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan meninggal dunia pada 1641 M, kekuasaan atas wilayah Deli diberikan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700 M) yang kemudian bergelar sebagai Panglima Deli.

Ketika kebesaran Kesultanan Aceh mulai melemah, di mana Sultan Iskandar Muda mangkat dan pemerintahan Aceh dipegang oleh raja-raja perempuan, pada 1669 M Panglima Perunggit memproklamkan kemerdekaan Deli atas penguasaan Aceh. Sebagai legitimasi, Deli di bawah komando Panglima Perunggit menjalin hubungan dengan Belanda di Malaka. Tuanku Panglima Perunggit atau Panglima Deli meninggal dunia pada 1700 M. Pengganti Tuanku Panglima Perunggit sebagai penguasa Deli adalah sang putra mahkota, Tuanku Panglima Paderap yang memerintah hingga tahun 1720 M. Sepeninggal Tuanku Panglima Paderap, Deli mulai dilanda perpecahan. Selain karena mulai berpengaruhnya Kerajaan Siak di wilayah Sumatra Timur, ancaman yang mengguncang Deli juga disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap. Meski terdapat beberapa versi, ada

¹⁷ Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan: tanpa penerbit), h. 49.

sejumlah kalangan yang meyakini bahwa anak Tuanku Panglima Paderap berjumlah empat orang, yaitu:

5. Tuanku Jalaludin Gelar Kejeruan Metar, berasal dari turunan bangsawan Mabar, Percut, dan Tg. Mulia.
6. Tuanku Panglima Pasutan, berasal dari turunan bangsawan Deli dan Bedagai.
7. Kejeruan Santun, berasal dari turunan bangsawan Denao dan Serbajadi.
8. Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan, berasal dari turunan bangsawan Serdang dan Sei Tuan (Basarshah II, tanpa tahun: 52).

Perang saudara dalam memperebutkan kekuasaan Deli itu terjadi pada sekitar tahun 1723. Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan yang merasa paling berhak atas tahta Deli, karena merupakan anak yang berasal dari permaisuri, tidak berhasil memperoleh haknya. Dalam pertempuran melawan kakak keduanya, Tuanku Panglima Pasutan, Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan menelan kekalahan dan bersama ibundanya, Tuanku Puan Sampali yang tidak lain adalah permaisuri Tuanku Panglima Paderap, terpaksa menyingkir dan mengungsi hingga kemudian mendirikan Kampung Besar (Serdang). Atas kemenangan yang diperoleh dari adiknya itu maka Kesultanan Deli dikuasai oleh Tuanku Panglima Pasutan.

Dalam catatan Tengku Luckman Sinar Basarshah II, yang mengemban mandat sebagai Sultan Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang atau Sultan Serdang ke VIII, disebutkan bahwa menurut adat Melayu yang benar, yang berhak menggantikan Tuanku Panglima Paderap sebagai pemimpin Kerajaan Deli adalah Tuanku Umar Johan selaku putra dari permaisuri. Namun, Tuanku Umar Johan disingkirkan oleh kakaknya karena masih di bawah umur. Atas perlakuan terhadap Tuanku Umar Johan tersebut maka dua orang besar di Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah serta bersama dengan seorang Raja Urung Batak Timur yang menghuni wilayah Serdang bagian Hulu di Tanjong Merawa dan juga seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), merajakan

Tuanku Umar Johan selaku Raja Serdang yang pertama diangkat yaitu pada 1723 M (Basarshah II, tanpa tahun: 55).

Sultan Serdang pertama, Tuanku Umar Johan, memiliki tiga orang putra, yakni Tuanku Malim, Tuanku Ainan Johan Alamsyah, dan Tuanku Sabjana atau yang sering dikenal sebagai Pangeran Kampung Kelambir. Oleh karena Tuanku Malim menolak dilantik menjadi raja sebagai pengganti ayahnya, maka yang kemudian didaulat untuk menduduki tahta Kesultanan Serdang setelah Tuanku Umar Johan mangkat adalah Tuanku Ainan Johan Alamsyah (1767-1817). Sultan Ainan Johan Alamsyah beristrikan Tuanku Puan Sri Alam dari Kerajaan Perbaungan yang kemudian bergabung dengan Kesultanan Serdang. Sebelumnya, salah seorang keturunan Panglima Paderap (Raja Deli terakhir) yang lain, yaitu Tuanku Tawar (Arifin) Gelar Kejuruan Santun, yang membuka negeri di Denai dan meluas sampai ke Serbajadi, sudah menggabungkan diri dengan Kesultanan Serdang di masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama.

Putra pertama Sultan Ainan Johan Alamsyah, Tuanku Zainal Abidin, terbunuh ketika berperang di Langkat. Maka dari itu, ditunjuklah Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah, putra kedua dari Sultan Ainan Johan Alamsyah, sebagai penerus tahta Kesultanan Serdang. Sultan Thaf Sinar Baharshah yang kemudian dianugerahi nama kebesaran sebagai Sultan Besar Serdang memerintah selama periode 1817-1850 M. Pada masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah ini Kesultanan Serdang mengalami era jaya dengan menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa karena perdagangannya. Nama Kesultanan Serdang begitu besar dan dikenal negeri-negeri lain sampai ke Semenanjung Tanah Melayu. Banyak kerajaan-kerajaan lain, seperti Padang, Bedagai, dan Senembah, yang meminta bantuan militer dari Kesultanan Serdang.

Sebagai pengganti dari Sultan Thaf Sinar Baharshah adalah putranya yang tertua, yaitu Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819-1880). Kepemimpinan Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah mendapat legitimasi dari Sultan Aceh, Ibrahim Mansyur Syah, berupa pengakuan Mahor Cap Sembilan. Ketika pada 1854 Aceh mengirim ekspedisi perang sebanyak 200 perahu perang untuk

menghukum Deli dan Langkat, Serdang berdiri di pihak Aceh. Dalam menjalankan pemerintahannya Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah didampingi oleh orang-orang besar, wazir, serta raja-raja taklukkan. Zaman pemerintahan Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah memang diwarnai banyak peperangan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Selain berkonflik dengan Deli dalam persoalan perluasan wilayah, Serdang juga menghadapi gangguan dari penjajah Belanda yang datang ke Serdang pada 1862. Namun, hegemoni Belanda yang terlalu kuat menyebabkan Serdang kemudian harus takluk dan mendapat pengakuan dari Belanda seperti yang tercantum dalam *Acte van Erkenning* tertanggal 16 Agustus 1862 (Basarshah II, tanpa tahun:64).

Ketika Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah wafat pada 7 Muharram 1279 Hijriah atau pada bulan Desember 1880, sang putra mahkota, Sulaiman Syariful Alamsyah, masih sangat muda sehingga roda pemerintahan Kesultanan Serdang untuk sementara diserahkan kepada Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Syariful Alamsyah) sebagai wali sampai Sulaiman Syariful Alamsyah siap untuk memimpin pemerintahan. Pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda atas penobatan raja baru di Serdang ini baru diberikan melalui *Acte van Verband* tanggal 29 Januari 1887. Pada era kepemimpinan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah ini, pertikaian Serdang dengan Deli semakin memanas kendati beberapa solusi telah dilakukan untuk meminimalisir konflik, termasuk melalui hubungan perkawinan dan kekerabatan. Masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah berlangsung cukup lama yakni dari era masa ketika kolonialisme Belanda berkuasa (1866) hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia (1946). Tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, pada Desember 1945 Kesultanan Serdang di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menyatakan dukungan terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

Selanjutnya, tahun 1946 wilayah Sumatra Timur, termasuk Serdang, dilanda situasi yang mencekam. Pada 3 Maret 1946, terjadi peristiwa menggegerkan yang dikenal sebagai “Revolusi Sosial” di mana terjadi

penangkapan terhadap raja-raja yang ada di Tanah Karo oleh orang-orang komunis. Raja-raja dan kaum bangsawan itu oleh kaum kiri dianggap sebagai pengkhianat karena dulu mengabdikan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Menurut buku *Kronik Mahkota Kesultanan Serdang* (2003) yang ditulis oleh Pemangku Adat Kesultanan Serdang Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, penangkapan terhadap raja-raja di Sumatra Timur itu, seperti yang terjadi di Simalungun di mana raja-raja ditangkap, beberapa orang di antaranya dibunuh, dan istana mereka dijarah. Di Langkat, Sultan ditahan dan beberapa bangsawan tewas, termasuk sastrawan Tengku Amir Hamzah. Sementara di Asahan, Sultan Saibun berhasil meloloskan diri dan berlindung di markas tentara Jepang yang kemudian menyerahkannya kepada pihak Tentara Republik Indonesia (TRI) di Siantar. Demikian juga di wilayah Batubara dan Labuhan Batu, raja-raja dibunuh, termasuk para bangsawan utama, dan harta benda mereka dirampok (Basarshah II, 2003:63).

Masih menurut catatan Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, di Serdang keadaan sedikit berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain. Berkat adanya dukungan yang positif dari Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah terhadap kaum pergerakan dan perasaan anti Belanda yang telah dikenal umum sejak zaman kolonial Belanda serta sokongan penuh Kesultanan Serdang atas berdirinya negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, maka tidak terjadi aksi penangkapan, pembunuhan, atau penjarahan di Serdang. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah tidak menyandarkan diri kepada pasukan Sekutu karena banyak kerabat dan para bangsawan Serdang yang dianjurkan menempati posisi di dalam struktur angkatan bersenjata Republik, partai-partai politik yang berhaluan Islam dan nasionalis. Oleh karena itu, ketika terjadi "Revolusi Sosial" 3 Maret 1946, diadakanlah suatu perundingan antara Kapten Tengku Nurdin (Komandan Batalion III TNI di Medan) dengan Tengku Mahkota Serdang dan para tokoh adat Kesultanan Serdang. Dari perundingan itu kemudian diambil keputusan bahwa Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada TNI yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah Republik Indonesia (Basarshah II, 2003:64).

Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, maka keesokan harinya, yakni tanggal 4 Maret 1946, diutuslah Jaksa Tengku Mahmuddin dan Panitera Tengku Dhaifah atas nama Kesultanan Serdang untuk secara resmi menyerahkan administrasi pemerintahan kepada pihak TNI atas nama pemerintah Republik Indonesia yang dipersatukan oleh Komite Nasional Indonesia wilayah Serdang dan sejumlah wakil organisasi masyarakat serta organisasi politik lainnya di kantor Kerapatan di Perbaungan. Timbang terima yang mulai berjalan pada 4 Maret 1946 ke segenap pelosok wilayah Serdang itu agaknya merupakan sebuah peristiwa unik yang berlaku untuk pertamakalinya di Indonesia. Sejak saat inilah Kesultanan Serdang meleburkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud komitmennya terhadap kemerdekaan dan berdirinya negara Indonesia yang berdaulat.

Pada 13 Oktober 1946, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dikebumikan dengan upacara militer di makam raja-raja di sebelah masjid raya di Perbaungan yang masih termasuk di dalam wilayah administratif Serdang. Sebagai pemegang tahta Serdang ke VI sepeninggal Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah adalah Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar. Namun, dikarenakan oleh situasi politik dan keamanan di Serdang dan umumnya di Sumatra Timur yang belum stabil, maka penabalan mahkota kesultanan kepada Tuanku Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar hanya sebagai kepala adat. Di samping itu, Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar sendiri tidak bersedia dinobatkan sebagai Sultan Serdang karena merasa masih trauma dengan serentetan kejadian tragis atau “Revolusi Sosial” yang terjadi di tahun 1946 itu. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar wafat di Medan pada 28 Desember 1960 dan dimakamkan di Perbaungan.

Setelah mangkatnya Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar, masyarakat adat Serdang tidak lagi mempunyai kepala adat selama masa-masa selanjutnya dan posisi ini mengalami kevakuman selama lebih kurang 35 tahun. Hingga akhirnya, pada 30 November 1996, Kerapatan Adat Negeri Serdang mengadakan sidang serta memutuskan bahwa Pemangku Adat Serdang dipilih dan ditetapkan dari

putra-putra almarhum Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah yang masih hidup. Dari sidang-sidang tersebut kemudian diputuskan Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj, putra ketiga Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dan pemegang mahkota Kesultanan Negeri Serdang yang ke VII sebagai Pemangku Adat Negeri Serdang dan Ketua Kerapatan Adat Negeri Serdang. Penabalannya dilakukan dalam upacara adat di Gedong Juang 45 di Perbaungan pada 5 Januari 1997.

Namun, kebangkitan Kesultanan Serdang ini tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Institusi kesultanan semata-mata dilihat dari perspektif politik. Keberadaan Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Oleh karena itu, aktivitas kesultanan dibatasi hanya sebagai institusi istiadat saja. Dalam penyelenggaraan istiadat pun “diarahkan” tidak menjadi perenggang masyarakat dengan akar budayanya, apalagi unsur budaya yang berhubungan dengan tradisi kesultanan, khususnya tradisi kesultanan yang terdapat di Sumatra Timur (Basarshah II, 2003:71). Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj mangkat pada 28 Januari 2001 karena sakit dan dikebumikan di Makam Raja Diraja di samping Masjid Raya Perbaungan.

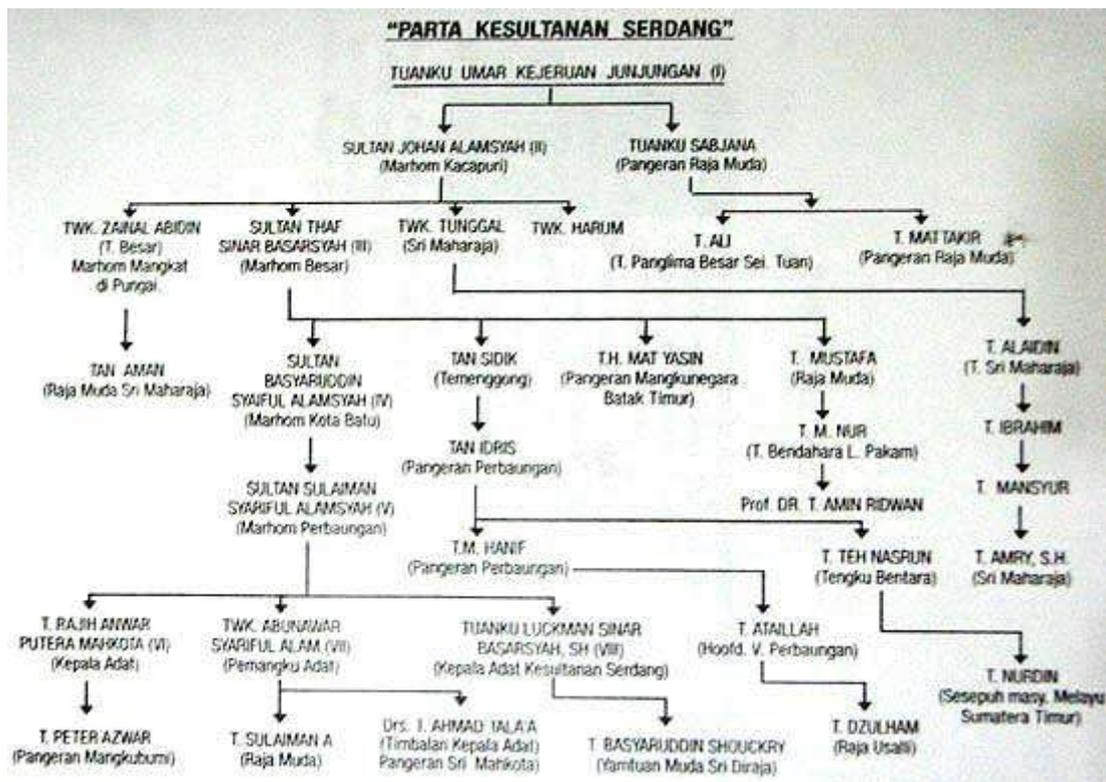
Sebagai penerus keberadaan Kesultanan Serdang setelah Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj wafat adalah Tuanku Luckman Sinar Baharshah II. Sebelum jenazah Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj diberangkatkan pada tengah malam tanggal 28 Januari 2001, sesuai dengan Adat Melayu “Raja Mangkat Raja Menanam”, dimusyawarahkanlah mengenai pengganti Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj dan anggota sidang dengan suara bulat menyepakati bahwa Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (waktu itu bergelar Temenggong Mangkunegara Serdang) sebagai Pemangku Adat Serdang berikutnya. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke VIII digelar pada 12 Juni 2002 di Perbaungan dan dihadiri 6.000 orang utusan dari seluruh Serdang dan 2.000 orang undangan dari kalangan pemerintah serta empat negara. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II yang memegang tahta adat Kesultanan Negeri

Serdang hingga sekarang menjadi penegas bahwa Kesultanan Serdang masih eksis sampai hari ini.

Silsilah Raja Kesultanan Serdang

Berikut nama-nama sultan yang pernah memimpin pemerintahan Kesultanan Serdang:

9. Sultan Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan (1723–1767).
10. Sultan Ainan Johan Alamsyah (1767–1817).
11. Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817–1850).
12. Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819–1880).
13. Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1866–1946) . - Selama tahun 1880 – 1866, pemerintahan Kesultanan Serdang dipegang oleh Tengku Raja Muda Mustafa (paman Sulaiman Syariful Alamsyah) sebagai wali karena Sulaiman Syariful Alamsyah masih sangat belia.
14. Tengku Putera Mahkota Rajih Anwar (1946–1960).
15. Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj (1997–2001).
16. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II (2001–2012) dinobatkan pada 2002.



*Silsilah Kesultanan Serdang.
(Sumber: Koleksi Tuanku Luckman Sinar Baharshah II)*

Wilayah Kekuasaan

Sejak awal berdirinya hingga sekarang, wilayah Kesultanan Serdang beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial-politik yang terjadi. Kesultanan Serdang sendiri, pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dimasukkan ke dalam Residensi Sumatra Timur, bersama sejumlah kerajaan lainnya antara lain Kerajaan Asahan, Kerajaan Deli, Kerajaan Kualuh dan Leidong, Kerajaan Langkat, Kerajaan Pelalawan, serta Kerajaan Siak Sri Inderapura (Basarshah II, 2006:1). Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 dan dilanjutkan dengan pengakuan kedaulatan tahun 1949, secara administratif, Kesultanan Serdang yang semula termasuk ke dalam wilayah Sumatra Timur, sejak tahun 1950 dilebur menjadi Provinsi Sumatra Utara hingga kini.

Ditinjau dari perjalanan sejarahnya, perubahan luas wilayah Kesultanan Serdang dari zaman ke zaman diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya

dengan jalan penaklukan, kekerabatan (ikatan perkawinan), atau penggabungan wilayah oleh kerajaan-kerajaan kecil ke wilayah Kesultanan Serdang. Berdasarkan data yang ditemukan dari beberapa catatan karya Tuanku Luckman Sinar Baharshah II, daerah-daerah yang pernah dan masih menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Serdang (dikumpulkan dari beberapa sumber), antara lain: Percut, Perbaungan, Sungai Ular, Sungai Serdang, Padang, Bedagai, Sinembah, Batak Timur, Negeri Dolok, Batubara (Lima Laras), Serbajadi, Denai, Patumbak, Rantau Panjang, Bandar Labuhan, Lengo Seperang/Kwala Namu, Pantai Cermin, Pertumbuhan/Galang, Medan Senembah, Tambak Cikur, Rantau Panjang, hingga Lubuk Pakam (Basarshah II, 2003; Basarshah II, tanpa tahun).

Sistem Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Sultan Serdang yang pertama, yaitu Tuanku Umar Johan Alamsyah Gelar Kejeruan Junjongan, pemerintahan Kesultanan Serdang masih dalam kondisi yang tidak menentu karena banyaknya konflik yang harus dihadapi. Baru pada era Sultan Serdang kedua, Sultan Ainan Johan Alamsyah (1767-1817), Kesultanan Serdang mulai menyusun konsep untuk mengatur tata pemerintahannya. Salah satu yang terpenting adalah dengan dibentuknya Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu:

5. Pangeran Muda, berwilayah di Sungai Tuan.
6. Datok Maha Menteri, berwilayah di Araskabu.
7. Datok Paduka Raja, berwilayah di Batangkuis.
8. Sri Maharaja, berwilayah di Ramunia.

Sultan Ainan Johan Alamsyah memperkokoh legitimasi Lembaga Orang Besar Berempat itu berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan empat penjuru alam (barat, timur, utara, selatan) dan kokohnya kaki binatang serta asas Tungku Sejarangan (empat batu penyangga untuk memasak) yang merupakan asas sendi kekeluargaan tradisi masyarakat Melayu di Sumatra Timur. Terdapat empat sosok penentu di dalam upacara perkawinan maupun perhelatan-perhelatan besar lainnya. Selain itu, dalam menjalankan roda

pemerintahannya, Sultan Serdang dibantu oleh Syahbandar dan Temenggong sebagai kepala keamanan dan panglima besar. Pemerintahan Sultan Ainan Johan Alamsyah mencoba mengharmonisasikan antara Hukum Syariat Islam dengan Hukum Adat. Hal ini mengacu pada filosofi pepatah “Adat Melayu bersendikan Hukum Syara’ dan Hukum Syara’ bersendikan Kitabullah” (Basarshah II, tanpa tahun: 56). Pada masa ini juga diperketat aturan tentang adat-istiadat kerajaan, yaitu antara lain:

1. Adat Sebenar Adat

Adat ini menganut pemahaman sesuai berlakunya Hukum Alam, misalnya: api itu panas, air itu dingin, hidup-mati, siang-malam, lelaki-perempuan, dan lainnya.

2. Adat yang Diadakan

Adat ini muncul sebagai hasil dari konsensus permufakatan Orang Raja dan Para Orang Besar Kerajaan.

3. Adat yang Teradat

Adat ini lahir dari suatu kebiasaan yang kemudian diikuti secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat, sehingga menjadi resam hingga dijadikan sebagai Hukum Adat dan terdapat sanksi-sanksi adat jika hukum itu dilanggar.

4. Adat-Istiadat

Adat ini berupa seremonial yang dirujuk dari ketentuan yang berlaku di istana raja. Adat ini bersifat dinamis, bisa berubah ketika terjadi pergantian raja.

Sementara pada era pemerintahan Sultan Thaf Sinar Baharshah (1817–1850), Kesultanan Serdang mencapai masa keemasan dengan memperoleh kemajuan pesat, terutama di bidang perdagangan. Pada masa ini, penerapan Adat Melayu yang bersendikan Islam sangat dijunjung tinggi. Yang menjadi hal utama adalah Budi yang Mulia (budi daya, budi bahasa, budi pekerti, dan lain-lain), sebab dengan ketinggian budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu bangsa. Dampak positif dari penerapan konsepsi budi ini salah satunya adalah rakyat Batak Hulu banyak yang masuk Islam. Dalam memegang pemerintahan umum,

Sultan Thaf Sinar Baharshah dibantu beberapa Orang Besar, seperti Pangeran Muda Sri Diraja Mattakir sebagai Raja Muda, Tuanku Ali Usman (gelar Panglima Besar Negeri Serdang) di Sungai Tuan (Kampung Klambir), Tuanku Tunggal (gelar Sri Maharaja) di Kampung Durian, dan Datuk Akhirullah gelar Pekerma Raja Tg. Morawa.

Pemimpin Serdang yang selanjutnya, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1819–1880), mengalami masa-masa di mana eksistensi Kesultanan Serdang mulai terusik dengan kedatangan penjajah Belanda. Di dalam menghadapi pengaruh Belanda yang semakin kuat di Pantai Timur Sumatra, Serdang di bawah komando Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah tanpa tedeng aling-aling berdiri di belakang Aceh yang memang gencar melakukan perlawanan terhadap hegemoni penjajah. Atas dukungan tersebut, pada 1854 Sultan Aceh berkenan menganugerahi gelar kepada Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah sebagai “Wazir Sultan Aceh” dengan simbol kekuasaan yang disebut Mahor Cap Sembilan (Basarshah II, tanpa tahun:61). Seperti sultan-sultan sebelumnya, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah juga selalu didampingi Orang-orang Besar dan Wazir serta raja-raja dari wilayah yang berhasil ditaklukkan Serdang. Akan tetapi, karena konflik yang berkepanjangan berakibat dengan sering terjadinya pergantian Orang-orang Besar dan para Wazir serta raja-raja dari wilayah jajahan Serdang tersebut. Selain itu, di luar Dewan Kerajaan yang terdiri dari orang-orang Besar pilihan Sultan, terdapat lagi lembaga pemerintahan yang mengurus daerah-daerah yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang. Institusi ini dikenal dengan nama “Lembaga Orang Besar Berlapan” yang terdiri dari delapan orang pejabat yang ditunjuk Sultan Serdang untuk memimpin daerah-daerah di luar pusat kerajaan

Berikutnya adalah pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1866–1946) di mana Kesultanan Serdang melakukan beberapa tindakan strategis karena semakin kuatnya tekanan dari penjajah Belanda. Kebijakan penting yang dilakukan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah salah satunya adalah melakukan perlawanan menentang Belanda ketika pada 1891 Kontrolir Serdang sebagai wakil

dari pemerintah kolonial Hindia Belanda memindahkan ibukota Serdang dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam. Sebagai bentuk perlawanan, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menolak ikut pindah ke ibukota baru pilihan penjajah, dan sebaliknya justru membangun istana baru, yakni Istana Perbaungan (Kraton Kota Galuh), pada 1886 serta mendidikan Masjid Raya Sulaimaniyah. Selain itu, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah juga membangun kedai, pasar ikan, dan kompleks pertokoan sehingga berdirilah sebuah kota kecil yang diberi nama Simpang Tiga Perbaungan. Kota inilah yang dijadikan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah sebagai tandingan ibukota Serdang versi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Perlawanan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah terhadap penetrasi Belanda masih berlanjut ketika pada 1898 menolak dengan dingin permintaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia agar menghadap Ratu Kerajaan Belanda. Tidak hanya itu, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah beserta rombongan bahkan memilih melawat ke Jepang dan Tiongkok pada tahun itu juga sebagai tindakan nyata bahwa Kesultanan Serdang memberikan perlawanan terhadap Belanda karena pada masa itu Jepang dan Tiongkok merupakan negeri di Asia yang maju dan berani menentang kekuatan militer dan penguasaan ekonomi oleh Barat. Dalam kunjungannya di Jepang, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dijamu secara pribadi oleh Tenno Heika Kaisar Meijimutshuhito (Basarshah II, 2003:35). Namun, lawatan ke Jepang itu dimanfaatkan Belanda untuk berbuat licik sebagai balasan atas “pembangkangan” yang dilakukan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dengan mempersempit batas wilayah Serdang. Kebijakan mempersempit wilayah Kesultanan Serdang oleh Belanda ini tak pelak menyebabkan perubahan dalam susunan para Orang Besar. Belanda menghapuskan beberapa posisi pemerintahan, termasuk Raja Muda dan Wazir Paduka Setia Maharaja.

Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah berkuasa di Serdang hingga akhir hayatnya, yaitu di penghujung tahun 1946, di mana sebelumnya di tahun itu telah terjadi “Revolusi Sosial” sehingga Kesultanan Serdang memilih menggabungkan diri dengan Tentara Rakyat Indonesia sebagai wakil dari pemerintahan Republik

Indonesia yang telah diproklamirkan sebelumnya. Keputusan itu diambil atas dasar kemantapan hati untuk bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada era pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Kesultanan Serdang pada bulan Desember 1945 telah menyatakan dukungannya terhadap berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh.

Di masa-masa selanjutnya, pemerintahan adat Kesultanan Serdang nyaris tidak terlihat karena situasi politik yang sedang carut-marut, bahkan geliat Serdang sempat mati suri selama sekitar 35 tahun karena calon pengganti Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah menolak ditabalkan sebagai Sultan Serdang dengan alasan masih trauma atas berbagai kejadian berdarah di tahun-tahun revolusi fisik itu. Setelah dihidupkan lagi pada 1997, Kesultanan Serdang tidak bisa mencapai kejayaan seperti dulu dikarenakan keterikatan dan situasi politik Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Aktivitas kesultanan tidak lagi berpengaruh banyak terhadap keberlangsungan dan kehidupan rakyat di Serdang, melainkan hanya sebatas institusi istiadat semata.

B. Peran Kesultanan Serdang dalam Kesejahteraan Rakyat

1. Kesejahteraan Dibidang Pendidikan Rakyat

Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah didirikan Sekolah Melayu (3 tahun) sejak 1919 di setiap *Lubak* (Distrik) dimana rakyat Serdang dapat bersekolah secara cuma-cuma. Di wilayah Serdang Hulu (wilayah yang dihuni etnik Batak Timur dan Karo) dibuka juga Sekolah Pertanian dan *Ambachtschool* (Sekolah Pertukangan) dan untuk itu disediakan baginda tanah 1000 bahu dengan biaya Fl. 10.000.- Kemudian di Perbaungan didirikan pula sekolah lanjutan berbahasa Belanda "*Hollands-Inlandsche School*" (6 tahun) ditahun 1923 yang kepala sekolahnya orang Belanda dimana dipelajari juga Bahasa Belanda dan Inggeris dengan mata pelajaran setara Sekolah Menengah. Sejak 1920 Baginda mendorong putera dan puteri Bangsawan Serdang bersekolah. Pada masa itu dimana-mana puteri bangsawan masih "dipingit", tetapi di Serdang sudah ada

kebebasan wanita. Beberapa orang puteri T. Bendahara Serdang bahkan sekolah ke Betawi, salah seorang puterinya (Tengku Durat) tamat Sekolah Pendidikan Guru.

Putera dan puteri baginda juga diharuskan mengambil les (kursus) bahasa asing dan bermain alat musik barat. Putera-putera Orang Besar disekolahkan ke Batavia dan Bandung untuk mendapat pendidikan sekolah pemerintahan (MOSVIA) sehingga bisa kelak menggantikan kedudukan orang tua mereka dengan lebih baik lagi. Salah seorang Orang Besar Serdang, Tengku Pangeran Mohd. Hanif (Luhak Perbaungan) pernah mengecap pendidikan di “Penang Free School”. Tidak lupa akan tugas dari Kerajaan Melayu Serdang yang berlandaskan Hukum Syari’ah, bersendikan Al-Qur’an, maka baginda selaku khalifatullah fil’ardh juga mendirikan Lembaga Dakwah “Syairus Sulaiman” dipimpin oleh Ulama T. Fachruddin dan Syekh Zainuddin (bekas Mufti Serdang).

Pada tahun 1927 untuk membendung pengaruh ajaran non-Muslim dikeluarkan baginda peraturan agar di sekolah-sekolah yang ada di dalam Kerajaan Serdang diberikan pelajaran agama Islam dengan biaya Kerajaan.

2. Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi

Sultan Sulaiman Shariful Alamasyah membuka proyek persawahan untuk rakyat di wilayah Luhak Rantau Panjang dengan mengeluarkan biaya \$.10.000.- pada tahun 1892, tetapi gagal karena wilayah itu selalu terendam air bah dari sungai Serdang bila musim hujan. Ketika mengadakan tour ke Bali baginda tertarik dengan sistem irigasi persawahan “*Subak*”. Pada tahun 1909 Baginda mendatangkan pekerja sawah yang berpengalaman dari Kalimantan (orang Banjar dibawah pimpinan Pengulu Adat Haji Mas Demang). Lalu dibukalah Proyek irigasi “Bendang di Perbaungan” seluas 2000 bahu dengan biaya \$.1.200.000.- sebagai Konsultannya orang Jepang, Immada. Baginda hanya mengutip sewa yang cukup rendah untuk biaya administrasi irigasi dan pegawainya dari hasil prosentase padi yang dihasilkan. Proyek ini sangat berhasil dan terkenallah Serdang Lumbung Padi di Residensi Sumatera Timur disamping Siantar. Pada

tahun 1918 baginda membuka perkebunan karet “*N.V. Midden Serdang Landbouw Mij*” di Tg. Purba dimana administraturnya ialah Konsul Swiss di Medan dan asistennya orang Belanda dan Melayu.

Pada tahun 1933 Sultan Sulaiman juga tidak mau kalah menandingi investor Belanda dan asing, dan membuka perkebunan tembakau di “*Cinta Kasih*” (Kuala Bali) seluas 700 HA. Perusahaan itu pernah memproduksi cerutu dalam kotak yang diberi nama “Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah”. Untuk menunjang kegiatan perekonomian rakyat, baginda mendirikan di Bangun Purba “*Bank Batak*” (1916). Guna menunjang modal swasembada peternakan rakyat, Baginda melepaskan 400 ekor kerbau di hutan *Rencab* (Pantai Cermin) dan 80 ekor kerbau di hutan Pantai Labu. Baginda juga menciptakan Peraturan Jaluran Hak Rakyat Tanah Penunggu pada tahun 1922 sehingga dipakai oleh Belanda untuk Kerajaan Langkat, Deli dan lain-lain.

Agar 2000 HA tanah persawahan rakyat dapat terbebas dari banjir maka pada tanggal 8-6-1936 dengan uang sendiri baginda membuat Serdang Kanal sepanjang 7 km dimana Sei.Serdang diluruskan.

3. Kegiatan di Bidang Kesehatan Rakyat

Untuk menjaga kesehatan rakyat maka dipanggil baginda Dr. R.M. Sutomo (Pendiri “Budi Utomo”) untuk menjadi kepala dokter di Kerajaan Serdang (1911-1915). Di setiap Luhak (Distrik) didirikan Klinik Pengobatan rakyat secara cuma-cuma. Untuk penderita sakit kusta kerajaan membiayai rehabilitasinya di rumah sakit Lau Simomo dan Pulau Sicanang. Sejak 1923 telah berdiri hospital di Perbaungan, hospital besar di Tg. Morawa, hospital Sei. Buluh, hospital Pertumbukan, hospital Tanah Abang dan hospital Bandar Negeri, serta Hospital di Tanah Raja dan Pelintahan. Di sekolah Melayu diajarkan penyuluhan mengenai penyakit endemik seperti malaria, puru, diarhee, influenza dan lain-lain.

4. Kegiatan dibidang Seni-Budaya

Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah sendiri adalah pemain biola yang cekatan dan memiliki sebuah biola merk “Stradivarius” (\$.1000) yang ditempah di

Italia. Dibentuk baginda Band Musik/Orkestra “SULTAN SERDANG” yang dipimpin oleh Tengku Muzier dan pemain-pemain musiknya semua putera Serdang. Baginda sangat mencintai seni budaya Melayu. Pada 2 hari raya Idul Fitri setiap tahun diadakan sayembara orkes/penari Zapin/Gambus dari setiap Luhak. Begitu juga untuk pemusik dan tarian joget Melayu. Pemenang tari akan merupakan Penari Istana pada setiap keramaian. Ketika pada akhir abad ke-19 baginda berkunjung ke Kedah dan Perlis, dan oleh Regent Kedah (Tengku Mahmud) dihadiahkan seperangkat teater tradisional Melayu MAKYONG lengkap dengan pemainnya. Begitu juga ketika ke Bali singgah di Kraton Yogyakarta, oleh Sultan Yogya diberi hadiah seperangkat Gamelan lengkap dengan pemainnya. Semuanya ini diberikan untuk menghibur rakyat pada hari-hari besar tertentu di daerah (Luhak-Luhak) secara cuma-cuma.

Juga baginda mendirikan Opera tradisional Melayu Bangsawan “Indian Ratu” dengan para pemain orang Melayu, Sri Langka, Portugis Goa, peranakan Eropa dan lain-lain bermain berkeliling di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Malaya. Setahun sekali group ini kembali ke Serdang dan diperintahkan bermain di Luhak (distrik-distrik) untuk rakyat agar menjadi media mensosialisasikan tata cara adat antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Berhubung peranannya begitu besar sebagai pengayom seni-budaya maka banyaklah orang asal Serdang yang menjadi seniman. Baginda menghiasi Istana Serdang di kraton Kota Galuh dengan ukiran seni pada istana yang 5 tingkat itu dikepalai oleh pegawai seorang Jepang bernama OHORI yang juga membuat Istana Permaisuri di sebelah belakang dengan ruang ala Jepang dan taman ala Jepang. Tuan Ohori juga memimpin kursus kerajinan tangan rumahtangga buat kaum puteri.

5. Pengembangan bidang Kegiatan Agama Islam

Setelah Tuan Shekh Haji Zainuddin berhenti sebagai Mufti Kerajaan Serdang (1928), maka Sultan Sulaiman membentuk suatu Dewan bernama “*Majelis Syar’i Kerajaan Serdang*”, dimana Sultan memindahkan kekuasaannya selaku Khalifatullah Fi’l Ardh (Kepala Agama Islam) kepada Majelis ini yang bersifat

kolegial (Dewan) dipimpin oleh Tengku Fachruddin dan setelah dia meninggal dunia 1937 baginda mau menggantikannya dengan seorang ulama dari Minangkabau, Haji Abd. Majid Abdullah (bekas ketua PERMI) tetapi dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda karena Tuan Haji itu terkenal anti-Belanda. Terpaksalah diambil Tengku H. Yafizham yang diperintah kembali dari studinya di Universitas Al-Azhar (Kairo) ditahun 1939. Karena baginda sangat concern melihat situasi perpecahan dikalangan umat Islam di Sumatera Timur antara Kaum Muda (Muhammadiyah) dengan Kaum Tua (Ahli sunnah wal jama'ah), maka baginda membuat muzakarah pertemuan dimana diundang tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Sumatera Timur untuk seminar di Istana Sultan Serdang pada tanggal 5-2-1928 dan hasilnya dituangkan didalam sebuah buku. Baginda juga giat membantu perkembangan Al Jamiatul Washliyah sebagai perguruan modern Islam dimana salah seorang pendirinya, Tuan H. Abd. Rahman Syihab (Melayu Galang) lulusan dari "Syairus Sulaiman".

Oleh karena Pemerintah Hindia Belanda mendukung permintaan dari *Nederlands Zending Genootschap* (NZG) agar dapat membuka kegiatan pendidikan Gereja Protestan di Serdang Hulu, baginda berpegang kepada Pasal 19 Politik Kontrak antara Serdang-Hindia Belanda yang mana di Serdang berlaku Hukum adat yang bersendikan Syariah dan Kitabullah. Baginda juga mengutus ulama-ulama dari Serdang untuk memberantas kegiatan *Abmadiyah Qadian*. Atas penghormatan dan kesayangan rakyat kepadanya didalam setiap khotbah jum'at di semua Mesjid dan Langgar di seluruh Serdang dido'akan kesejahteraan baginda.

6. Kerukunan Antar-Etnis dan Demokratisasi

Baginda Sultan Sulaiman tidak ada membeda-bedakan berbagai etnis yang ada di wilayah Kerajaan Serdang. Sebagaimana telah kita lihat, etnis **Banjar** yang skill dibidang persawahan diminta datang satu kapal dikepalai pemimpin sukunya Haji Mas Demang, untuk diberikan penghidupan mengerjakan sawah BENDANG di Perbaungan sehingga mereka menjadi makmur.

Kepada etnis Jawa disediakan tanah untuk pelarian/bekas kuli kontrak perkebunan Belanda di Kotosan dan mereka dijadikan warga kesultanan Serdang dan banyak orang Jawa yang dijadikan Wakil Penghulu di desa yang didiami mereka. Kepada orang Mandailing/Tapanuli Selatan banyak dipekerjakan selalu pegawai kerajaan dan sebagai guru agama Islam. Salah seorang dari Orang Besar Kerajaan Serdang, diangkat Tuan Jaksas Kupang Lubis, menjadi Wakil Sultan di Luhak Batak Timur (Bangun Purba), dimana tidak pernah kejadian di kerajaan-kerajaan lainnya di Sumatera. Putera Batak Kristen juga berperan sebagai Guru Sekolah HIS dan jururawat di hospital. Etnis Melayu/Karo/Batak Timur dengan sendirinya sebagai suku asli kerajaan Serdang yang memerintah diberi segala prioritasnya.

Melihat politik pemerintah Hindia Belanda menghapuskan peranan Orang Besar di kerajaan yang selama ini menjadi wakil rakyat dari daerah diganti sebagai pegawai kepala distrik, dengan demikian Raja akan tinggal sendirian dan akan senang dipalu oleh Belanda, maka Sultan Sulaiman melalui anggota *Volksraad*, Parada Harahap, minta diperjuangkan agar di Serdang dapat didirikan “Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga kebijaksanaan kerajaan Serdang dapat didukung rakyatnya (lihat harian *Locomotief* Jakarta 26-11-1925). Tetapi usul Kerajaan Serdang ini tidak digubris Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk langsung bertatap muka dengan rakyat jelata guna mendengarkan keluh kesah mereka maka Sultan Sulaiman menyediakan sarana : Setiap pukul 2 – 6 siang, baginda duduk di tangga Istana untuk menerima penduduk dari desa-desa yang datang menghadap.

Setiap musim durian baginda berada di kebun durian di Tanjung Morawa untuk makan bersama dan tatap muka dengan masyarakat Luhak-Luhak sekitarnya. Dua kali sebulan baginda berlayar dengan kapal pesiar “Senembah” diiringi Lancang Kuning “Tunggal Serdang” dan perahu-perahu rakyat dan bermalam di pasengerahan baginda di Pulau Berhala. Sambil diiringi rombongan musik dan tarian, baginda bertatap muka dengan masyarakat nelayan yang sudah semua tahu untuk berkumpul di sana. Setiap tahun pada musim panas, baginda

hijrah beberapa hari menetap di pesanggerahan di “gunung Paribuan” yang sejuk. Siang dan malam bertemu dengan kepala/penghulu Urung di Serdang Hulu dan rakyat Karo dan Batak Timur. Pada musim menanam padi di sawah, diadakanlah upacara “Jamu Tanah” untuk memberkati bibit benih padi yang harus ditanam secara serentak di Bendang, sambil bertatap muka dengan para petani.

Pada 10 bulan Syafar, baginda membuka upacara “Jamu Laut” untuk memberi berkah kepada para nelayan dan sekaligus membuka upacara adat “Mandi Syafar” yang kemudian diiringi dengan pesta, sambil bertemu muka dan makan bersama dengan penduduk dan menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Cermin.

7. Gerakan Anti-Kolonial Belanda dan Civil Disobedience

Pemerintah Hindia Belanda dengan berat hati terpaksa mengakui Tuanku Sulaiman Syariful Alamshah ditahun 1887 sebagai Sultan Serdang secara fait accompli sebab rakyat dan Orang Besar Serdang sudah menabalkan baginda sebagai raja Serdang ketika Sultan Basharuddin mangkat akhir 1880. Karena Serdang tetap saja menuntut beberapa wilayahnya agar jangan dirampas Belanda lagi, maka pihak investor perkebunan tembakau mendesak pemerintah Hindia Belanda agar dengan kekerasan menetapkan saja wilayah Serdang dan sebahagian besar dimasukkan saja ke Deli, karena Deli lebih mesra bekerjasama dengan mereka.

Karena selalu terendam di musim hujan maka ibukota administratif Kerajaan Serdang dipindahkan Belanda dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam pada tahun 1891, tetapi Sultan Sulaiman tidak mau berdampingan dengan Kontelir Belanda di Serdang dan memindahkan istana/kraton dari Rantau Panjang ke Perbaungan Bandar Setia, sejak 1886 dan mendirikan Istana baru di situ 1892.

Baginda menolak undangan untuk berkunjung menghadap Ratu Belanda, tetapi sebaliknya bersama Permaisuri dan rombongan kecil berangkat ke Jepang untuk menemui Kaisar Jepang Meijo Tenno ditahun 1894. Disambut secara incognito baginda memohon agar Jepang dapat membebaskan Serdang dari

penjajahan Belanda, karena terbukti Jepang sudah menjadi negara industri besar yang ditakuti Barat. Kegiatan baginda dengan Jepang ini terus dilaporkan intelejen Kedutaan Belanda di Tokyo, tetapi tidak berhasil ditemui bukti, maka oleh sebab itu gerak gerik baginda di Serdang diikuti terus oleh P.I.D. (Intelejen Politik Belanda) dan laporan dari Kontelir Belanda di Serdang yang tetap saja menjelekkan baginda. Kerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda tidak lancar.

Hal ini dapat terlihat di dalam Memori Timbang Terima Kontelir Serdang Hulu, De Kock: *“Sultan Serdang adalah seorang yang aneh, ia hanya memikirkan pibaknya saja dan melihat setiap pegawai pemerintahan Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Terutama mengenai Politik yang baru (Perubahan Politik Kontrak Serdang-Hindia Belanda 1907) sangat menyakitkan hatinya terhadap kita. Selalu curiga, maka setiap tindakan kita tetap diperhitungkannya keburukan-keburukan kita yang terselubung dibelakang layar. Jika kita menemuinya untuk penyelesaian sesuatu hal tidak mau ia memberikan keputusan, selalu mengulur-ulur waktu dan jikapun setelah berbincang lama akhirnya kita mendapat jawaban juga, tetapi dengan ini janganlah kita merasa pasti, bahwa sudah ada persetujuan karena kemudian ternyata bahwa Baginda Sultan berbuat seolah-olah tidak pernah ada terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah ada persesuaian paham. Saya harus mengingatkan pengganti saya agar sangat berhati-hati di Serdang, jika kita dengan gembira dapat bekerja sukses di Deli, sebaliknya di Serdang kita musti setiap saat berada dalam ketakutan, karena setiap saat bisa terjadi sesuatu hal yang aneh. Kejadian ini pernah menimpa diri Kontelir Serdang (Kemudiannya menjadi Residen Sumatera Timur), J. Ballot (1893 – 1894)”*.

Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah bekerjasama dengan sahabatnya Dr. R.M. Sutomo antara lain, apabila setiap kuli kontrak orang Jawa yang lari dari perkebunan Belanda karena tidak tahan diperlakukan sebagai setengah budak, maka mereka ditampung dan segera dijadikan “Rakyat Sultan Serdang” sehingga tidak tunduk lagi kepada hukum Hindia Belanda. Kepada mereka diberikan tanah untuk penghidupan mereka di daerah “Kotosan” (Galang). Dengan demikian

meringankan hidup mereka, bebas dari sistem perbudakan di perkebunan dan menjadikan mereka mandiri.

Pada tanggal 19-2-1917 terjadilah gerakan anti-kolonial Belanda di Serdang Hulu dengan memakai nama ajaran baru "Parhudamdandam". Hal ini merisaukan Pemerintah Hindia Belanda sehingga dikirim patroli pasukan KNIL ke sana, tetapi tidak terdapat gerakan aksi bersenjata. Akhirnya, karena kurang puas, Gubernur Sumatera Timur sendiri, GRYZEN, berkunjung ke Serdang Hulu untuk tatap muka dengan tokoh/Pengulu kampung/Kepala Urung di sana tetapi ia menghadapi perlawanan berdiam diri. Ternyata bahwa pembesar kerajaan Serdang sendiri tidak berbuat apa-apa dan non-aktif membiarkan mereka.

Hal ini menambah kecurigaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Sultan Sulaiman yang dianggap bersimpati dan melindungi gerakan "*civil disobedience*" terhadap politik kolonial Belanda. Nanti kita lihat bahwa ketika Jepang mulai berkuasa (1942) terbit pemberontakan "*Guro-guro aroan*" disponsori GERINDO. Dikalangan penduduk Karo di Deli-Hulu dan Langkat-Hulu dengan thema anti-Jepang dan anti-kerajaan, tetapi di Serdang Hulu keadaan aman dan tenang saja.

Pada tahun 1939 Anggota *Volksraad* dari Parindra, M. Husni Thamrin, berkunjung ke istana Serdang dan mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan raja di Indonesia yang begitu anti-kolonial Belanda, seperti Sultan Serdang. Sejak itu P.I.D. memperketat pengintaiannya terhadap baginda, kini dengan mempergunakan salah seorang Tengku, kerabat Sultan Serdang sebagai perwira polisi P.I.D. untuk menangkap golongan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Timur. Setiap hubungan baginda dengan orang-orang Jepang selalu diperiksa. Ketika pecah Perang Dunia ke-2 dan *Nederland* diduduki Jerman maka Ratu dan kabinet Belanda mengungsi ke London. Di Hindia Belanda diadakan kampanye besar-besaran mengumpulkan dana untuk membeli pesawat tempur "*Spitfire*" agar Angkatan Udara Belanda bisa turut berperang di pihak Sekutu menyerang Jerman. Di Istana raja-raja di Indonesia diadakanlah malam amal dana "*Spitfire Funds*". Tetapi Sultan Serdang tidak mau berpartisipasi. Ketika Jepang turut menyerang Hindia Belanda awal

1942, maka pasukan tentara KNIL mengancam dengan latihan militer di sekeliling kraton Kota Galuh (Perbaungan). Ini merupakan ancaman peringatan terakhir terhadap seorang Raja yang membangkang. Ketika tentara Jepang mendarat di Perupuk (Batubara) menuju Medan 11-3-1942, Sultan Sulaiman mengibarkan bendera Merah Putih. Gembira penjajahan Belanda terusir dan Jepang mengetahui bahwa Sultan Sulaiman pernah bertemu Kaisar Tenno Heika Meiji, maka Pemerintah Militer Jepang menghormati Serdang.

Dibuat persetujuan dengan Jepang bahwa Kerajaan Serdang melever beras dari Bendang untuk batalion tentara Jepang di Melati, sebaliknya Jepang tidak akan menangkapi pemuda/i Serdang untuk dijadikan Heiho atau Romusha (pekerja paksa). Spion Jepang yang diselundupkan ke kraton Kota Galuh tidak dapat membuktikan kerjasama Serdang dengan gerakan "*Treffers Organisation*" yang dipimpin T. Rahmatsyah dari Serdang yang memimpin gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dikendalikan Sekutu dari Colombo. Sebaliknya baginda menyuruh keluarga Sultan untuk memasuki ketentaraan Gyugun (T. Nurdin) dan T. Ziwar dan T. Syahrial dan lain-lain memasuki sekolah Pemerintahan militer Jepang di Batu Sangkar.

Ketika Balatentera ke-25 Jepang membentuk *Tyo Sangi In* (DPR Sumatera) di Bukittinggi, utusan Sumatera Timur diwakili oleh T. Putera Mahkota Serdang, Dr. Pirngadi, Adinegoro dan Raja Kaliamsyah Sinaga. Ketika resmi kemerdekaan Indonesia diproklamkan dalam rapat raksasa di Medan 6-10-1945, Sultan Serdang segera mengirim telegram kepada Presiden Soekarno berbunyi : "*Kebudayaan YM. Presiden R.I. bahwa Kerajaan Serdang dengan seluruh daerah taklukannya hanyalah mengakui kekuasaan Pemerintah N.R.I. dan dengan segala kekuatan akan mendukung Republik*" (lihat dalam laporan dalam buku putih Belanda edisi S.L. Van De Wal).

Segera Sultan Serdang memerintahkan menaikkan bendera Sang Saka di kantor-kantor resmi dan rumah penduduk. Baginda juga menyuruh para bangsawan memasuki partai politik dan kesatuan besenjata R.I. dan Palang Merah. Ketika terbit "Revolusi Sosial" (3 Maret 1946) yang disponsori Komunis

di Sumatera Timur maka di Serdang tidak terjadi pembunuhan. Kraton Istana Kota Galuh Perbaungan dijaga oleh pasukan Tentera Republik Indonesia dan baginda tetap di istana sampai mangkat sakit tua, 13 Oktober 1946 usia 84 tahun. Bupati Deli-Serdang mau mengadakan upacara adat kebesaran raja-raja Melayu ketika akan diadakan pemakaman, tetapi pihak keluarga tidak menginginkan melihat situasi sedang bergolak. Didalam pidatonya Bupati S. Munar Hamijoyo memuji sikap perjuangan baginda dan jika sekiranya sekarang Sultan Sulaiman masih muda maka baginda pasti berperan seperti Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono-IX.

Ketika pecah Agresi-I Belanda menyerang Republik Indonesia, maka ketika tentara Belanda mendarat di Kuala Sungai Bongan, 28 Juli 1947 (pagi) untuk merebut titi Sei. Ular yang strategis, maka sesuai Perintah Umum Jendral Sudirman, Kota Perbaungan dan Istana Sultan Serdang serta Kraton Kota Galuh dibakar rata dengan bumi agar jangan dipergunakan Belanda. Istana Sultan Serdang itu sejak akhir 1946 dipergunakan sebagai Kantor Bupati Deli – Serdang dan sebagai markas Tentera Republik Indonesia.

C. Kesultanan Serdang Pasca Kemerdekaan

Periode 1946-2000 adalah masa yang sangat menyedihkan pada masyarakat Melayu di Propinsi Sumatera Utara :

7. Kerajaan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan dan lain-lain telah hapus.
8. Semua istana raja, sebagai pusat adat-budaya Melayu hancur (kecuali istana Maimun di Medan yang pada waktu Revolusi Sosial dijaga oleh tentara British-Indian Divisi ke-27).
9. Hak istimewa masyarakat Melayu, seperti hak atas tanah adat (*Ulayat/Jaluran*) telah pupus dan diduduki masyarakat suku/etnis lain, yang di tahun 1946-1954 disponsori oleh kaum komunis (BTI/Sarbupri).
10. Masyarakat Melayu sudah menjadi minoritas di negeri sendiri (11%).
11. Masyarakat Melayu susah duduk di dalam pemerintahan dan instansi sipil/militer
12. Mereka terdesak di dalam lapangan pendidikan dan mata pencaharian sehingga tergolong masyarakat miskin.

Karena trauma tragedi Revolusi Sosial 1946 banyak yang takut mengaku Melayu. Oleh sebab itulah masa periode 1975-2000 mulai timbul kesadaran kepada orang-orang tua untuk menyelamatkan Adat-Budaya Melayu karena takut kehilangan Jatidiri Melayu untuk generasi muda yang akan datang. Berdirilah organisasi bercorak seni-budaya seperti: Lembaga Kebudayaan Melayu (LKM) dan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI), tahun 1972. Bermula untuk kegiatan kesenian (*music & dance group*) yang nampaknya digemari secara nasional. Berbagai seminar budaya diadakan tetapi sebaliknya banyak terjadi pengkhianatan dan perpecahan dengan berdirinya *splinter groups* yang memakai nama seni budaya Melayu juga. Mendekati awal abad ke-21, orang tua-tua masa kegemilangan Kerajaan Melayu sudah meninggal dunia dan kini keturunan raja/bangsawan terdiri atas anak-anak muda yang sama sekali tidak pernah lagi mengenal adat-istiadat *berraja*.

Karena Serdang sebenarnya adalah pecahan dari Kesultanan Deli (itulah mengapa gelaran sultannya memakai istilah Yang Dipertuan Besar Serdang) maka sesudah Indonesia merdeka ia digabung kembali dengan induknya dan dibentuk Kabupaten Deli-Serdang. Ibukotanya mula-mula di Medan lalu dipindah ke Lubuk Pakam.

Setelah reformasi, Serdang berusaha mengajukan usulan agar dapat berdiri sendiri sebagai sebuah Kabupaten yang terpisah dari Deli. Tahun 2004, terbentuk Kabupaten Serdang Bedagai dengan wilayah kira-kira sebagaimana wilayah Kesultanan Serdang dahulu, tetapi ibukotanya bukan lagi di Perbaungan melainkan dipindah ke Bandar Sungai Rempah.

Yang menarik, meski Kepala Daerah (Bupati) kini dipilih secara demokrasi (bukun karena turun-temurun) tetapi Bupati pertama Serdang Bedagai bernama Tengku Ery Tengku Nurdin seorang anak turun Sultan Serdang. Kebangkitan Kesultanan Serdang saat ini, juga tidak bisa lepas dari himpitan sistem politik negara. Kesultanan Serdang tidak lagi dipahami sebagai representasi perilaku budaya dan adat masyarakatnya. Sehingga, aktivitas kesultanan dibatasi hanya sebagai institusi istiadat saja. Dalam penyelenggaraan istiadatpun diarahkan

agar tidak menjadi perenggang masyarakat dengan akar budayanya, apalagi unsur budaya yang berhubungan dengan kesultanan.

Akan tetapi, pada tanggal 12 Juni 2002, diadakan pergantian kesultanan, dari kesultanan Tuanku Abunawar Sinar Syariful Alam Al-Haj, menjadi Tuanku Luckman Sinar Barshah. Upacara penobatan Tuanku Luckman Sinar Baharshah II selaku Pemangku Adat Kesultanan Negeri Serdang yang ke VIII digelar pada 12 Juni 2002 di Perbaungan dan dihadiri 6.000 orang utusan dari seluruh Serdang dan 2.000 orang undangan dari kalangan pemerintah serta empat negara. Tuanku Luckman Sinar Baharshah II yang memegang tahta adat Kesultanan Negeri Serdang hingga sekarang menjadi penegas bahwa Kesultanan Serdang masih eksis sampai hari ini.

Ketika Tuanku Lukman Sinar Basharshah menjadi Presiden “Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia” (MABMI, 2000-2004), beliau gerakkan usaha sosialisasi di kalangan generasi muda untuk bangga dengan tingginya seni-budaya dan peradaban Melayu di dunia dengan berbagai seminar dan tatap muka. Menggerakkan popularitas menggunakan pakaian Melayu pada upacara (perkawinan/rapat). Disponsori menggunakan upacara adat Melayu dalam acara perkawinan (upacara Meminang Pengantin, Upacara Bersanding, Tepung Tawar dan Balai Upacara Berinai, lomba berpantun dan lain-lain).

Periode 1990-2000 adalah era membangkitkan kesadaran sebagai putera Melayu, meninggalkan sikap fatal berserah diri saja; rasa rendah diri mengatasi cemoohan orang luar bahwa “Melayu Malas” atau ”Melayu Bodoh” dan sikap pesimis untuk berjuang di bidang pendidikan dan usaha kreatif. Lalu timbullah kesan dari kalangan muda, harus ada pedoman yang satu tentang adat-istiadat Melayu yang kini sudah luntur dan dipengaruhi oleh adat etnis lain dan pengaruh asing karena faktor globalisasi melalui film dan televisi.

Digerakkanlah, khususnya di daerah bekas wilayah Kerajaan Serdang (Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai), bahwa di zaman Kerajaan, *Adat-Istiadat-Adat yang Diadatkan* jika ada pelanggaran oleh Sultan dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana seperti hukuman penjara atau

hukuman buang ke luar negeri atau hukuman mati dan Sangsi Sosial (Social sanction) seperti menyatakan bersalah akan sikapnya diiringi kenduri kepada masyarakat kampungnya. Jika itu tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka ia akan dikucilkan dari kehidupan bersama.

Karena pemerintahan Kerajaan di Indonesia sudah tidak ada lagi dalam Republik Indonesia ini, maka harus dilanjutkan kembali fungsi pribadi Raja dan Orang Besarnya sebagai Penguasa Adat–Istiadat (pengawal, pengatur dan salah satu unsur adat itu). Pepatah Melayu mengatakan “Biar mati anak daripada mati adat, mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”. Maka oleh masyarakat Melayu Serdang didukung oleh berbagai organisasi Melayu (MABMI, GAMI, LKM dan lain-lain), maka pada tahun 1997 ditegakkanlah kembali institusi Orang Besar (4 Wazir) diambil dari turunan mereka yang dahulu. Maka para Wazir dan Kepala adat negeri-Luhak itu bermusyawarah dan mengangkat kembali Tuanku Kepala Adat Kesultanan Serdang.

Fungsi Sultan sebagai Kepala Adat tidak dihapuskan Pemerintah Republik Indonesia selagi masih ada masyarakat adat Serdang sebagai pendukungnya. Karena istana Serdang sudah habis terbakar, maka upacara penabalan putera Sultan Sulaiman alm. diadakan di lapangan Perbaungan yang dihadiri oleh lebih 1000 orang utusan dari daerah dan kampung-kampung dan tokoh masyarakat. Pertama diangkat Tuanku Abunawar Sinar bin Sultan Sulaiman Syariful Alamshah, setelah mangkat

Di tahun 2002 Tuanku Lukman Sinar Basharshah dipilih oleh Orang Besar untuk pengganti sampai sekarang.

Untuk melestarikan adat-istiadat Melayu Serdang, maka Tuanku Lukman Sinar Basharshah mengadakan gerakan sebagai berikut :

11. Mengumpulkan kembali seluruh arsip Kerajaan Serdang yang dapat diselamatkan.
12. Wawancara dengan orang tua-tua mengenai adat-istiadat masa Kerajaan Serdang masih ada.

13. Mengadakan Konvensi Adat-Budaya Melayu Kesultanan Serdang dan dihadiri oleh utusan dari distrik di Serdang/para budayawan/sejarahwan dari perguruan tinggi dan menyusun adat-istiadat yang lama dan yang kini berkembang baru (sesuai pepatah adat “Sekali air bah, sekali tepian berubah”), sama disahkan dalam Konvensi di Perbaungan tanggal 27-28 Juli 2007.
14. Menabalkan tokoh-tokoh di setiap kecamatan yang dipilih masyarakat yang dianggap sadar adat-budaya, berkelakuan baik, berpengaruh dan berprestasi, diangkat menjadi Datuk Penghulu Adat.
15. Menyerahkan kepada Datuk Penghulu Adat dan Orang Besar buku hasil Konvensi tanggal 28-29 Juli 2007 sebagai pegangan dan untuk sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda.
16. Menyerahkan buku hasil Konvensi Adat-Budaya Melayu Kesultanan Serdang kepada Menteri Kehakiman-HAM untuk diberi Hak Paten.
17. Menyerukan kepada pemerintah di kecamatan agar Datuk Penghulu Adat dijadikan mitra (*partner*) dalam masalah adat-budaya Melayu.
18. Menginstruksikan kepada Datuk Penghulu Adat agar melaksanakan upacara-upacara adat Melayu seperti “Jamu Laut”, “Jamu Sawah”, Perayaan Islam di Mesjid, dan lokakarya di daerahnya, dihadiri dan diberkati oleh Tuanku Kepala Adat Kesultanan Serdang.
19. Mengadakan tuntutan Tanah Konsesi (Ulayat/adat).
20. Membantu agar keluarga Kesultanan Asahan, Langkat, dan Deli bangkit kembali dan harus dekat dengan rakyatnya, terutama angkatan muda.

Demikianlah perjuangan kami untuk menegakkan petuah kuno adat nenek moyang kita “Ada Raja Adat berdiri, Tiada Raja Adat Mati” dan “Biar mati anak daripada mati Adat. Mati anak gempar sekampung, mati adat gempar sebangsa”! Indonesia adalah sebuah Republik Demokratis dan perlakuan terhadap semua etnis groups adalah sama berdasarkan azas Pancasila. Oleh sebab itu, membangkitkan kembali kesadaran adat beraja di kalangan masyarakat Melayu yang minoritas miskin terbelakang terpengaruh oleh *pornographication* dan *narcotics* di Sumatera Timur adalah perjuangan cukup berat, hanya didukung biaya pribadi sendiri.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KERAJAAN SERDANG

A. Sejarah Berdirinya Kerajaan Serdang

Menurut riwayat, seorang Laksamana dari Sultan Iskandar Muda Aceh bernama Sri Paduka Gocah Pahlawan, bergelar Laksamana Khoja Bintan, menikah dengan adik Raja Urung (negeri) Sunggal, sebuah daerah Batak Karo yang sudah masuk Melayu (sudah masuk Islam). Kemudian, oleh 4 Raja-Raja Urung Batak Karo yang sudah Islam tersebut, Laksamana ini diangkat menjadi raja di Deli pada tahun 1630 M. Dengan peristiwa itu, Kerajaan Deli telah resmi berdiri, dan Laksamana menjadi Raja Deli pertama. Dalam proses penobatan Raja Deli tersebut, Raja Urung Sunggal bertugas selaku Ulon Janji, yaitu mengucapkan taat setia dari Orang-Orang Besar dan rakyat kepada raja. Kemudian, terbentuk pula Lembaga Datuk Berempat, dan Raja Urung Sunggal merupakan salah seorang anggota Lembaga Datuk Berempat tersebut.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1723 M terjadi kemelut ketika Tuanku Panglima Paderap, Raja Deli ke-3 mangkat. Kemelut ini terjadi karena putera tertua Raja yang seharusnya menggantikannya memiliki cacat di matanya, sehingga tidak bisa menjadi raja. Putera nomor 2, Tuanku Pasutan yang sangat berambisi menjadi raja kemudian mengambil alih tahta dan mengusir adiknya, Tuanku Umar bersama ibundanya Permaisuri Tuanku Puan Sampali ke wilayah Serdang.

Menurut adat Melayu, sebenarnya Tuanku Umar yang seharusnya menggantikan ayahnya menjadi Raja Deli, karena ia putera garaha (permaisuri), sementara Tuanku Pasutan hanya dari selir. Tetapi, karena masih di bawah umur, Tuanku Umar akhirnya tersingkir dari Deli. Untuk menghindari agar tidak terjadi perang saudara, maka 2 Orang Besar Deli, yaitu Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembal, bersama seorang Raja Urung Batak Timur di wilayah Serdang bagian hulu (Tanjong Merawa), dan seorang pembesar dari Aceh (Kejeruan Lumu), lalu merajakan Tuanku Umar sebagai

Raja Serdang pertama tahun 1723 M. Sejak saat itu, berdiri Kerajaan Serdang sebagai pecahan dari Kerajaan Deli.

B. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Serdang

Urutan raja yang berkuasa di Serdang adalah sebagai berikut:

1. Tuanku Umar (1723-?).
2. Tuanku Sultan Ainan Johan Almashah (1767-1817)
3. Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (memerintah 1817-1850) M)
4. Sultan Basyaruddin Shaiful Alamshah (1850-1880)
5. Sultan Sulaiman Syariful Alamshah (1880-1946).

C. Periode Pemerintahan

Kerajaan Serdang berdiri lebih dari dua abad, dari 1723 hingga 1946 M. Selama periode itu, telah berkuasa 5 orang Sultan. Sultan Serdang I adalah Tuanku Umar, kemudian ia digantikan oleh Tuanku Sultan Ainan Johan Almashah (1767-1817). Tuanku Sultan Ainan Johan Almashah beristerikan Tuanku Sri Alam, putri Raja Perbaungan. Di masa Sultan Ainan Johan ini, terjadi penyatuan Kerajaan Serdang dan Perbaungan. Ceritanya, sewaktu Raja Perbaungan meninggal dunia, tidak ada orang yang berhak menggantikannya, sebab ia tidak memiliki anak laki-laki. Oleh karena anak perempuan Raja Perbaungan menikah dengan Sultan Serdang, maka akhirnya, Kerajaan Perbaungan digabung dengan Serdang. Jadi, penggabungan ini berlangsung semata-mata karena adanya hubungan kekerabatan, bukan karena peperangan.

Putera Ainan Johan Almashah yang tertua, Tuanku Zainal Abidin, diangkat menjadi Tengku Besar. Suatu ketika ia pergi berperang membantu mertuanya yang sedang terlibat perang saudara merebut tahta Langkat. Dalam peperangan membela mertuanya tersebut, ia terbunuh di Pungai (Langkat) dan digelar Marhom Mangkat di Pungai (1815 M). Untuk menggantikan putera mahkota (di Serdang disebut Tengku Besar) yang tewas, maka, adik putera mahkota, yaitu Tuanku Thaf Sinar Basyarshah kemudian diangkat sebagai penggantinya, dengan gelar yang sama: Tengku Besar.

Ketika Sultan Johan Alamshah mangkat tahun 1817 M, adik Tuanku Zainal Abidin, yaitu Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (memerintah 1817-1850 M) diangkat oleh Dewan Orang Besar menjadi raja menggantikan ayahnya. Ketika itu, sebenarnya Tuanku Zainal Abidin, Tengku Besar yang sudah tewas, memiliki putera, namun puteranya ini tidak berhak menjadi raja, sebab, ketika ayahnya meninggal dunia, statusnya masih sebagai Tengku Besar, bukan raja. Jadi, menurut adat Melayu Serdang, keturunan putera tertua tidak otomatis menjadi raja, karena sebab-sebab tertentu.

Demikianlah, pemerintahan baru berganti dan keadaan terus berubah. Pada tahun 1865 M, Serdang ditaklukkan oleh Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1907 M, Serdang menandatangani perjanjian dengan Belanda yang melarang Serdang berhubungan dengan negeri luar. Setelah bertahun-tahun dalam pengaruh Belanda, akhirnya, pada tahun 1946 M, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamshah, Serdang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Wilayah Kekuasaan

Wilayah kekuasaan kerajaan Serdang meliputi Batang Kuis, Padang, Bedagai, Percut, Senembah, Araskabu dan Ramunia. Kemudian wilayah Perbaungan juga masuk dalam Kerajaan Serdang karena adanya ikatan perkawinan.

E. Struktur Pemerintahan

Struktur tertinggi di Kerajaan Serdang dipimpin oleh seorang Raja. Pada masa itu, peranan seorang raja adalah: Sebagai Kepala Pemerintahan Kerajaan Serdang. Sebagai Kepala Agama Islam (Khalifatullah fi'l ardh) Sebagai Kepala Adat Melayu. Pada masa pemerintahan raja yang ke-2, Tuanku Sultan Ainan Johan Almashah (1767-1817), tersusunlah Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang yang berpangkat Wazir Sultan, yaitu :

- ✓ Raja Muda (gelar ini kemudian berubah menjadi Bendahara)

- ✓ Datok Maha Menteri (wilayahnya di Araskabu)
- ✓ Datok Paduka Raja (wilayahnya di Batangkuwis) keturunan Kejeruan Lumu
- ✓ Sri Maharaja (wilayahnya di Ramunia).

Pembentukan Lembaga Orang Besar Berempat di Serdang ini, disebabkan Raja Urung Sunggal kembali ke Deli, sementara Raja Urung Senembah dan Raja Urung Tg. Merawa tetap menjadi raja di wilayah taklukan Serdang.

Selain para pejabat istana di atas, Sultan juga dibantu oleh Syahbandar (perdagangan) dan Temenggong (Kepala polisi dan keamanan). Sultan Serdang menjalankan hukum kepada rakyat berdasarkan Hukum Syariah Islam dan Hukum Adat seperti kata pepatah, “Adat bersendikan Hukum Syara, Hukum Syara’ bersendikan Kitabullah”. Sultan Ainan Johan Almahshah memperkokoh Lembaga Empat Orang Besar di atas berdasarkan fenomena alam dan hewan yang melambangkan kekuatan, seperti 4 penjuru mata angin (barat, timur, selatan, utara), kokohnya 4 kaki binatang dan azas Tungku Sejarangan (4 batu penyangga untuk masak makanan). Lembaga itu juga melambangkan sendi kekeluargaan pada masyarakat Melayu Sumatera Timur yaitu: suami, isteri, anak beru (menantu) dan Puang (mertua). Demikianlah, pembentukan lembaga di atas didasarkan pada akar budaya masyarakat Serdang sendiri. Selanjutnya, lembaga inilah yang berperan dalam upacara perkawinan maupun perhelatan besar.

F. Kehidupan Sosial-Budaya

Penulisan sejarah yang terlalu berorientasi politik, dengan titik fokus raja, keluarganya dan para pembesar istana menyebabkan sisi kehidupan sosial masyarakat awam jadi terlupakan. Oleh karena itu, bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan data mengenai kehidupan sosial-budaya pada suatu kerajaan secara lengkap. Berikut ini, sedikit gambaran mengenai kehidupan sosial budaya di Kerajaan Serdang pada periode pemerintahan Sultan Thaf Sinar Basarshah. Di masa pemerintahannya, Serdang menjadi

aman tenteram dan makmur karena perdagangan yang ramai. Ketika utusan Kerajaan Inggeris dari Penang, Johan Anderson, mengunjungi Serdang tahun 1823 M, ia mencatat: Perdagangan antara Serdang dengan Pulau Pinang sangat ramai (terutama lada dan hasil hutan).

Sultan Thaf Sinar Basarshah (juga bergelar Sultan Besar) memerintah dengan lemah lembut, suka memajukan ilmu pengetahuan dan mempunyai sendiri kapal dagang pribadi. Industri rakyat dimajukan dan banyak pedagang dari pantai barat Sumatera (orang Alas) yang melintasi pegunungan Bukit Barisan menjaul dagangannya ke luar negeri melalui Serdang.

Baginda sangat toleran dan suka bermusyawarah dengan negeri-negeri yang tunduk kepada Serdang, termasuk orang-orang Batak dari Pedalaman. Cukai di Serdang cukup moderat.

Semua hal di atas bisa terjadi karena Sultan berpegang teguh pada pepatah adat Melayu. Di antara pepatah dan adat tersebut adalah: secukup menjadi segantang, yang keras dibuat ladang, yang becek dilepaskan itik, air yang dalam diperlihara ikan; genggam bara, biar sampai menjadi arang (sabar menderita mencapai kejayaan); cencaru makan petang, bagai lebah menghimpun madu (meskipun lambat tetapi kerja keras maka pembangunan terlaksana); hati Gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah (melaksanakan kerja pembangunan dengan berhasil baik bersama-sama). Dalam perkembangannya, karena Sultan Thaf Sinar Basarshah ini amat berpegang teguh pada adat Melayu disertai sikap lemah lembut dan sopan, akhirnya banyak rakyat Batak di pedalaman yang masuk Melayu (Islam). Atas dasar jasa-jasanya, maka, ketika Sultan Thaf Sinar Basarshah mangkat pada tahun 1850 M, para Orang Besar dan rakyat Serdang memberikan penghormatan untuknya dengan gelar Marhom Besar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Islamisasi di Kerajaan Melayu Sumatera Timur

Pengislaman Asahan/Panai/Bilah/Kota Pinang dimulai ketika seorang puteri Panai bernama Siti Onggu diambil oleh Sultan Al Qahhar dari Aceh ketika Sultan itu baru berhasil menaklukkan benteng “Puteri Hijau” di Haru (Deli Tua). Penaklukkan itu, menurut *Mendes Pinto*¹, terjadi pada tahun 1539 M. Kemudian diceritakan bahwa Siti Onggu hamil tua dan dibawa kembali oleh abang-abangnya. Siti Onggu kemudian melahirkan seorang anak laki-laki dan dijadikan Sultan Abdul Jalil-I, Sultan yang pertama di Asahan. Kemudian abang-abang dari Puteri Siti Onggu menjadi raja-raja Islam di Kota Pinang, Panai, dan Bilah.

Proses “Melayunisasi” (Islamisasi) di kalangan Suku Simalungun di daerah Padang/Bedagai dan Batubara dimulai dengan pengaruh komunikasi dengan penduduk Melayu di pantai, kemudian mereka berbahasa Melayu sehari-hari kemudian masuk Islam dan berpakaian cara Melayu.¹⁸ Di wilayah Deli, Langkat, dan Serdang, proses pengislaman sekaligus Melayunisasi sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Haru dan masa pendudukan Aceh pada abad ke-16 secara damai (melalui perkawinan dan *penetration pacifique*).

Raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu mengawini puteri Sibayak/Pengulu/Perbapaan orang Karo atau Simalungun dan menjadikan mereka Islam dan putera-putera mereka dididik di dalam lingkungan istana Melayu dan kemudian diperkenalkan dengan agama Islam dan budaya Melayu. Mereka yang sudah menjadi Melayu diberikan layanan seperti orang Melayu lainnya. Bahkan kepada kepala-kepala daerah asal Batak itu yang sudah Islam dan sudah diperkenalkan kepada budaya Melayu diberikan gelar-gelar kebangsawanan Melayu seperti “Wan”, “Raja”, “Datuk”, “Orang Kaya”, “Kejeruan”.

Bahwa Wazir Berempat Kerajaan Deli, yaitu Datuk Sunggal/Serbanyaman, Datuk Sukapiring, Datuk Hampan Perak XII Kota dan

¹⁸ “Beberapa Catatan tentang Perkembangan Islam di Sumatera Utara”, juga dalam harian *Analisa Medan*, 10 April 1981.

Kejeruan Petumbak adalah asal Karo masing-masing bermarga Surbakti, Sembiring, dan Barus yang dahulunya adalah Raja-raja Urung di wilayah masing-masing dan membentuk konfederasi, di mana Wakil Sultan Aceh, yaitu Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, sejak tahun 1632 M, ditempatkan di Deli, dijadikan semacam *Primus Inter Pares*. Tetapi sejak Aceh diperintah oleh Raja-raja wanita, maka putera Gocah Pahlawan, bernama Tuanku Panglima Perunggit, memproklamirkan diri bahwa Deli sudah merdeka pada tahun 1699 M.

Begitulah proses tersebut berkelanjutan sampai masa kedatangan pemerintah Kolonial Belanda. Menurut Kontelir *De Haan*, yang mengunjungi Deli Tua, yang merupakan daerah perbatasan antara kampung-kampung Melayu dengan kampung-kampung Karo, pada tahun 1870 antara lain dituliskannya:

“.....tetapi merekapun juga terpisah dari kehidupan umum dan adat mereka makin lama makin berubah menjadi Melayu. Negeri-negeri mereka itu sebaliknya tidak disebut 'Negeri Batak', tetapi kini disebut 'dusun' oleh orang-orang Melayu.”¹⁹

Sultan memerintah negeri-negeri asal Batak itu secara longgar dan hanya bertindak jika ada terjadi perselisihan yang tak dapat didamaikan secara adat. Di antara Suku Batak yang paling cepat mengalami proses “Melayunisasi” ialah Suku Perdambanan antara Sungai Silau dan Sungai Silau Tua di Asahan. Hampir seluruhnya mereka dalam waktu singkat memeluk agama Islam dan menjadi Melayu pada abad ke-18.²⁰

Menurut laporan John Anderson yang dikirim pemerintah Inggris dari Penang ketika mengunjungi negeri-negeri Melayu yang masih merdeka di pesisir Timur Sumatera pada tahun 1823²¹, Kampung Sunggal sendiri masih sebagian penduduknya suku Karo yang belum beragama, tetapi di dalam salah satu laporan

¹⁹ “The Kingdom of Haru and the Legend of Puteri Hijau”, dalam Kongres Sejarahwan Asia (IAHA) ke-7 di Bangkok, 25-27 Agustus 1977.

²⁰ E.E. McKinnon & T. Luckman Sinar, SH., “Kota Cina, Notes on Further Developments at Kota Cina”, dalam *Sumatra Research Bulletin*, Hull University (England), Vol.IV. No.1 Oct. 1974. Juga dalam artikel di majalah yang sama “Kota Cina-Some Preliminary Notes”, Vol. III No.1, Oktober 1975.

²¹ Huzayvin, “Arabia and the Far East”, edisi *M.J. de Goeje*, hal. 149-150, 1906.

pembesar Belanda semasa masih berkecamuknya Perang Sunggal melawan Belanda yang dipimpin Datuk Kecil (Datuk Matdini) pada tahun 1872, dicatat bahwa seluruh penduduk Kampung Sunggal sudah menjadi Melayu (Islam).²²

Adalah politik Pemerintah kolonial Belanda *mereservir* Tapanuli Utara, Dairi, Tanah Karo, dan Simalungun sebagai suatu “*buffer*” (daerah penyangga) antara wilayah Islam di Aceh dan wilayah Islam di Selatan Sumatera dan menjadikan wilayah “*buffer*” itu menjadi wilayah Kristen.

Di Pantai Barat Sumatera Utara diberikan konsesi penyebaran agama Kristen kepada *Rheinische Mission Gesellschaft* (RMG) dari Barmen dan di wilayah Tanah Karo dan Simalungun diberikan bantuan kepada *Nederlandsche Zending Genootschap* (NZG) dari *Rotterdam*, yang sepenuhnya biaya dibantu oleh perkebunan besar tembakau Belanda terutama *Deli Maatschappij*. Untuk mengamankan politik ini, Belanda menempatkan pembesar khusus urusan Batak yang disebut *Controleur voor Bataksche Zaken* di Kerajaan Langkat, Serdang, dan Deli, karena di daerah hulu masing-masing kerajaan itu terdapat penduduk Karo atau Simalungun yang masih perbegu.

Tetapi seperti laporan di Serdang oleh pembesar Belanda, Sultan Serdang diam-diam membendung politik Kristenisasi Belanda itu. Menurut laporan timbang terima Residen Deli-Serdang S. van der Plas 2-6-1913 dituliskan:

“Het is niet wenselyk de Maleische Zelfbestuurders hun directen invloed op de Bataks te doen uitbreiden, iets waarop zij, vooral in Serdang, steeds bedacht zijn. Ik kacht met zeer gewenscht om politieke redenen den rechtstreekschen invloed van Soeltan en Oeroenghoofden die allen Mohamedaan zijn, ook niet te versterken en veeleer de Batakdoesoens als afzonderlijke, of laat ik liever zeggen als meer bijzondere eenbeeden te blijven beschouwen”.

(Tidaklah diinginkan raja-raja Melayu memperteguh pengaruh mereka secara langsung kepada orang-orang Batak, yang sebagaimana halnya di Serdang selalu agak mencurigakan. Saya ingin berdasarkan pertimbangan politik agar pengaruh langsung dari Sultan dan Kepala-Kepala Urung yang

²² Tibbets, “Early Muslim Traders in South East Asia”

beragama Islam itu janganlah diperkuat dan dianggap saja wilayah Batak Dusun itu selaku wilayah khusus atau katakanlah sebagai wilayah kesatuan yang khusus sekali harus diperlakukan).

Hal ini disebabkan karena lambannya proses Kristenisasi di daerah hulu kerajaan-kerajaan tersebut dibandingkan dengan kemajuan dakwah Islam, seperti laporan Belanda: “De Islam heeft in het grensgebied van Boven Serdang meer resultaat dan de Zending van het Rotterdamsche Zendinggenootschap te Gunung Meriah en Kota Jurung. De animo om Christen te worden is bij de Batak bevolking van deze streken niet groot.”²³ (Islam lebih berhasil di wilayah Serdang Hulu daripada *Rotterdamsche Zendinggenootschap* di Gunung Meriah dan Kota Jurung. Keinginan untuk masuk Kristen di kalangan penduduk Batak dalam wilayah ini tidaklah besar).

Untuk mempersiapkan agar wilayah Batak Dusun semuanya memeluk agama Kristen yang akan dihadapkan dengan wilayah pesisir Melayu yang Islam, maka politik Belanda memperbesar pertentangan antara Suku Karo dan Simalungun dengan Suku Melayu dan Belanda berpura-pura membela kedua suku itu antara lain dengan mengusulkan kepada Sultan Serdang agar di Kerapatan Dusun Serdang, yang merupakan mahkamah tertinggi untuk wilayah yang didiami Suku Karo dan Simalungun di Serdang yang diketuai oleh Sultan, ditempatkan juga wakil dari *zending* pendeta Belanda sebagai penasihat, hal mana ditolak oleh Sultan sebagai Ulil Amry dan Zillullah fi'l Ardh.²⁴ Memang pada pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, perkembangan dakwah Islam di daerah Kerajaan Serdang terutama di wilayah Serdang Hulu (Senembah-Tg. Muda dan Batak Timur) sangatlah pesat, terutama setelah oleh Sultan Sulaiman dibiayai perkumpulan Syairus Sulaiman di mana Mufti Kerajaan Serdang, Syekh Zainuddin, duduk di dalamnya beserta Tengku Fachruddin untuk memajukan perkembangan Islam itu.

²³ “The Arabs and the Eastern Trade”, h. 154 – 155.

²⁴ S. van Ronkel “Encyclopedy of Islam”, Jilid I, hal.551, 1927

Di dalam Kerajaan Melayu, Sultan adalah *Kalifatullah*, pemimpin agama Islam di samping kepala pemerintahan dan kepala adat. Sebelum pemerintahan kolonial Barat berkuasa, hukum Syariah Islam berlaku di dalam Kerajaan Melayu dan hukum adat dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam itu, seperti yang dituangkan di dalam pepatah adat Melayu yaitu “Adat bersendi Syara’, dan Syara’ bersendi Kitab Allah.”

Untuk urusan agama Islam, di samping Sultan ada *mufti* Kerajaan, ahli hukum agama Islam, dan di daerah-daerah ada *kadhi* dan *naib kadhi* yang diangkat oleh Sultan. Setelah Belanda masuk, dibuat perjanjian yang disebut *politiek contract* dengan Sultan Siak, Sultan Serdang, Sultan Deli, Sultan Langkat, Sultan Asahan, dan Yang Dipertuan Besar Kualuh serta *korte verklaring* (pernyataan pendek) dengan raja-raja Melayu yang kecil-kecil lainnya. Di dalam perjanjian itu disebut mana-mana hak dan kewajiban Belanda dan mana yang dipihak kerajaan. Mengenai adat dan agama Islam sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban raja-raja Melayu itu yang tak boleh dihalangi dan dicampuri Belanda. Sejak tahun 1928 Mufti Kerajaan Serdang, Tuan Syekh Zainuddin, mendapat pensiun dan kemudian Sultan Sulaiman membentuk suatu badan kolejal “MAJELIS SYAR’I KERAJAAN SERDANG” yang diketuai oleh Tengku Fachruddin. Sultan Sulaiman lalu memindahkan wewenangnya selaku pemimpin agama Islam di Kerajaan Serdang kepada Majelis ini, sehingga Majelis ini mempunyai wewenang yang sangat luas sekali.

Di samping mengatur dan mengurus soal yang berhubungan dengan nikah, talak, dan rujuk, majelis ini juga bertindak sebagai badan mengatur *Baital Mal*, menentukan kapan puasa dan Hari Idul Fitri, kemudian menetapkan *kadhi* dan *naib kadhi*, serta mengurus sekolah dan *machtab* Islam serta mengenai harta warisan. Semua anggota majelis digaji oleh kerajaan dan Ketua Majelis Syar’i dianggap disamakan dengan status Orang Besar Kerajaan. Ketika Tengku Fachruddin meninggal dunia tahun 1937, jabatan Ketua Majelis Syar’i Kerajaan Serdang dirangkap oleh Sultan Sulaiman sendiri dan karena kesibukannya ia lalu ingin menempatkan Haji Abdul Majid Abdullah, bekas anggota Pengurus Besar

PERMI, orang Minangkabau, untuk diangkat menjadi Ketua Majelis Syar'i tersebut, tetapi dilarang oleh Belanda atas anjuran dari Polisi Rahasia Belanda bagian Politik (PID) mengingat Tuan Haji Abdullah tersebut tidak bersimpati terhadap Belanda.²⁵

Lowongan jabatan ketua itu kemudian diisi oleh Tengku Yafizham, sekembalinya beliau dari studi di Kairo pada tahun 1939. Di samping hal di atas Sultan Sulaiman Serdang juga giat membantu perkembangan pendidikan Islam dan Panti Asuhan seperti Al Jamiatul Washliyah dan baginda yang pertama kalinya mengizinkan Sarekat Islam" (SI) boleh bergerak di wilayah kerajaan Melayu di Sumatera Timur dengan berdirinya cabang Serdang yang dipimpin oleh Tengku Fachruddin. Masalah yang juga hampir membuat masyarakat Islam terpecah-belah di Sumatera Timur ialah antara "kaum muda" yang dipelopori oleh Muhammadiyah dengan "kaum tua" yang dianggap mewakili kaum ahli Sunnah wal Jamaah. Di kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur, kegiatan Muhammadiyah dan juga aliran lain selain aliran Mazhab Syafii, dilarang, juga mendirikan masjid dan Perguruan Muhammadiyah. Hal ini membuat masygul hati Sultan Serdang sehingga agar jangan umat Islam terpecah-belah karena soal *chilafiyah* saja, diundanglah oleh Sultan Sulaiman ke Istana Kota Galuh di Perbaungan pada tanggal 5-2-1928 di mana banyak *mufti-mufti* dan ulama-ulama terkemuka dari tiap kerajaan Melayu yang besar di Sumatera Timur untuk bertukar fikiran mengenai masalah ini dan baginda sendiri turut hadir. Muhammadiyah boleh di Serdang.²⁶

Melalui permohonan dari "Bangsawan Sepakat" agar di sekolah rakyat (disebut Sekolah Melayu 3 tahun) yang dibiayai oleh Kerajaan Serdang supaya diajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, ini segera dipenuhi oleh Sultan Sulaiman.¹¹ Juga di Kerajaan Langkat, Sultan Musa pada akhir abad ke-19 mendirikan kompleks pesantren kaum *sufi tharikat Naqsabandiyah* yang dikepalai oleh Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Ketika ia sepulangnyanya dari ibadah Haji,

²⁵ "Shing Cha Sheng Lan", Chapter 2, hal. 27

²⁶ Ying Yai Sheng Lan", mengenai Haru.

melepaskan tahta untuk digantikan oleh putera bungsunya Sultan Abdul Aziz, Sultan Musa lalu tinggal dan beribadat sampai mangkatnya di pesantren Babussalam tersebut.

Sultan Abdul Aziz selain mendirikan mesjid raya Aziziyah yang megah di Tg. Pura itu juga mendirikan Machtab (Kutab) Aziziyah pada tahun 1927 di Tg. Pura yang murid-muridnya banyak datang dari luar daerah (seperti almarhum bekas Wakil Presiden Adam Malik) dan dari luar negeri.

Mengingat hak dari raja-raja Melayu sebagai penguasa dalam bidang agama Islam seperti yang tercantum di dalam kontrak politik itu, maka di dalam wilayah kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur tidaklah dibenarkan mendirikan gereja Kristen, atau mengadakan propaganda agama lain selain Islam di kalangan rakyat kerajaan yang beragama Islam. Oleh sebab itu, pada masa kolonial Belanda tidaklah janggal jika orang suku lain mencatat dirinya sebagai “Melayu” agar lebih terjamin misalnya ketika mau naik Haji ke Mekah.

“Het is onmogelijk het getal juist op te geven, daar de Bataks van de meest bescheiden havens hun reis beginnen om zich dikwijls voor Maleijers uitgeven.”²⁷

(Agak sulit memberikan angka yang tepat, karena orang-orang Batak itu memulai perjalanan mereka dari pelabuhan-pelabuhan yang kecil sekalipun selalu mengatakan diri mereka sebagai orang-orang Melayu).

Peran Kerajaan dalam Pengembangan Agama Islam

Kerajaan Serdang Bedagai adalah salah satu kerajaan melayu yang bernuansa keislaman hal ini bisa dilihat dengan keberadaan istana dan mesjid yang dibangun oleh sultan serdang bedagai dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang mencakup aqidah dan syari’ah, telah meletakkan dasar-dasar aturan dan pedoman kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan (*al-*

²⁷ G.R.Tibbets, “Arab Navigation in the Indian Ocean”, hal. 494 (1971). Lihat juga G.R. Ferrand “Relation de Voyages”. Vol.II, hal.484-541 (1914). Lihat uraian DR.J.P.Moquette “De Grafsteen van Kloempang” dalam Bijlage H. dari Oudheidkundig Verslag, 2de en 3de kwartaal 1922 hal. 69-71.

basanah) di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sasaran (*al-ghayah*) akhir dari syari'ah adalah kemaslahatan umat (*al-mashlahah*). Upaya apa saja yang dilakukan untuk kemaslahatan itu pada hakikatnya adalah sejalan dengan syari'ah Allah (*inna ghayah al-syari'ah al-mashlahah, wa ainama tujad al-mashlahah fa tsamma syar' Allah*).

Setelah Tuan Shekh Haji Zainuddin berhenti sebagai Mufti Kerajaan Serdang (1928), maka Sultan Sulaiman membentuk suatu Dewan bernama "*Majelis Syar'i Kerajaan Serdang*", dimana Sultan memindahkan kekuasaannya selaku Khalifatullah Fi'l Ardh (Kepala Agama Islam) kepada Majelis ini yang bersifat kolegial (Dewan) dipimpin oleh Tengku Fachruddin dan setelah dia meninggal dunia 1937 baginda mau menggantikannya dengan seorang ulama dari Minangkabau, Haji Abd. Majid Abdullah (bekas ketua PERMI) tetapi dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda karena Tuan Haji itu terkenal anti-Belanda. Terpaksalah diambil Tengku H. Yafizham yang disuruh kembali dari studinya di Universitas Al-Azhar (Kairo) ditahun 1939. Karena baginda sangat concern melihat situasi perpecahan dikalangan umat Islam di Sumatera Timur antara Kaum Muda (Muhammadiyah) dengan Kaum Tua (Ahli sunnah wal jama'ah), maka baginda membuat muzakarah pertemuan dimana diundang tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Sumatera Timur untuk seminar di Istana Sultan Serdang pada tanggal 5-2-1928 dan hasilnya dituangkan didalam sebuah buku. Baginda juga giat membantu perkembangan Al Jamiatul Washliyah sebagai perguruan modern Islam dimana salah seorang pendirinya, Tuan H. Abd. Rahman Syihab (Melayu Galang) lulusan dari "Syairus Sulaiman".

Di antara syari'at yang telah digariskan dalam Al-Qur'an adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan masjid terulang sebanyak 28 kali yang menurut bahasa berakar dari kata *sajada*, sujud, dan berhati patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Masjid adalah bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat dalam arti tempat sujud Bentuk lahiriah dalam shalat, yang antara lain ditandai meletakkan dahi, kedua belah telapak tangan, lutut dan

kaki ke bumi adalah manifestasi dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sujud dalam arti syari'ah ini pada hakikatnya adalah fungsi minimal dari masjid.²⁸

Kalau masjid dihubungkan dengan makna yang terkandung pada akar katanya, maka fungsi masjid adalah tempat melaksanakan segala aktivitas yang mengandung dan menggambarkan kepatuhan kepada Allah semata-mata.

Badan Kemakmuran masjid pusat Depag menyatakan : sekarang masjid tidak hanya jadi pusat peribadatan dalam arti sempit, melainkan juga telah menjadi pusat-pusat perekonomian, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan saat ini. Tentu saja langkah ini menggembirakan, karena di samping lebih memakmurkan masjid, juga dapat mengembangkan potensi peningkatan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan umat.²⁹

Masjid sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas dalam penyampaian ajaran Islam, sehingga di sebut *Madrasah Nubuah*. Dari sanalah memancar cahaya petunjuk Rasulullah masa sahabat, dan tabi'in dan sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman pun masjid adalah penghubung antara dunia dan akhirat dan sebagai pengikat antara aqidah yang bersih dengan kehidupan sosial manusia di dunia secara harmonis. Dari uraian tersebut maka terlihat betapa besarnya peranan kerjaan dalam mengembangkan agama Islam dan masjid salah satunya tempat pengembangan agama Islam dengan lewat dakwah.

Kerukunan Antar-Etnis dan Demokratisasi

Baginda Sultan Sulaiman tidak ada membeda-bedakan berbagai etnis yang ada di wilayah Kerajaan Serdang. Sebagaimana telah kita lihat, etnis **Banjar** yang skill dibidang persawahan diminta datang satu kapal dikepalai pemimpin sukunya Haji Mas Demang, untuk diberikan penghidupan mengerjakan sawah Bendang di Perbaungan sehingga mereka menjadi makmur.

Kepada etnis Jawa disediakan tanah untuk pelarian/bekas kuli kontrak perkebunan Belanda di Kotosan dan mereka dijadikan warga kesultanan Serdang

²⁸ Amiur Nuruddin, *Fungsi dan Peranan Masjid dalam Tinjauan Syari'ah*, (Medan: MUI SUMUT, 1998), h. 1.

²⁹ Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Fiqih Masjid*, (Jakarta: t.p, 2000), h. 40.

dan banyak orang Jawa yang dijadikan Wakil Penghulu di desa yang didiami mereka. Kepada orang Mandailing/Tapanuli Selatan banyak dipekerjakan selalu pegawai kerajaan dan sebagai guru agama Islam. Salah seorang dari Orang Besar Kerajaan Serdang, diangkat Tuan aksa Kupang Lubis, menjadi Wakil Sultan di Luhak Batak Timur (Bangun Purba), dimana tidak pernah kejadian di kerajaan-kerajaan lainnya di Sumatera. Putera Batak Kristen juga berperan sebagai Guru Sekolah HIS dan jururawat di hospital. Etnis Melayu/Karo/Batak Timur dengan sendirinya sebagai suku asli kerajaan Serdang yang memerintah diberi segala prioritasnya.

Melihat politik pemerintah Hindia Belanda menghapuskan peranan Orang Besar di kerajaan yang selama ini menjadi wakil rakyat dari daerah diganti sebagai pegawai kepala distrik, dengan demikian Raja akan tinggal sendirian dan akan senang dipalu oleh Belanda, maka Sultan Sulaiman melalui anggota *Volksraad*, Parada Harahap, minta diperjuangkan agar di Serdang dapat didirikan “Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga kebijaksanaan kerajaan Serdang dapat didukung rakyatnya (lihat harian *Locomotief* Jakarta 26-11-1925). Tetapi usul Kerajaan Serdang ini tidak digubris Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk langsung bertatap muka dengan rakyat jelata guna mendengarkan keluh kesah mereka maka Sultan Sulaiman menyediakan sarana : Setiap pukul 2 – 6 siang, baginda duduk di tangga Istana untuk menerima penduduk dari desa-desa yang datang menghadap.

Setiap musim durian baginda berada di kebon durian di Tg. Morawa untuk makan bersama dan tatap muka dengan masyarakat Luhak-Luhak sekitarnya. Dua kali sebulan baginda berlayar dengan kapal pesiar “Senembah” diiringi Lancang Kuning “Tunggal Serdang” dan perahu-perahu rakyat dan bermalam di pasengerahan baginda di Pulau Berhala. Sambil diiringi rombongan musik dan tarian, baginda bertatap muka dengan masyarakat nelayan yang sudah semua tahu untuk berkumpul di sana. Setiap tahun pada musim panas, baginda hijrah beberapa hari menetap di pesengerahan di “gunung Paribuan” yang sejuk. Siang dan malam bertemu dengan kepala/penghulu Urung di Serdang Hulu dan rakyat

Karo dan Batak Timur. Pada musim menanam padi di sawah, diadakanlah upacara “Jamu Tanah” untuk memberkati bibit benih padi yang harus ditanam secara serentak di Bendang, sambil bertatap muka dengan para petani.

Pada 10 bulan Syafar, baginda membuka upacara “Jamu Laut” untuk memberi berkah kepada para nelayan dan sekaligus membuka upacara adat “Mandi Syafar” yang kemudian diiringi dengan pesta, sambil bertemu muka dan makan bersama dengan penduduk dan menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Cermin.

BAB V

PENUTUP

Sejarah Kesultanan Serdang (1720-1946), tidak terpisahkan dari peranan agama Islam yang mempengaruhi dan mewarnai era kegemilangannya. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang di Kesultanan Serdang meliputi perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah Sultan-sultan yang memerintah mengadopsi hukum dan syariat Islam ke dalam sistem pemerintahan. Islam di Kesultanan Serdang dan salah satu yang paling menonjol adalah perpaduan adat Melayu dengan nilai-nilai Islam. Walaupun unsur-unsur budaya Hindu dan Budha masih mewarnainya. Di zaman Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah yang berlangsung dari era kolonialisme Belanda berkuasa (1866) hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia (1946), Islam semakin berkembang dengan pesat. Selain sebagai kepala pemerintahan, Sultan juga adalah Khalifah Fil Ardi, atau disebut juga dengan Amirul Mukminin dimana Sultan juga mengangkat alim ulama untuk mengurus seluk-beluk keagamaan dengan melantik Qadhi, membentuk Majelis Syar'i yang berfungsi untuk menjalankan syariat Islam di tengah masyarakat, mendirikan madrasah dan sekolah.

Selain mempunyai Sultan-sultan yang berpengaruh, Kesultanan Serdang sejak 1720 sampai 1946, juga melahirkan tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang alim bijaksana. Dengan bantuan tokoh-tokoh dan alim ulama tersebut sistem pemerintahan dalam Kerajaan Serdang berjalan dengan baik dan teratur. Keberadaan ulama dan tokoh-tokoh Islam tersebut turut mewarnai kehidupan masyarakat di Kesultanan Serdang. Adapun mengapa akhirnya Kesultanan Serdang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia pada 1946 yang mengakhiri sejarah Kesultanan Serdang, bertitik tolak dari tumbuhnya gerakan kebangsaan yang ingin mengakhiri kekuasaan kolonial. Pada awal abad ke-20 banyak lahir organisasi, baik politik maupun sosial yang sarat dengan muatan kebangsaan. Organisasi ini berkembang dengan cepat, termasuk di

Sumatera Timur wilayah Kesultanan Serdang berada di dalamnya. Bagi Sultan Sulaiman, pergerakan kebangsaan ini memiliki andil cukup besar dalam penguatan politik dimana dimensi pembangkangan beliau makin meluas dan bersinggungan dengan kelompok pergerakan nasional. Masa itu, Indonesia bukan lagi istilah etnografi, melainkan entitas politik yang menautkan berjuta-juta orang di Hindia Belanda dari berbagai latar belakang di dalam maupun luar negeri dalam satu pertalian nasib.

Konflik antara sultan-sultan dan penguasa penjajah asing memang bukan rahasia lagi. Konflik antar dua pola kekuasaan itu tidak bisa dilihat lepas dari dampak agama, dimana Islam mewakili kepentingan pribumi. Kaum elit Islam yang mulai berkembang di kalangan bangsawan dan agama, mulai memperlihatkan kebenciannya kepada elit-elit penguasa yang menjadi boneka kolonial. Bahwa beberapa dari sultan itu mencari perlindungan pada penguasa kolonial telah mengalami jalan keruntuhan kekuasaan mereka sendiri. Pada waktu itu, gerakan kemerdekaan yang masih lemah dipelopori oleh keluarga raja-raja sendiri, yakni bangsawan yang pernah memperoleh pendidikan Barat. Dengan demikian, gerakan nasional (kebangsaan) mulai dari bawah, dari rakyat. Mereka berkumpul di bawah bendera nasionalis-Islam, namun terbuka juga bagi para nasionalis (yang anti-Belanda) dari agama lain karena yang ditonjolkan adalah hal-hal yang bisa menyatukan bangsa, lepas dari soal hubungan salah satu bangsa dengan penguasa lokal atau regional. Gerakan kebangsaan yang muncul di awal abad ke-20 itu tidak lagi bersatu dalam kesetiannya terhadap sistem Kesultanan, melainkan ia telah bertekad untuk menggantikannya. Jadi logislah, bahwa bentuk negara merdeka yang dicita-citakan itu mengambil bentuk republik, bukan kerajaan. Jadi, ketika bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, mereka memproklamirkan bersama-sama, dengan tidak melihat keterikatan keagamaan, ras atau kedudukan sosial. Orang Cina yang ikut aktif dalam gerakan kebangsaan Indonesia dimasukkan. Titik yang membedakan ialah apakah seseorang ikut dan mendukung dalam tujuan kebangsaan itu atau tidak. Perjuangan umat Islam melawan penjajahan kolonial Portugis, Belanda, dan

Inggris dimulai dari kerajaan-kerajaan, dan kemudian diteruskan oleh perjuangan rakyat semesta yang dipimpin sebagian besar oleh para ulama. Jadi perjuangan ini dirintis sejak dari perlawanan kerajaan-kerajaan Islam, kemudian diteruskan dengan munculnya pergerakan sosial di daerah-daerah, yaitu perlawanan rakyat terhadap kolonial/ penjajahan dan para agen-agennya, sampai dengan munculnya kesadaran bernegara yang merdeka. Tidak heran kalau kemudian Sultan Serdang yang terakhir, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, membaca konstelasi perkembangan yang berubah drastis itu dan bergabung dengan arus nasionalisme. Kalau tidak, maka ia akan mengalami nasib yang sama sebagaimana yang dialami Kesultanan dan kaum kerabatnya di daerah-daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin, *Fungsi dan Peranan Masjid dalam Tinjauan Syari'ah*, (Medan: MUI SUMUT, 1998).
- Anwar Saleh Daulay, *Masjid Paripurna dan Urgensinya dan Urgensi Pembangunannya*, (Medan: Dewan Masjid Indonesia SUMUT, Pusat Kajian taswuf, Istiqamah Mulya Foundation, 2005) Disampaikan dalam seminar Nasional: Masjid dan Pembangunan di Bina Graha Pemprop SU tanggal 09 Pebruari 2005.
- Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Fiqih Masjid*, (Jakarta: t.p, 2000).
- E.E. McKinnon & T. Luckman Sinar, SH., "Kota Cina, Notes on Further Developments at Kota Cina", dalam *Sumatra Research Bulletin*, Hull University (England), Vol.IV. No.1 Oct. 1974. Juga dalam artikel di majalah yang sama "Kota Cina-Some Preliminary Notes", Vol. III No.1, Oktober 1975.
- G.R.Tibbets, "*Arab Navigation in the Indian Ocean*", 1971.
- Huzayvin, "Arabia and the Far East", edisi M.J. de Goeje, hal. 149-150, 1906.
- Ichwan Azhari, *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2013)
- J.P.Moquette "*De Grafsteen van Kloempang*" dalam Bijlage H. dari Oudheidkundig Verslag, 2de en 3de kwartaal 1922.
- M.Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, Terj. M. Suroso, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 73
- Mohd Adnan Harahap, *Peran Masjid dalam Pemberdayaan Jamaah*, (Medan: Dewan Masjid Indonesia Sumut, Pusat Kajian Taswuf, Istiqamah Mulya Foundation, 2005), Disampaikan dalam seminar Nasional: Masjid dan Pembangunan di Bina Graha Pemprop SU tanggal 09 Pebruari 2006.
- S. van Ronkel "Encyclopedy of Islam", Jilid I, hal.551, 1927
- Sinar, Tuanku Luckman Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*.
- , Tuanku Luckman Basarshah II, 2003, *Kronik Mabhkota Kesultanan Serdang* (Medan: Yandira Agung).
- , Tuanku Luckman Basarshah II, 2007, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, (Medan: Yayasan Kesultanan Serdang).
- , Tuanku Luckman Sinar Basarshah II, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan: tanpa penerbit).

The Kingdom of Haru and the Legend of Puteri Hijau”, dalam Kongres Sejarahwan Asia (IAHA) ke-7 di Bangkok, 25-27 Agustus 1977.

Tibbets, “Early Muslim Traders in South East Asia”